

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN WISATA DESA EDELWEIS  
(Studi Pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TESIS**

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN WISATA DESA EDELWEIS  
(Studi Pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)**

Oleh:

**TRI WIYANTO**  
**NIM 186030111111005**

telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 30 Desember 2019  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Pembimbing,

Ketua

Anggota

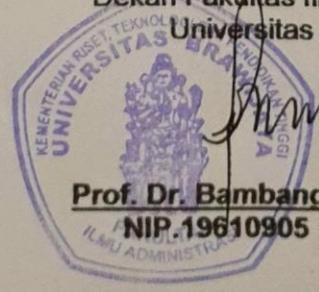
**Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S**  
**NIP.19610905 198601 1 002**

**Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si**  
**NIP.19710505 199903 2 001**

Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik

**Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA**  
**NIP.19711013 200003 2 001**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya



**Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S**  
**NIP.19610905 198601 1 002**



**JUDUL TESIS:**

PERENCANAAN PENGEMBANGAN WISATA DESA EDELWEIS  
Studi Pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Nama Mahasiswa : Tri Wiyanto  
NIM : 186030111111005  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Minat : Perencanaan Pembangunan Daerah

**KOMISI PEMBIMBING:**

Ketua : Prof.Dr. Bambang Supriyono, M.S  
Anggota : Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si

**TIM DOSEN PENGUJI:**

Dosen Penguji 1 : Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si  
Dosen Penguji 2 : Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA

Tanggal Ujian : 30 Desember 2019  
SK Penguji :



**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya Ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Desember 2019  
Mahasiswa,



Nama : Tri Wiyanto  
NIM : 186030111111005  
PS : Magister Ilmu Administrasi Publik  
PPSUB



## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI





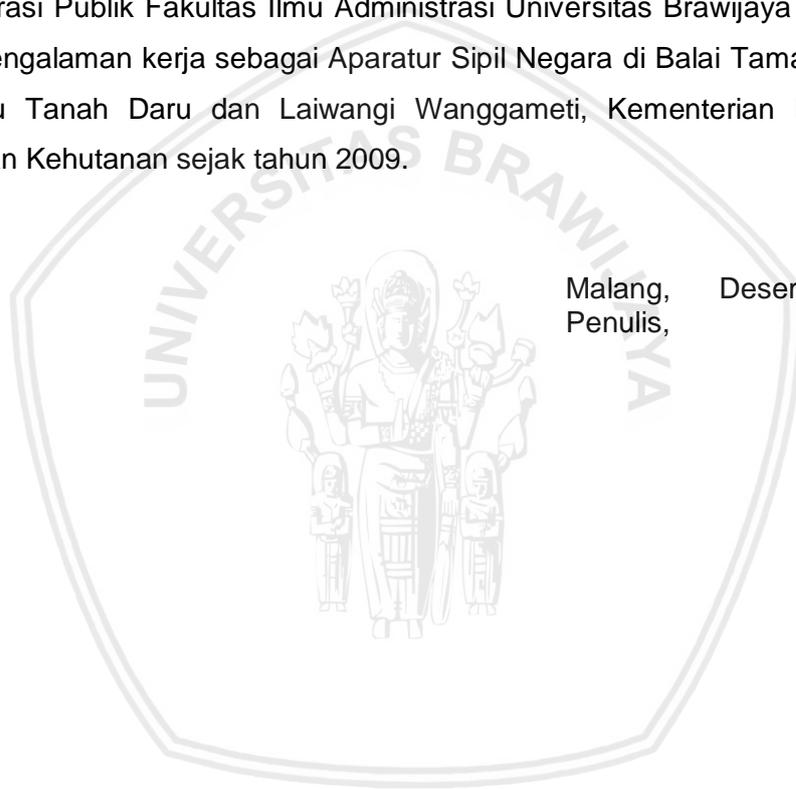
*Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada  
Ayahanda dan Ibunda tercinta,  
Anak dan istriku tersayang*



## RIWAYAT HIDUP

Tri Wiyanto, Ngawi, 24 Januari 1985, putra dari bapak Parlan dan ibu Sumini, riwayat pendidikan SDN Simo 1 Kendal Ngawi lulus tahun 1997, SMPN 1 Magetan lulus tahun 2000, SMAN 1 Magetan lulus tahun 2003, program studi Konservasi Sumber Daya Hutan pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2008. Melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya lulus tahun 2019. Pengalaman kerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2009.

Malang, Desember 2019  
Penulis,



## UCAPAN TERIMA KASIH

Tesis yang berjudul **“Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis (Studi Pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)”** merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik. Terwujudnya tesis ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
2. Ibu Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA selaku Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing Tesis yang dengan tulus telah mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini
4. Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si dan Bapak I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP.,M.AP., Ph.D selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan guna penyempurnaan tesis ini
5. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat serta seluruh staf pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik atas bantuan dan dukungannya
6. Kepala Pusbindiklatren Bappenas beserta jajarannya, atas kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

7. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
8. Kepala Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti, atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
9. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru beserta jajarannya, atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penelitian hingga terselesaikannya tesis ini
10. Kepala Badan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Pasuruan dan Kepala Badan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian
11. Kepala Desa Wonokitri dan Kepala Desa Ngadisari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian
12. Ketua Kelompok Tani “Hulun Hyang” desa Wonokitri dan Kelompok Tani “Kembang Tana Layu” desa Ngadisari yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya tesis ini
13. Kepada Ayahku Parlan, Ibuku Sumini, Istriku tersayang Tuffy Ajeng Dessyana, Putriku Alesha Rafa Azzahra atas dukungan, bantuan, kesabaran dan doa selama proses studi hingga hingga terselesaikannya tesis ini

14. Rekan-rekan Tailor Made 15 atas semangat kekeluargaan, kekompakan, bantuan, dukungan dan doa yang diberikan hingga saat ini
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat.

Malang, Desember 2019  
Penulis,



## RINGKASAN

Tri Wiyanto, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. **Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis (Studi Pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru).** Ketua Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS dan Anggota Komisi Pembimbing: Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dalam rangka konservasi Edelweis. Edelweis memiliki tiga aspek penting yaitu aspek ekologi, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. Kondisi empiris membuktikan masih terjadi pengambilan Edelweis di TNBTS oleh oknum masyarakat suku Tengger. Edelweis digunakan untuk keperluan sesaji adat Tengger dan dijual untuk kebutuhan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019 adalah melestarikan keseimbangan ekosistem ekosistem khas TNBTS (laut pasir, ranu, fungsi lindung kawasan), keanekaragaman hayati yang memiliki nilai konservasi tinggi dan mendukung pelestarian suku Tengger.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar TNBTS; (2) bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar TNBTS; dan (3) faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar TNBTS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan fenomena dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Fokus penelitian ini adalah: (1) perencanaan, meliputi mekanisme perencanaan, identifikasi *stakeholders* dan rencana program kegiatan; (2) bentuk partisipasi masyarakat, dan (3) Faktor pendukung dan penghambatnya, meliputi faktor pendukung, yaitu faktor lingkungan (budaya), faktor perkembangan ilmu dan teknologi, faktor sistem yang digunakan dan faktor pendanaan. Sedangkan faktor penghambat, yaitu faktor lingkungan (sosial), faktor sumber daya manusia perencana dan faktor lain meliputi dukungan perencanaan pemerintah daerah dan ego sektoral. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interkatif Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan yang dilakukan oleh Balai Besar TNBTS melalui pendekatan *top-down* sudah dilaksanakan cukup baik karena memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ide/gagasan bagi level bawah dalam kerangka Balai Besar TNBTS. Sedangkan melalui pendekatan *bottom-up* pada pelaksanaannya belum maksimal karena partisipasi masyarakat sangat terbatas dan tidak ada sinergi perencanaan melalui musrenbangdes, b) *stakeholders* yang terlibat adalah Balai Besar TNBTS beserta unit organisasi dibawahnya berperan sebagai *policy creator*, koordinator dan fasilitator. *Stakeholders* yang berperan sebagai akselerator yaitu Balai Besar KSDA Jawa Timur, LIPI, tokoh masyarakat Tengger, Pemdes Wonokitri dan Pemdes Ngadisari, Pemcam Tosari dan Pemcam Sukapura, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo, akademisi/mahasiswa. Sedangkan *stakeholders* yang berperan sebagai implementor yaitu Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu, dan c) Balai Besar TNBTS merumuskan rencana



program kegiatan berupa identifikasi desa Edelweis TNBTS, pembentukan kelompok desa Edelweis, penyusunan RKT kelompok desa Edelweis, pendampingan kelompok desa Edelweis, pembibitan Edelweis, penanaman Edelweis, pemeliharaan Edelweis, pelatihan budidaya Edelweis, *workshop* pembuatan paket wisata Edelweis, promosi *Land of Edelweis* TNBTS di bandar udara, festival *Land of Edelweis* TNBTS dan monitoring dan evaluasi pembinaan desa Edelweis. (2) bentuk partisipasi masyarakat meliputi partisipasi pemikiran dan partisipasi keterampilan, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan unsur-unsur dalam pencapaian keberhasilan pengembangan wisata yaitu unsur *attraction*, *amenities*, *accessibility* dan *ancilliary/hospitality*. Disamping itu, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi wisata (3) Faktor pendukung: faktor lingkungan (budaya) berupa kebutuhan Edelweis untuk sesaji adat masyarakat Tengger sehingga mendorong upaya konservasi Edelweis, faktor perkembangan ilmu dan teknologi berupa penggunaan aplikasi RKA-KL yang mempermudah Balai Besar TNBTS dalam merumuskan perencanaan, faktor sistem yang digunakan berupa kebijakan-kebijakan pendukung dan faktor pendanaan berupa dukungan anggaran Balai Besar TNBTS dan pendanaan *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia serta Wana Wiyata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan faktor penghambat: faktor lingkungan (sosial), yaitu kesadaran dan motivasi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari untuk budidaya Edelweis relatif kurang, faktor sumber daya manusia perencana, yaitu tidak tersedianya jabatan fungsional perencana dan rendahnya sumber daya manusia masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari, faktor lainnya meliputi tidak ada dukungan perencanaan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan tidak adanya alokasi program pengembangan destinasi pariwisata pada tahun 2020 hingga 2023 pada dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 dan adanya ego sektoral sebagai akibat perbedaan perspektif tentang regulasi yang digunakan dan perbedaan prioritas pengelolaan.

Peneliti menyampaikan saran diantaranya: (1) Balai Besar TNBTS melakukan pendampingan dan memberikan motivasi secara kontinyu, peningkatan partisipasi masyarakat sasaran untuk menyampaikan ide/gagasan melalui murenbangdes, (2) Balai Besar TNBTS mengusulkan alih jabfung/pengadaan jabatan fungsional perencana dan mengkomunikasikan secara berkala ke Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK (3) Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo menempatkan desa Edelweis Wonokitri dan desa Edelweis Ngadisari sebagai program prioritas destinasi wisata, memberikan dukungan anggaran dalam dokumen dokumen RKPD, dan memberikan instruksi kepada Pemdes Wonokitri dan Pemdes Ngadisari agar menggunakan seluruh atau sebagian dana desa untuk pengembangan wisata desa Edelweis (4) Balai Besar TNBTS bersama Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo menghilangkan ego sektoral dan meningkatkan *collaborative government*, salah satunya dengan 1) sinkronisasi perencanaan di Balai Besar TNBTS dengan perencanaan di Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo melalui musrenbang, 2) mengkaji kebijakan terkait pengelolaan desa penyangga kawasan TNBTS sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri LHK, Mendagri dan Menparekraf untuk menerbitkan peraturan bersama tentang pedoman pengembangan wisata di desa penyangga kawasan konservasi.

*Kata kunci: perencanaan, pengembangan wisata, Edelweis*

## SUMMARY

Tri Wiyanto, Master of Science Program in Public Administration Faculty of Administrative Sciences Brawijaya University. **Edelweis Village Tourism Development Planning (Study at Bromo Tengger Semeru National Park Office)**. Supervisor: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS and Co-Supervisor: Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si

---

The background of this research is the efforts of Bromo Tengger Semeru National Park Office (BTSNP) for conservation the Edelweis. Edelweis has three important aspects namely ecological aspects, socio-cultural aspects and economic aspects. Empirical conditions prove that Edelweis taking is still taking place in BTSNP by individuals from the Tengger tribe, in addition to the needs of traditional offerings but some of it is sold for economic needs for disadvantaged people. One of the strategic targets as stated in the strategic plan of the 2015-2019 BTNSP Office is to preserve the balance of the ecosystems of the typical ecosystem of BTSNP (sand sea, "ranu", protected area functions), biodiversity that has high conservation value and supports the preservation of the Tengger tribe.

This study aims to describe and analyze: (1) planning for the development of Edelweis village tourism in the BTNSP Office; (2) form of community participation in planning the development of Edelweis village tourism in the BTNSP Office; and (3) supporting and restricting factors in the planning of the development of Edelweis village tourism in the BTNSP Office. This research is a descriptive study with a qualitative approach, which is describing and analyzing based on phenomena and facts in the field. The focus of this research is: (1) planning, including planning mechanisms, identification of stakeholders and planned program activities; (2) forms of community participation, and (3) Supporting and restricting factors, development factors of science and technology, system factors used and funding factors. While the restricting factors, namely environmental factors (social), human resource planners and other factors include support for regional government planning and sectoral ego. Data collection is done by observation, interviews and documentation. Data analysis used Miles, Huberman and Saldana's interactive model analysis.

The results of the study show that: (1) the planning carried out by the BTNSP Office through the top-down approach has been implemented quite well because it provides an opportunity to be able to convey ideas / ideas to the lower levels within the framework of the BTNSP Office. Whereas through the bottom-up approach, the implementation has not been maximized because community participation is very limited and there is no synergy in planning through the village development planning meetings. Stakeholders who acted as accelerators were the KSDA East Java Office, LIPI, Tengger community leaders, Wonokitri Village Government and Ngadisari Village Government, Tosari Sub-Regency and Sukapura Sub-Regency, Pasuruan Regency and Probolinggo Regency, academics/students. Whereas stakeholders who act as implementers are the Hulun Hyang Farmer Group and the Kembang Tana Layu Farmer Group, and c) the BTNSP Office for the formulation of a program of activity programs in the form of identifying the Edelweis TNBTS village, the formation of the Edelweis village group, the preparation of the Edelweis village group, the Edelweis village group assistance, the Edelweis village group, Edelweis nurseries, Edelweis

planting, Edelweis maintenance, Edelweis cultivation training, Edelweis tourism package making workshops, promotion of the TNBTS Land of Edelweis at airports, the Land of Edelweis TNBTS festival and monitoring and evaluation of Edelweis village development (2) forms of community participation include thought participation and skills participation, as well as community participation in realizing elements in achieving the success of tourism development, namely the elements of attraction, amenities, accessibility and ancillary / hospitality. In addition, community participation in the use of information technology as a means of tourism promotion (3) Supporting factors: environmental (cultural) factors in the form of Edelweis needs for Tengger people's customary offerings so as to encourage Edelweis conservation efforts, factors in the development of science and technology in the form of using RKA-KL applications make it easy for the BTNSP Office to formulate plans, system factors used in the form of supporting policies and funding factors in the form of BTNSP Office budget support and Bank Indonesia Corporate Social Responsibility funding and Wana Wiyata Ministry of Environment and Forestry. While the restricting factors: environmental factors (social), namely awareness and motivation of the Wonokitri and Ngadisari Villages for Edelweis cultivation are relatively lacking, the planners 'human resource factors, namely the unavailability of functional planners' positions and the low human resources of the Wonokitri and Ngadisari Villages, Other factors include the lack of local government planning support as indicated by the unavailability of allocation of tourism destination development programs in 2020 to 2023 in the Pasuruan Regency RPJMD document and Probolinggo Regency RPJMD document and the sectoral ego as a result of differing perspectives on regulations used and differences in management priorities.

Researcher conveyed suggestions including: (1) the BTSNP Office for mentoring and providing continuous motivation, increasing the participation of target communities to submit ideas / ideas through deliberation on development plans, (2) BTSNP Office proposing functional transfer/procurement of functional planners and periodically communicating to the Bureau of Staffing and Organization of the Ministry of Environment and Forestry (3) Pasuruan Regency Government and Probolinggo placed Edelweis Wonokitri and Edelweis Ngadisari villages as priority tourist destination programs, provided budget support in RKPD documents, and gave instructions to Wonokitri village government and Ngadisari so that use all or part of the village funds for the development of Edelweis village tourism (4) BTSNP Office together with Pasuruan Regency Government and Probolinggo eliminate sectoral egos and increase collaborative government, one of which is by 1) synchronizing planning at BTSNP Office with planning in Pasuruan Regency Government and Probolinggo through development planning meetings, 2) reviewing policies related to the management of the buffer village of the BTSNP area as a recommendation material to the Minister of Environment and Forestry, the Ministry of Home Affairs and the Minister of Tourism and Creative Economy to issue a joint regulation on guidelines for tourism development in the village buffering the conservation area.

*Keywords: planning, tourism development, Edelweis*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis (Studi pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)". Tesis ini menyajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi perencanaan, bentuk partisipasi masyarakat dan faktor pendukung serta faktor penghambat pada perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Akhir kata penulis mengharapkan masukan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.

Malang, Desember 2019  
Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	viii
RINGKASAN .....	xi
SUMMARY .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
2.2 Perencanaan .....	30
2.2.1 Pengertian Perencanaan .....	30
2.2.2 Nilai-Nilai dan Subtansi Perencanaan .....	32
2.2.3 Jenis-Jenis Perencanaan .....	34
2.2.4 Proses dan Tahapan Perencanaan .....	35
2.2.5 Ciri-Ciri Perencanaan Yang Baik .....	39
2.2.6 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Perencanaan .....	42
2.2.7 Perencanaan <i>Top Down</i> dan <i>Bottom Up</i> .....	45
2.2.8 Perencanaan Terdesentralisasi .....	47
2.2.9 Perencanaan Partisipatif .....	50
2.3 Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat .....	54
2.3.1 Pengertian Pariwisata .....	54
2.3.2 Unsur-Unsur Pariwisata .....	56
2.3.3 <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Wisata .....	58
2.3.4 Pariwisata Berbasis Masyarakat .....	63
2.3.5 Pemberdayaan Masyarakat .....	67
2.4 Perencanaan Pengembangan Pariwisata .....	70
2.5 Kerangka Pikir Penelitian .....	76
<b>BAB III. ANALISIS LATAR KONDISI SOSIAL</b> .....	77
3.1 Gambaran Umum Taman Nasional Bromo Tengger Semeru...	77
3.2 Visi dan Misi Organisasi .....	78
3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	80



3.4 Sumber Daya Manusia.....	87
3.5 Potensi Sumber Daya Alam .....	88
3.6 Potensi Flora Fauna .....	90
3.7 Potensi Wisata .....	87
3.8 Gambara Umum Desa Wonokitri .....	91
3.9 Gambaran Umum Desa Ngadisari .....	92
3.10 Karakteristik Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari .....	93
<b>BAB IV. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>95</b>
4.1 Jenis Penelitian .....	95
4.2 Fokus Penelitian .....	96
4.3 Lokasi dan Situs Penelitian .....	97
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	98
4.5 Teknik Pengambilan Data .....	100
4.6 Analisis Data .....	102
4.7 Keabsahan Data .....	104
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>107</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	107
5.1.1 Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis ....	107
5.1.1.1 Mekanisme perencanaan .....	107
5.1.1.2 Identifikasi <i>stakeholders</i> .....	128
5.1.1.3 Rencana program pengembangan wisata .....	133
5.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis .....	141
5.1.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis ....	148
5.1.3.1 Faktor Pendukung.....	148
5.1.3.2 Faktor Penghambat.....	153
5.2 Pembahasan .....	160
5.2.1 Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis ....	160
5.2.1.1 Mekanisme perencanaan .....	160
5.2.1.2 Identifikasi <i>stakeholders</i> .....	175
5.2.1.3 Rencana program pengembangan wisata .....	179
5.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis .....	181
5.2.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis ....	188
5.2.3.1 Faktor Pendukung.....	188
5.2.3.2 Faktor Penghambat.....	194
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>202</b>
6.1 Kesimpulan .....	202
6.2 Saran .....	205
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>207</b>



## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
1.1	Jumlah wisatawan kunjungan wisatawan dalam kurun waktu tahun 2013 - 2018 .....	6
2.1	Matriks Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini .....	24
3.1	Distribusi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Jabatan .....	87
3.2	Distribusi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Jenis Tingkat Pendidikan .....	88
5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019 .....	108
5.2	Desa-Desa Penyangga di Sekitar TNBTS .....	110
5.3	Tim Kerja Role Model Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat di desa Penyangga TNBTS .....	118
5.4	<i>Stakeholders</i> dan Perannya dalam Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat .....	129
5.5	Rencana Program Kegiatan Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat .....	135
5.6	Lokasi Penanaman Bibit Edelweis .....	137



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
2.1	<i>Procedural and Substantive Theory</i> (Faludi, 1973) .....	30
2.2	Pengembangan Berbasis Masyarakat .....	65
2.3	Kerangka Pikir Penelitian.....	76
3.1	Peta Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.....	77
3.2	Struktur Organisasi BBTNBS (2018).....	80
4.1	Analisis Data Model Interaktif .....	103
5.1	Rapat koordinasi Internal Balai Besar TNBS .....	117
5.2	<i>Focus Group Discussion</i> petugas TNBS dengan masyarakat Tengger .....	122
5.3	Wawancara dengan ketua Kelompok Tani Kembang Tana Layu Desa Ngadisari .....	127
5.4	Taman Edelweis di Desa Wonokitri .....	144
5.5	Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger di Desa Ngadisari .....	146



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Hal.</b>
1	Surat Ijin Penelitian dari Balai Besar TNBTS .....	212
2	Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan .....	213
3	Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo .....	214



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sejarah pembangunan di banyak negara telah membuktikan bahwa sektor kepariwisataan memiliki peran penting dalam menyumbang perekonomian dengan menjadikan kepariwisataan sebagai industri hilir untuk memacu pertumbuhan dari kegiatan kegiatan dan penyerapan tenaga kerja (Sunaryo, 2013). Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan sumberdaya alam dan keberagaman sosial budaya yang berlimpah dan telah diakui dunia. Berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Butler (2016) diketahui bahwa Indonesia menempati posisi ketiga di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi setelah Brazil dan Kolombia. Kondisi demkikian menjadikan Indonesia sangat layak dan memiliki prospek yang tinggi untuk dapat dikelola secara bijak salah satunya dalam bidang pariwisata.

Perkembangan dunia pariwisata banyak mengalami perubahan sangat signifikan dari aspek bisnis akomodasi, kuliner, atraksi wisata (Isdarmanto, 2017). Oleh sebab itu, pemanfaatan sektor pariwisata menjadi model dan strategi baru dalam pembangunan ekonomi karena dapat menciptakan mata rantai industry di berbagai sektor seperti barang dan jasa, makanan khas, souvenir, *tour and travel*, serta hotel hingga losmen yang menjadi mata pencaharian potensial masyarakat yang bersinggungan dengan lokasi pariwisata (Antariksa, 2016).

Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) menyebutkan bahwa “pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan yang

didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.” Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya terpadu dan terorganisasi untuk dapat mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu agenda kesepakatan pembangunan global yang berlaku sejak tahun 2016 hingga tahun 2030 sebagai lanjutan upaya dan capaian *Millenium Development Goals* yang telah dinilai telah banyak membawa perubahan global menjadi lebih baik. Prinsip utama yang digunakan yaitu melibatkan seluruh aktor dalam pembangunan dengan memperhatikan dua aspek penting yaitu keadilan prosedural dimana seluruh pihak dapat terlibat dalam proses pembangunan dan keadilan substansial dimana kebijakan dan program pembangunan dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan. *SDGs* sebagai hasil kesepakatan dari negara-negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memiliki tujuh belas tujuan agenda dengan rangkaian target penerapan secara global dan terukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Potensi pariwisata di Indonesia menjadi sektor ekonomi penting dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam serta lingkungan. Data Kementerian Pariwisata tahun 2018 menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia saat ini telah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dan berkontribusi dalam penerimaan devisa negara sebesar 229,50 trilyun rupiah.

Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinikan bahwa “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.” Sedangkan Spillane (1987) mendefinisikan pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan dilakukan perorangan maupun kelompok dengan tujuan untuk mencari keseimbangan/keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Dalam mendukung pembangunan di bidang pariwisata, pemerintah telah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2011-2025 menyatakan bahwa :

“Kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.”

Dijelaskan lebih lanjut kawasan strategis pariwisata nasional terdiri dari delapan puluh delapan kawasan, salah satu diantaranya adalah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selain itu kawasan Bromo Tengger Semeru pada saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh Destinasi Wisata Prioritas atau disebut dengan sepuluh “Bali Baru” dengan harapan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan selanjutnya berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap negara berupa Penghasilan Negara Bukan Pajak dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan salah satu dari lima puluh empat taman nasional di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada sidang *The International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere* ke 27 yang diadakan di Paris pada tanggal 29 Juni 2015 menetapkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai Cagar Biosfer (Kementerian LHK, 2017).

Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mendefinisikan "Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi." Sedangkan Cagar Biosfer didefinisikan "sebagai suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan."

Selain sebagai penyedia sumber daya alam yang menyimpan keanekaragaman hayati berupa flora fauna, kayu dan non kayu serta objek wisata alam, kawasan TNBTS memiliki peranan penting lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Pengelolaan TNBTS sebagai kawasan pelestarian alam diarahkan dalam tiga tujuan pokok antara lain sebagai perlindungan proses ekologis sumber daya hayati penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari dan berkelanjutan.

Fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi peran pemerintah namun peran lembaga konservasi dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya semata mata untuk menjalankan fungsi konservasi dan ekologi namun sekaligus untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wiratno (2018) menyebutkan bahwa masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa.

Kawasan TNBTS memiliki nilai strategis yaitu: (1) Keberadaan ekosistem Laut Pasir; (2) Potensi wisata alam dengan keindahan alam Gunung Bromo dan Gunung Semeru; (3) Potensi air yang menyangga kehidupan masyarakat di 50 desa penyangga di 4 kabupaten; (4) Keberadaan Suku Tengger yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan TNBTS dan (5) TNBTS memiliki nilai strategis internasional dengan ditetapkan sebagai Cagar Biosfer bersama Tahura Raden Suryo (Balai Besar TNBTS, 2018). Nilai nilai strategis tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengelolaan yang dimanifestasikan dalam rencana strategis Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019 dan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan pengelolaan. Disamping itu, pengelolaan dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan TNBTS yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.24/IV-SET/2015 tentang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNBTS Kab. Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2024 dan rencana

jangka pendek (RPJPN) merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka panjang yang menjadi pedoman dan arah pelaksanaan pengelolaan selama jangka waktu satu tahun.

Berbagai potensi yang ada di kawasan TNBTS hingga saat ini telah menjadi daya tarik wisatawan dengan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun relatif mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan di TNBTS dalam kurun waktu enam tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah kunjungan wisatawan dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018

Tahun	Wisatawan	
	Nusantara (orang)	Mancanegara (orang)
2013	545.745	33.387
2014	546.433	23.712
2015	456.995	17.016
2016	454.974	30.701
2017	623.895	23.568
2018	800.130	25.076
Total	3.428.172	153.460

Sumber: Balai Besar TNBTS (2018)

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (*mass tourism*) di kawasan TNBTS memberikan dampak positif diantaranya berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tercatat bahwa PNBP dari kunjungan wisatawan di kawasan TNBTS pada tahun 2018 sebesar Rp 26.179.112.649,- (Balai Besar TNBTS, 2018). Namun disisi lain, salah satu dampak negatif yang tidak bisa dihindari yaitu ancaman kelestarian Edelweis akibat pengambilan di alam secara ilegal oleh oknum masyarakat untuk diperjual belikan sebagai souvenir. Utomo dan Heddy (2018) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tumbuhan edelweis tidak hanya dimanfaatkan untuk souvenir akan tetapi dimanfaatkan juga oleh masyarakat Tengger untuk keperluan ritual adat,

sehingga sedikit banyak pengambilan Edelweis ini akan mengurangi populasinya di alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi menyatakan bahwa Edelweis termasuk dalam daftar jenis tumbuhan dilindungi. Namun demikian ancaman terhadap kelestarian Edelweis di dalam kawasan TNBTS cukup tinggi. Hasil penelitian Utomo dan Heddy (2018) menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngadas mencari bunga Edelweis semakin lama semakin jauh masuk ke dalam kawasan TNBTS dari radius awal satu kilometer menjadi radius dua kilometer dari desa.

Adanya mitos bahwa bunga Edelweis sebagai bunga abadi di kalangan muda mudi mengakibatkan terjadinya pencurian bunga Edelweis secara sembunyi-sembunyi dan penjualan bunga Edelweis oleh masyarakat desa penyangga secara illegal masih terjadi sehingga berakibat pada kerusakan habitat Edelweis (Balai Besar TNBTS, 2018). Sedangkan Liputan6.com (2018) mengemukakan bahwa keberadaan tumbuhan Edelweis terancam akibat oleh perilaku manusia dan mengakibatkan jumlah luasan Edelweis yang ada di dalam kawasan TNBTS berkurang menjadi sekitar 60 persen. Faktor yang menjadi penyebab adalah penggunaan lahan oleh warga sekitar untuk keperluan budidaya sayuran, bunga Edelweis yang dipetik oleh oknum masyarakat sekitar

yang selanjutnya diperdagangkan untuk kebutuhan ekonomi dan oknum pendaki gunung yang memetik bunga Edelweis.

Upaya menjaga kelestarian Edelweis dilakukan Balai Besar TNBTS melalui konservasi secara in situ dan ek situ. Konservasi in situ dilakukan dengan pengembangbiakan di dalam kawasan, yaitu di lokasi Bukit Cinta seluas satu hektar di wilayah kerja Resort Gunung Pananjakan, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan. Sedangkan konservasi ek situ melalui budidaya penangkaran di desa binaan di sekitar kawasan melalui pengembangan wisata desa Edelweis. Konsep ini merupakan salah satu program prioritas (*role model*) Balai Besar TNBTS melalui pemberdayaan masyarakat desa binaan disekitar kawasan, dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor.SK.456/KSDAE/Set/Ren.2/8/2017 tentang arahan *role model* pengembangan wisata desa Edelweis berbasis masyarakat di desa penyangga Balai Besar TNBTS.

Salah satu sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019 yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem ekosistem khas TNBTS (laut pasir, ranu, fungsi lindung kawasan), keanekaragaman hayati yang memiliki nilai konservasi tinggi dan mendukung pelestarian suku Tengger. Oleh karena itu pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar Taman TNBTS bertujuan untuk: 1) meminimalisir adanya aktivitas masyarakat sekitar kawasan dan pengunjung wisata yang tidak bertanggung jawab melakukan pengambilan potensi keanekaragaman hayati, berupa bunga Edelweis secara illegal yang berakibat terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati di dalam kawasan TNBTS, 2) menjaga kelestarian adat budaya

masyarakat Tengger. Balai Besar TNBTS (2018) menjelaskan bahwa masyarakat Tengger memanfaatkan bunga Edelweis sebagai sesaji wajib pada Upacara Adat Tengger, oleh karena itu adat budaya ini yang harus dilestarikan dan sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, 3) meningkatkan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan melalui budidaya Edelweis yang dapat diperjual belikan secara legal, dan 4) membangun destinasi wisata baru di luar kawasan sebagai alternatif bagi wisatawan selain berkunjung ke TNBTS.

Balai Besar TNBTS kemudian melakukan langkah-langkah yang diawali dengan merumuskan perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dengan sasaran yaitu Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Perumusan rencana pengembangan wisata desa Edelweis merupakan perencanaan yang bersifat *top down*. Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan *top down* adalah perencanaan yang dilakukan dari atas ke bawah menurut jenjang pemerintahan, selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis oleh Balai Besar TNBTS menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Pedoman yang digunakan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian ALam. Perumusan rencana pengembangan wisata desa Edelweis dengan konsep pemberdayaan

masyarakat tentu tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis oleh Balai Besar TNBTS merupakan perencanaan *bottom up*. Sebagaimana menurut pendapat Lincoln Arsyad (1999) dalam Nursini (2010) bahwa perencanaan *bottom up* merupakan perencanaan dimana arus informasi dari bawah atau dikenal dengan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*).

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, dikarenakan masyarakat lebih memahami tentang permasalahan dan kebutuhan sehingga dapat menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga hal ini sangat berkaitan erat dengan perencanaan terdesentralisasi. Kumar (2001) mengungkapkan bahwa perencanaan terdesentralisasi merupakan salah satu upaya mengelola persepsi dengan lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat setempat, proses membuat keputusan dengan lebih baik yang berdasarkan pada informasi yang tepat/akurat, bisa memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagai sasaran pembangunan dalam membuat keputusan, untuk pencapaian koordinasi dan integrasi antara berbagai program yang memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya Sunaryo (2013) berpendapat bahwa dalam mewujudkan pengembangan pariwisata agar dapat berjalan dengan baik, maka suatu hal mendasar yang harus dilakukan yaitu memberikan secara luas tentang fasilitasi pelibatan masyarakat setempat. Kemudian Tjokroamidjojo (1995) menyatakan bahwa pelibatan aktif masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perencanaan dan implementasi pembangunan.

Disisi lain, Bahua (2018) berpendapat bahwa dalam perencanaan partisipatif, warga berperan sebagai mitra dalam perencanaan yang ikut bertugas serta secara aktif baik dalam hal pemetaan maupun pelaksanaan rencana, hal ini karena warga merupakan *stakeholder* terbesar dalam pemetaan sebuah produk rencana. Selanjutnya Hadiwijoyo (2018) berpendapat bahwa bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dilakukan dengan pelibatan semua pihak untuk penyelesaian masalah dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan, menciptakan rasa memiliki dan menciptakan aspirasi.

Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis oleh Balai Besar TNBTS bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi Edelweis dari aspek ekologi, ekonomi dan budaya masyarakat Tengger. Sebagaimana diungkapkan oleh Soedibyo (2005) dalam Isdarmanto (2017) bahwa perencanaan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi daerah tujuan wisata sekaligus meminimalisir dampak negatif dari proses dan hasil pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Disisi lain pengembangan pariwisata yang harus berkesinambungan dan terus memberikan sumbangan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan penduduk, serta seterusnya meningkatkan kualitas lingkungan serta melestarikan budaya setempat.

Berbagai penelitian tentang perencanaan pengembangan wisata yang melibatkan partisipasi atau pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil positif. Hasil penelitian Safy'i dan Suwandono (2015) di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata bukan hanya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa tetapi dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan ekonomi

masyarakat dengan menjadikan desa sebagai tujuan wisata namun demi menjaga kelestarian ekosistem mangrove yang ada dan juga pelestarian nilai-nilai budaya religi yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamil *et al* (2015) menunjukkan bahwa ekowisata berbasis *local community* sangat tepat diterapkan di desa Sakti Pulau Nusa Penida Propinsi Bali, dikarenakan ekowisata memberikan fungsi edukasi kepada wisatawan untuk berinteraksi langsung dengan penduduk desa Sakti dan memberikan manfaat secara ekonomi yaitu menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi penduduk Desa Sakti. Hasil penelitian Nurjanah (2018) menunjukkan bahwa rencana strategis untuk pengembangan kawasan wisata yang sekarang menjadi inti ekonomi Kabupaten Bengkalis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di hampir semua kecamatan, yang memiliki karakter dan potensi yang hampir sama, berdasarkan konten lokal di kawasan itu, seperti potensi wisata alam dan budaya. Kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang diperoleh melalui keterlibatan masyarakat sendiri. Selanjutnya hasil penelitian Singgih dan Nirwana (2016) bahwa memberdayakan masyarakat agar bertanggung jawab dan berperan aktif terhadap perencanaan desa wisata dan pengelolaannya, dalam kajian ekonomi menunjukkan adanya potensi yang positif dari pengembangan desa wisata seperti peningkatan pendapatan, distribusi pendapatan yang merata, peningkatan peluang kerja dan kesempatan berusaha.

Namun sejauh ini penerapan rencana pengembangan wisata desa Edelweis belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, yakni dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat

permasalahan pada aspek perencanaan atau aspek implementasinya. Menurut Sugiyono (2009) masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Sedangkan Kartasasmita (1995) mengemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan oleh karena: 1) ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan, 2) ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan, 3) realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan, dan 4) atau memang karena perencanaannya yang keliru.

Faludi (1973) dalam bukunya yang berjudul *Planning Theory* menyatakan sebagai berikut :

*“Two types of theory which currently come under planning theory : procedural and substantive. The latter helps planners to understand whatever their area of concern may be. The former can be seen as planners understanding themselves and the ways in which they operate which, at present, are less clearly seen as problematic.”*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam teori perencanaan terdiri dari dua teori yaitu : 1) teori prosedural (*procedural theory*) dimana perencana dapat memahami dan langkah seperti apa untuk melaksanakannya apa yang telah direncanakan, saat ini dan suatu hal yang tidak sesuai dengan mekanisme dilihat sebagai suatu permasalahan, 2) teori substantif (*substantive theory*) yaitu teori yang dapat membantu perencana untuk memahami apa pun bidang yang menjadi perhatian perencana.

Faludi (1973) menjelaskan lebih lanjut bahwa *substantive theory* atau dalam teori perencanaan dikenal dengan *theory in planning* merupakan teori

perencanaan yang bersifat praktis dan berkaitan dengan perencanaan yang spesifik, sehingga dituntut kreatifitas seorang perencana sesuai dengan empiris yang ada untuk mencapai tujuan. Sedangkan *procedural theory* dalam teori perencanaan disebut sebagai *theory of planning*, yaitu menekankan pada perencanaan yang lebih bersifat umum, perencanaan dianggap sebagai serangkaian prosedur dalam mencapai tujuan dan terdapat urutan logis yang harus diikuti untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang baik. Pada perkembangannya, *theory of planning* dan *theory in planning* tidak harus dipisahkan dari keduanya dikarenakan dua teori tersebut dapat berkolaborasi untuk perencanaan efektif.

Faludi (1973) mengemukakan tentang teori perencanaan rasional, yaitu penggunaan perencanaan tidak hanya bersifat prosedural saja, tetapi dalam suatu perencanaan perlu memperhatikan aspek substansinya. Dengan memperhatikan aspek substansi dalam perencanaan yang disusun oleh perencana maka akan meningkatkan efektifitas dari hasil perencanaan, karena perencanaan prosedural (teknokratis) dan substantif dapat berjalan beriringan. Para perencana pada umumnya secara tidak sadar dalam menyusun perencanaan lebih banyak dipengaruhi yang bersifat teknokratis (*procedural theory*) dan sering mengabaikan perencanaan yang bersifat substantif (*substantive theory*). Kondisi demikian lebih berdampak pada isi perencanaan namun perencanaan tersebut kurang merespon kebutuhan masyarakat yang semestinya. Kemudian di dalam pelaksanaannya kurang mengikutsertakan partisipasi masyarakat. *Substantive theory* dalam penelitian ini adalah ilmu sosial kemasyarakatan, dimana partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya sangat penting dalam pengembangan wisata desa Edelweis di desa penyangga TNBTS.

Berdasarkan uraian permasalahan empiris sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian dari aspek perencanaan yang dilakukan oleh Balai Besar TNBTS dalam pengembangan wisata desa Edelweis.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ?
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Memperhatikan permasalahan yang telah dikemukakan dan dengan memperhatikan fenomena dan empiris maka diharapkan mampu menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan pembangunan bidang kepariwisataan, khususnya upaya pemerintah dalam perencanaan pengembangan wisata di desa penyangga kawasan taman nasional.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi :
  - a) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam upaya konservasi Edelweis.
  - b) Pengelola kawasan konservasi lainnya untuk pengembangan potensi pariwisata beserta masyarakat desa disekitarnya.
  - c) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam rangka pengembangan wisata di daerah, terutama di desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian budaya masyarakat Tengger.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kamil, *et al* (2005) dengan judul Perencanaan Ekowisata Di Desa Sakti Pulau Nusa Penida Provinsi Bali, bertujuan untuk mengetahui potensi ekowisata dan kendala-kendala dalam pengembangan ekowisata di Desa Sakti Pulau Nusa Penida Propinsi Bali. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sebaran potensi dan hambatan serta kondisi eksisting, maka zonasi dapat dibuat dalam empat zonabahwa zonasi yang dapat dibuat menurut kondisi eksisting dan sebaran potensi beserta kendala menjadi empat yaitu yakni: zona inti, zona penyangga, zona pelayanan dan zona konservasi alam. Pembangunan bidang infrastruktur penunjang diantaranya adalah akses menuju potensi wisata, air dan listrik yang dapat digunakan selain wisatawan dapat juga digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan produktivitas penduduk Desa Sakti merupakan salah satu perencanaan dalam pengembangan potensi potensi di desa Sakti untuk tujuan ekowisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Nirwana (2016) dengan judul penelitian yaitu Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Dengan Model *Partisipatory Rural Appraisal* (Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) memiliki tujuan diantaranya yaitu: 1) merumuskan model suatu kawasan desa wisata yang berdasarkan pembangunan wisata berkelanjutan dan berbasiskan masyarakat. 2) mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif

dan memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola desa wisata. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu mempunyai potensi pengembangan desa wisata dengan berbasiskan pada wisata alam dengan potensi yang ada adalah wisata air terjun, *rafting*, *tubing*, *mountain bike*, wisata petik mawar, wisata petik apel dan wisata petik sayur. Sedangkan untuk wisata budaya didukung oleh potensi yang ada dalam masyarakat diantaranya seni tari, seni bantengan dan pencak silat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dampak sosial bersifat negatif diantaranya dalah semakin meningkatkan ketergantungan terhadap masyarakat luar, sikap individualis semakin tinggi dan semakin meningkatnya persoalan sosial. Sedangkan dampak ekonomi cenderung positif diantaranya adalah meningkatkanya pendapatan, pemerataan pendapatan dan meningkatnya peluang dalam pekerjaan dan berusaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Safy'i dan Suwandono (2015) dengan judul penelitiannya Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep *Community Based Tourism* (CBT) Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, memiliki tujuan untuk memberikan saran dalam menyusun strategi dalam mengembangkan dan mengelola desa wisata yang berada di kawasan pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dimana pendekatan yang digunaka adalah melalui pendekatan konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Bedono berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Potensi yang Potensi-potensi wisata alam diantaranya adalah pantai dan ekosistem mangrove. Potensi yang lain adalah makam Syeikh Abdullah Mudzakir. Pemerintah desa sangat mendukung untuk mengembangkan

potensi-potensi tersebut untuk pembentukan desa wisata. Kendala yang dihadapi adalah kondisi sumber daya manusia yang belum siap, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu perlu dibentuk lembaga atau organisasi masyarakat untuk mendukung pariwisata misalnya kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pelibatan masyarakat dalam pembentukan desa wisata memiliki tujuan diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat dan membentuk desa wisata sebagai tujuan wisata sehingga keberlanjutan ekonomi masyarakat dapat terjaga. Selain itu adalah kelestarian ekosistem mangrove nilai-nilai adat budaya dan religi yang ada idalam masyarakat tetap terjaga kelestariannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Colina (2016) dengan judul penelitian Perencanaan Dalam Pengembangan Wisata Daerah Di Kabupaten Katingan, bertujuan untuk : 1) melakukan deskripsi terhadap perencanaan dalam mengembangkan wisata daerah di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan, 2) melakukan deskripsi terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam merencanakan pengembangan wisata daerah dan 3) melakukan deskripsi efektivitas perencanaan dalam pengembangan wisata daerah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) perencanaan pengembangan belum sinergis, dimana pemerintah dan pelaku wisata sinergitasnya masih kurang sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu pihak swasta perlu dilibatkan untuk memaksimalkan pemasaran dan daya dukung. 2) Kondisi sumber daya manusia perencana dan pendanaan menjadi faktor penghambat perencanaan pengembangan wisata daerah di Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. 3) efektifitas perencanaan

pengembangan wisata daerah masih diperlukan perbaikan yang dilihat dari sisi pengelolaan serta sumber daya manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Suryawan (2018) dengan judul penelitian Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Lebih, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar, bertujuan untuk mengetahui perencanaan kawasan wisata di pantai Lebih dalam pengembangan sebagai kawasan wisata pantai prioritas. Penelitian ini penting dilakukan karena kehancuran lingkungan pesisir ini akan terjadi menentukan keberlanjutan pariwisata di Pantai Lebih. Peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan pengembangan kawasan di Pantai Lebih memerlukan beberapa hal, seperti arah area fungsi, arah ruang, rencana fasilitas dan utilitas, rencana transportasi, indikasi program prioritas wilayah, dan rencana pengembangan kegiatan. Oleh karena itu, peserta dari setiap pemangku kepentingan diperlukan untuk perencanaan pembangunan kawasan pariwisata agar berhasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim et al (2018) dengan Judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu bertujuan untuk mendeskripsikan jenis atraksi wisata yang berada di Desa Tulungrejo, melakukan analisis terhadap pelibatan/partisipasi masyarakat Desa, dan melakukan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan dari pengembangan wisata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa atraksi wisata terdiri dari atraksi wisata alam, atraksi wisata sejarah, atraksi wisata agro, atraksi wisata religi, dan atraksi wisata buatan. Sedangkan partisipasi/pelibatan masyarakat terhadap program pengembangan desa wisata dinilai cukup tinggi, dimana sebagian besar masyarakat turut berperan serta dalam aktifitas wisata.

Kesadaran masyarakat sudah ada dan siap ambil bagian dalam persaingan industry wisata. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya adalah partisipasi harta benda dan partisipasi tenaga. Dampak dari pengembangan wisata sangat positif peningkatan ekonomi masyarakat, terbukanya kesempatan pekerjaan dan adanya peningkatan terhadap nilai penjualan buah apel.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2018) dengan judul Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis, bertujuan untuk melakukan analisis terhadap potensi objek wisata dan perencanaan komunikasi untuk pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan melalui model komunikasi interaksional. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, kelompok fokus, dan studi dokumen. Peneliti menyimpulkan bahwa ditemukan rencana strategis yang digunakan untuk pengembangan kawasan wisata Kabupaten Bengkalis. Rencana strategis tersebut memiliki kontribusi pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, dimana hampir semua kecamatan yang berkarakter dan potensi yang hampir samas, sesuai dengan muatan lokal yang ada di kawasan itu diantaranya adalah potensi wisata alam dan budaya. Proses perencanaan komunikasi dilakukan melalui perencanaan komunikasi, perencanaan pesan dan perencanaan media sebagai upaya dalam mengembangkan potensi pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2016) dengan judul Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah (Studi Pelaksanaan Program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan) memiliki tujuan untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap penerapan program pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan serta untuk mengetahui

partisipasi masyarakat dalam implementasi program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana masih mendominasi pada program pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dalam penerapannya masih kurang memperhatikan atraksi wisata, pemasaran masih belum ada inovasi, dampak program pembangunan kelembagaan telah mampu menumbuhkan lembaga-lembaga pariwisata yang ada di masyarakat, namun belum efektif. pelaksanaan program dengan melakukan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di kawasan destinasi wisata utama, pembinaan melalui pelatihan, dan studi banding bertujuan untuk menunjang akselerasi pembangunan pariwisata daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata masih belum memuaskan, tingkatan partisipasi masih dalam tingkatan partisipasi semu.

Penelitian yang dilakukan oleh Agiatama dan Ma'ruf (2018) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Wisata (Studi Kasus Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto) bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata di desa Jembul. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi pemikiran dan harta benda sudah berjalan dengan cukup baik, yaitu berupa kontribusi melalui penyampaian saran dan kritik terhadap pemerintah desa dan masyarakat sudah bergerak dalam memberikan bantuan dalam pengembangan wisata di desa Jembul. Untuk partisipasi tenaga dinilai sebagai partisipasi masyarakat yang paling berhasil, yang dapat diketahui dari kontribusi berupa tenaga dalam perbaikan kawasan wisata serta kuantitas masyarakat yang ikut bergabung pada proses perbaikan kawasan wisata di desa Jembul.. Sedangkan partisipasi masyarakat yang dinilai paling rendah adalah

partisipasi sosial, dimana dapat diketahui dari kurangnya sumber daya manusia dalam berkontribusi pada pemberian plakat plakat di sepanjang jalan kawasan wisata Jembul.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiska et all (2019) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam *Community Based Tourism* Di Desa Wisata Puton Watu Ngelak Kabupaten Bantul bertujuan untuk melakukan kajian terhadap partisipasi masyarakat setempat terhadap pengembangan Desa Wisata Puton Watu Ngelak. Peneliti menyimpulkan bahwa patisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi tenaga yang merupakan partisipasi tertinggi, partisipasi ide/gagasan, dan partisipasi materiil yang merupakan partisipasi terendah dikarenakan masyarakat masih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari hari daripada berpartisipasi materiil dalam aktifitas kegiatan wisata yang berupa harta atau uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) dengan judul Pengelolaan Kawasan Pariwisata (Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pariwisata oleh Bali BesarTaman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata oleh Balai Besar Bromo Tengger Semeru belum maksimal. Dilihat dari sisi perencanaan terdapat ambiguitas antara ekowisata dan mass tourism, dari sisi sumber daya manusia masih terbatas dari segi kuantitas ataupun kualitas, dan keterbatasa anggaran sehingga berpengaruh terhadap implementasi dari rencana yang telah dirumuskan.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

NO.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Metode	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	(Kamil, et al. 2015). Perencanaan Ekowisata Di Desa Sakti Pulau Nusa Penida Provinsi Bali	Kualitatif	Penelitian dilakukan untuk mengetahui potensi potensi ekowisata dan kendala-kendala dalam pengembangan ekowisata di Desa Sakti Pulau Nusa Penida Propinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sebaran potensi dan hambatan serta kondisi eksisting, maka zonasi dapat dibuat dalam empat zona bahwa zonasi yang dapat dibuat menurut kondisi eksisting dan sebaran potensi beserta kendala menjadi empat yaitu yakni: zona inti, zona penyangga, zona pelayanan dan zona konservasi alam. Pembangunan bidang infrastruktur penunjang diantaranya adalah akses menuju potensi wisata, air dan listrik yang dapat digunakan selain wisatawan dapat juga digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan produktivitas penduduk Desa Sakti merupakan salah satu perencanaan dalam pengembangan potensi potensi di desa Sakti untuk tujuan ekowisata	Fokus pada identifikasi potensi ekowisata dan kendala yang dihadapi. Sedangkan penelitian ini fokus pada perencanaan, partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Lokus berbeda
2.	(Singgih dan Nirwana, 2016). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Dengan Model <i>Partisipatory Rural Appraisal</i> (Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)	Kualitatif	Penelitian dilakukan untuk: 1) merumuskan model suatu kawasan desa wisata yang berdasarkan pembangunan wisata berkelanjutan dan berbasiskan masyarakat. 2) mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk dapat berperan serta secara aktif dan memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola desa wisata. Hasil penelitian diketahui bahwa desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu mempunyai potensi pengembangan desa wisata dengan berbasiskan pada wisata alam dengan potensi yang ada adalah wisata air	Fokus pada perumusan model desa wisata dan dampak yang muncul dengan adanya pengembangan desa wisata. Sedangkan penelitian ini fokus pada perencanaan, partisipasi masyarakat, dan faktor yang mempegaruhi perencanaan pengembangan



NO.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Metode	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian ini
			<p>terjun, <i>rafting</i>, <i>tubing</i>, <i>mountain bike</i>, wisata petik mawar, wisata petik apel dan wisata petik sayur. Sedangkan untuk wisata budaya didukung oleh potensi yang ada dalam masyarakat diantaranya seni tari, seni bantengan dan pencak silat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dampak sosial bersifat negatif diantaranya adalah semakin meningkatkan ketergantungan terhadap masyarakat luar, sikap individualis semakin tinggi dan semakin meningkatnya persoalan sosial. Sedangkan dampak ekonomi cenderung positif diantaranya adalah meningkatnya pendapatan, pemerataan pendapatan dan meningkatnya peluang dalam pekerjaan dan berusaha.</p>	<p>wisata desa Edelweis. . Lokus berbeda</p>
3.	<p>(Safy'i dan Suwandono, 2015). Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep <i>Community Based Tourism (CBT)</i> Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak</p>	Kualitatif	<p>Penelitian dilakukan untuk memberikan saran dalam menyusun strategi dalam mengembangkan dan mengelola desa wisata yang berada di kawasan pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bedono berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Kendala yang dihadapi adalah kondisi sumber daya manusia yang belum siap, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia</p>	<p>Fokus pada strategi pengembangan desa wisata dan kendala yang dihadapi desa wisata. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap perencanaan, partisipasi masyarakat, dan faktor pendukung dan penghambatnya. Lokus berbeda</p>
4.	<p>(Colina, 2016). Perencanaan Dalam Pengembangan Wisata Daerah Di Kabupaten Katingan,</p>	Kualitatif	<p>Penelitian dilakukan untuk: 1) melakukan deskripsi terhadap perencanaan dalam mengembangkan wisata daerah di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan, 2) melakukan deskripsi terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam</p>	<p>Fokus sama namun penelitian ini tidak meneliti tentang efektifitas perencanaan. lokus berbeda</p>

NO.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Metode	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian ini
			merencanakan pengembangan wisata daerah dan 3) melakukan deskripsi efektivitas perencanaan dalam pengembangan wisata daerah. Hasil penelitian: 1) perencanaan pengembangan belum sinergis, dimana pemerintah dan pelaku wisata sinergitasnya masih kurang sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu pihak swasta perlu dilibatkan untuk memaksimalkan pemasaran dan daya dukung. 2) Kondisi sumber daya manusia perencana dan pendanaan menjadi faktor penghambat perencanaan pengembangan wisata daerah di Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. 3) efektifitas perencanaan pengembagn wisata daerah masih diperlukan perbaikan yang dilihat dari sisi pengelolaan serta sumber daya manusia.	
5.	(Ariani dan Suryawan 2018). Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Lebih, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar	Kualitatif	Penelitian dilakukan untuk mengetahui perencanaan kawasan wisata di pantai Lebih dalam pengembangan sebagai kawasan wisata pantai prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan kawasan di Pantai Lebih memerlukan beberapa hal, seperti arah area fungsi, arah ruang, rencana fasilitas dan utilitas, rencana transportasi, indikasi program prioritas wilayah, dan rencana pengembangan kegiatan.	Fokus perencanaan pengembangan prioritas pariwisata. Sedangkan penelitian ini fokus pada perencanaan, partisipasi masyarakat, dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Lokus berbeda.
6.	(Hakim et al, 2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata serta Dampaknya	Kualitatif	Beberapa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah ada dan siap ambil bagian dalam persaingan industry wisata. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya adalah partisipasi harta benda dan partisipasi	Fokus pada atraksi wisata, dan dampak yang ditimbulkan dari pengembangan wisata. Sedangkan

NO.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Metode	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu		tenaga. Dampak dari pengembangan wisata sangat positif peningkatan ekonomi masyarakat, terbukanya kesempatan pekerjaa dan adanya peningkatan terhadap nilai penjualan buah apel.	penelitian ini fokus pada perencanaan, partisipasi masyarakat , dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Lokus berbeda.
7.	(Nurjanah, 2018). Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis,	Kualitatif	Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap potensi objek wisata dan perencanaan komunikasi untuk pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian diketahui bahwa ditemukan rencana strategis yang digunakan untuk pengembangan kawasan wisata Kabupaten Bengkalis. Rencana strategis tersebut memiliki kontribusi pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, dimana hampir semua kecamatan yang berkarakter dan potensi yang hampir samas, sesuai dengan muatan lokal yang ada di kawasan itu diantaranya adalah potensi wisata alam dan budaya. Proses perencanaan komunikasi dilakukan melalui perencanaan komunikasi, perencanaan pesan dan perencanaan media sebagai upaya dalam mengembangkan potensi pariwisata	Fokus pada identifikasi potensi dan perencanaan komunikasi Sedangkan penelitian ini fokus pada perencanaan , partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Lokus berbeda.
8.	(Susanto, 2016). Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah (Studi Pelaksanaan	Kualitatif	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi program pembangunan pariwisata yang dilaksanakan di daerah dilihat dari aspek	Fokus pada identifikasi program pembangunan wisata. Sedangkan

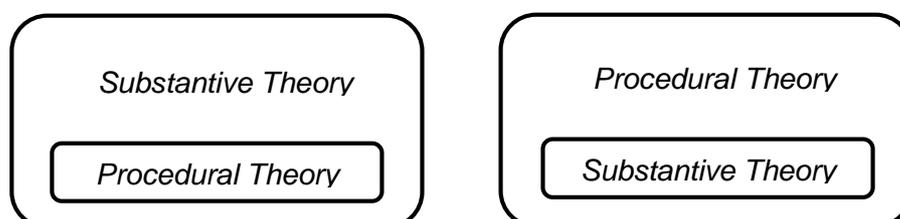
NO.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Metode	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan)		pembangunan destinasi, pemasaran dan pembangunan kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program pengembangan destinasi masih didominasi pembangunan sarana dan prasarana, kurang memperhatikan pembangunan atraksi secara berkelanjutan, pembangunan pemasaran masih terjebak pada rutinitas tahunan belum mengacu pada model pemasaran modern, pelaksanaan program dengan melakukan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di kawasan destinasi wisata utama, pembinaan melalui pelatihan, dan studi banding bertujuan untuk menunjang akselerasi pembangunan pariwisata daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata masih belum memuaskan, tingkatan partisipasi masih dalam tingkatan partisipasi semu.	penelitian ini fokus pada perencanaan, partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Lokus berbeda.
9.	(Agiatama dan Ma'ruf, 2018) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Wisata (Studi Kasus Desa Jembul, kecamatan Jatirejo, kabupaten Mojokerto)	Deskriptif Kualitatif	Kesimpulan penelitian yaitu bentuk partisipasi pemikiran dan harta benda sudah berjalan dengan cukup baik, berupa kontribusi melalui penyampaian saran dan kritik terhadap pemerintah desa dan masyarakat sudah bergerak memberikan bantuan dalam pengembangan wisata. Partisipasi tenaga dinilai paling berhasil, yaitu berupa tenaga dalam perbaikan kawasan wisata serta kuantitas masyarakat yang ikut bergabung pada proses perbaikan kawasan wisata. Sedangkan partisipasi masyarakat yang dinilai paling rendah adalah partisipasi sosial, yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam berkontribusi pada pemberian plakat plakat	Fokus sama yaitu pada partisipasi masyarakat Sedangkan penelitian ini fokus pada perencanaan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Lokus berbeda.

NO.	Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Metode	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian ini
			di kawasan wisata Jembul.	
10.	(Kiska et al, 2019). Partisipasi Masyarakat Dalam <i>Community Based Tourism</i> Di Desa Wisata Puton Watu Ngelak Kabupaten Bantul	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi tenaga yang merupakan partisipasi tertinggi, partisipasi ide/gagasan, dan partisipasi materiil yang merupakan partisipasi terendah dikarenakan masyarakat masih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari hari daripada berpartisipasi materiil dalam aktifitas kegiatan wisata yang berupa harta atau uang.	Fokus sama yaitu partisipasi masyarakat, namun terdapat perbedaan pada penelitian ini selain fokus pada partisipasi masyarakat, tetapi juga fokus pada perencanaan dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Lokus berbeda.
11.	(Utami, 2017) dengan judul Pengelolaan Kawasan Pariwisata (Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)	Kualitatif	Hasil penelitian terlihat bahwa pengelolaan pariwisata oleh Balai Besar Bromo Tengger Semeru belum maksimal. Dilihat dari sisi perencanaan terdapat ambiguitas antara ekowisata dan mass tourism, dari sisi sumber daya manusia masih terbatas dari segi kuantitas ataupun kualitas, dan keterbatasan anggaran sehingga berpengaruh terhadap implementasi dari rencana yang telah dirumuskan.	Focus pada perencanaan, sumberdaya manusia dan anggaran pada pengelolaan pariwisata kawasan Bromo Tengger. Sedangkan penelitian ini fokus pada perencanaan, partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis Semeru. Lokus sama

## 2.2 Perencanaan

### 2.2.1 Pengertian Perencanaan

Faludi (1973) mengemukakan bahwa ada dua teori perencanaan yaitu *Procedural Theory* atau dikenal dengan *Theory of Planning* dan *Substantive Theory* atau dikenal dengan *Theory in Planning*. Pemahaman terhadap kedua teori terdapat perbedaan yang mendasar dalam sebuah perencanaan. *Procedural theory* lebih bersifat pada keilmuan yaitu mengembangkan teori yang bersifat umum, perencanaan dianggap sebagai serangkaian prosedur untuk mencapai tujuan dan terdapat urutan logis yang harus diikuti untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang baik. Sedangkan *substantive theory* lebih mengarah kepada pemahaman terhadap konsep dan metode yang sesuai yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pada teori ini terdapat penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain selanjutnya memberikan fleksibilitas dalam merumuskan permasalahan dan cara penyelesaian permasalahan tersebut sehingga lebih bersifat praktis. Namun dalam pelaksanaannya, kedua teori ini sebaiknya tidak dipisahkan namun dapat berkolaborasi untuk perencanaan efektif.



Gambar 2.1. *Procedural and Substantive Theory (Faludi, 1973)*

*Procedural Theory* atau dikenal dengan *Theory of Planning* pada pelaksanaannya selalu mendapat kritik karena dipandang lebih kaku, hal ini

disebabkan oleh adanya serangkaian tahapan atau prosedur yang sudah ada dalam penyusunan rencana. Namun bagi perencana yang bersifat pragmatis akan lebih cepat dalam penyesuaian terhadap model perencanaan ini. Sebaliknya *Substantive Theory* atau *Theory in Planning* dipandang lebih fleksibel dimana perencana dapat menentukan substansi apa yang perlu diketahui dan mencari konsep dan metode yang tepat untuk menemukan solusi dalam mencapai tujuan.

Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi (Muhammad, 2017). Perencanaan menurut Dror dalam Hadi (2005) merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan masa depan. Sedangkan menurut Fridman dalam Hadi (2005), perencanaan merupakan suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi. Dari beberapa definisi tersebut jelas bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang diterapkan untuk organisasi publik maupun privat.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengutip dari beberapa para ahli tentang pengertian perencanaan antara lain:

- 1) Harold Koontz dan Cyril O'Donnell menyatakan; "*Planning is the function of a manager which involves the selections from alternatif of objectives, policies, procedures and programs.*" Artinya perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada.
- 2) George R. Terry menyatakan, "*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the achieve desired result.*" Artinya, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan

fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi- asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- 3) Y. Dror mengungkapkan perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.
- 4) Diana Conyers dan Peter Hills mengemukakan, "*Planning is a continuous process which involves decisions, or choice, about alternative ways of using available resources, with the aim of achieving particular goal at some time in the future*",. Artinya perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien dengan sumber daya yang tersedia (Sjafrizal, 2016). Sedangkan menurut Kartasasmita (1995) bahwa perencanaan ada dasarnya sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan, biasanya dari sejumlah pilihan, untuk dilaksanakan dimasa depan guna mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Anggara dan Sumantri (2016) mengemukakan bahwa fungsi perencanaan akan menentukan fungsi-fungsi manajemen selanjutnya, sehingga tanpa perencanaan maka fungsi manajemen lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

### 2.2.2 Nilai-Nilai dan Substansi Perencanaan

Abe (2005) mengemukakan bahwa substansi penting untuk mengetahui tentang keberhasilan dan kegagalan perencanaan daerah meliputi nilai-nilai dan prioritas guna mencapai tujuan-tujuan perencanaan yang mana memerlukan motivasi individu dan sosial manusia. Nilai-nilai baku dalam kegiatan perencanaan pada dasarnya adalah rasionalitas pasar dan rasionalitas sosial

politik yang mempengaruhi proses dan tindakan perencanaan. Turunan dari keduanya adalah nilai-nilai yaitu transparan, akuntabel, keadilan dan partisipatif atau demokratis.

Perencanaan transparan dicirikan dengan adanya proses perencanaan yang mudah dimengerti, dimana informasi tentang produk dari informasi kebijakan dan input teknikal tersedia, aksesnya terbuka dan para pelaku kepentingan maka dapat diketahui peran apa yang diambil dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perencanaan akuntabel memiliki ciri-ciri diantaranya adalah dapat dipertanggungjawabkan dan sah diterima masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, efisien dalam penggunaan sumber daya, efektif dalam penyelesaian masalah, adanya keleluasaan dan kemudahan dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Perencanaan yang berkeadilan memiliki ciri-ciri diantaranya adalah mampu melihat keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat luas atau berpihak kepada masyarakat yang kelemahan dalam akses dan kemampuannya untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan. Perencanaan partisipatif atau demokratis memiliki ciri yang dapat dilihat bahwa perencanaan mengadopsi prinsip interaksi, kesetaraan dan kooperatif dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama dengan mempertimbangkan semua aspirasi para perilaku yang mempunyai kepentingan dan untuk kepentingan masyarakat luas. Substansi perencanaan strategik dan perencanaan teknikal atau operasional pada hakekatnya berkaitan dengan sistem perencanaan makro dan mikro maupun berkaitan dengan siklus manajemen publik dan siklus manajemen program/kegiatan.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Perencanaan

Perencanaan menurut Lincolin Arsyad (1999) dalam Nursini (2010) membagi perencanaan pada beberapa dimensi yaitu:

- 1) Perencanaan berdasarkan jangka waktu.

Jika dikaji jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu, terdapat tiga jenis perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang yaitu perencanaan yang biasanya berjangka waktu 10-25 tahun.

- 2) Perencanaan berdasarkan sifat perencanaan. Ada dua jenis perencanaan berdasarkan sifat yaitu perencanaan komando (*planning by direction*), dan perencanaan dengan ransangan (*planning by inducement*).

- 3) Perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya.

Berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik.

- 4) Perencanaan berdasarkan tingkat keluwesan.

Ada dua jenis perencanaan jika ditinjau berdasarkan tingkat keluwesan yaitu perencanaan indikatif dan perencanaan imperative. Perencanaan indikatif atau sering disebut sebagai perencanaan lunak adalah salah satu jenis perencanaan yang ditentukan secara bersama-sama oleh pelaku pembangunan, Swasta dan Pemerintah. Sedangkan perencanaan imperative atau perencanaan menyeluruh adalah perencanaan yang biasanya diterapkan di Negara kapitalis dimana Negara adalah penentu segala-galanya.

- 5) Perencanaan Berdasarkan Sistem Ekonomi.

Dalam kaitan ini perencanaan dibagi atas tiga yaitu perencanaan dalam

perekonomian kapitalis, perencanaan dalam perekonomian sosialis dan perencanaan dalam perekonomian campuran.

- 6) Perencanaan berdasarkan cara pelaksanaan (arus informasi). Perencanaan disini dikenal ada dua arus informasi yaitu perencanaan yang berdasarkan pada arus informasi dari bawah atau dikenal dengan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*), dan perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*).

#### 2.2.4 Proses dan Tahapan Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu faktor yang sangat krusial sebagai penentu keberhasilan suatu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan menjadi hal mendasar yang harus dikuasai oleh perencana untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Menurut Wahyudi (2006) proses perencanaan pembangunan daerah merupakan:

- 1) proses politik, yaitu dalam suatu pemilihan langsung suatu kepala daerah maka selanjutnya akan membuahkan hasil berupa rencana pembangunan sebagai produk dari proses politik, dalam hal ini lebih eksplisit dijabarkan pada visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah.
- 2) proses teknokratik, yaitu dalam suatu proses perencanaan pembangunan dimana peran perencana sangat diperlukan, atau dapat dilakukan oleh instansi yang berfungsi di bidang perencanaan.
- 3) proses partisipatif, yaitu Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

- 4) proses perencanaan *top-down* dan perencanaan *bottom up*, dimana perencanaan yang aliran prosesnya berlangsung dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan menurut Tjokroamidjojo (1995) sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana, terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Tinjauan keadaan, dapat berupa tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana (*review before take-off*) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*)
- 2) Perkiraan keadaan yang akan datang dilalui rencana. Sering juga disebut *forecasting*.
- 3) Penetapan tujuan rencana (*plan objective*) dan pemilahan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.
- 4) Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Untuk bisa lebih operasionalnya kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasarkan pemilihan alternatifnya yang terbaik. Hal ini berdasar *opportunity cost* dan skala prioritas.
- 5) Persetujuan rencana dimanifestasikan ke bentuk pengambilan keputusan.

b. Penyusunan Program Rencana

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-programnya. Seringkali

tahap ini perlu dibantu dengan penyusunan suatu *flowchart*, *operation plan* dan *network plan*.

c. Pelaksanaan rencana.

Tahap ini adalah tahap untuk melaksanakan rencana dan diperlukan pertimbangan terhadap kegiatan pemeliharaan. Kebijakan-kebijaksanaan pun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

d. Pengawasan atau pelaksanaan rencana.

Tujuan daripada pengawasan adalah mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dari apa sebabnya, dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

e. Evaluasi.

Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent review*. Dari hasil-hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan itu sendiri.

Selanjutnya menurut “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 8 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, terdiri dari empat tahapan yakni:

a. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu:

- 1) penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur,
- 2) masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan,
- 3) melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan
- 4) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

b. Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh

pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.”

### 2.2.5 Ciri-ciri Perencanaan Yang Baik

Perencanaan menjadi hal yang krusial dalam suatu pembangunan. Menurut Sjafrizal (2016) bahwa ciri-ciri perencanaan yang baik sehingga dapat dijadikan acuan bagi perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan meliputi delapan aspek dengan rincian sebagai berikut :

1) Tersusun Secara Lengkap Termasuk Sektor Swasta

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah perencanaan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya mencakup sector pemerintah tetapi juga meliputi sector swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian khusus untuk sector swasta perencanaan yang diperlukan tidak secara langsung seperti halnya sector pemerintah karena kegiatan tidak dibiayai dengan dana publik.

2) Memasukkan Evaluasi Perekonomian Masa Lalu

Hal ini sangat penting karena pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang berarti pembangunan yang direncanakan sangat ditentukan juga oleh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di masa lalu. Permasalahan dan kendala pokok perlu diungkapkan secara rinci dan jelas serta diperlukan analisis terhadap berbagai isu pembangunan dan lingkungan strategis yang mempengaruhi pola pembangunan dimasa mendatang.

3) Merinci Tujuan dan Prioritas Pembangunan

Penetapan dan analisis harus jelas dan kongkret tentang tujuan pembangunan yang ingin dicapai, karena tujuan pembangunan bersifat prinsip dan sangat mendasar dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

4) Menerjemahkan Tujuan ke Dalam Target Pembangunan

Perencanaan yang baik harus terarah dan terukur sehingga sasaran pembangunan menjadi jelas dan dapat dimonitor dan dievaluasi dikemudian hari untuk mengetahui tingkat pencapaian yang dihasilkan. Hal ini dapat

diartikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam berbagai target pembangunan.

5) Strategi dan Kebijakan Bersifat Spesifik

Strategi dan kebijakan dirumuskan secara spesifik sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi, sehingga akan mendorong proses pembangunan secara lebih baik.

6) Berisikan Perencanaan Kebutuhan Investasi

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua aspek yang saling berkaitan, oleh karena itu perlu disiapkan dengan baik yang memuat jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian akan terdapat keterpaduan antara perencanaan, pemrograman dan anggaran (*planning, program dan budgeting*)

7) Memuat Proyeksi Selama Periode Perencanaan

Perencanaan yang baik jika didalamnya terdapat perkiraan (proyeksi) masa dating yang dapat berfungsi sebagai sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif. Namun jika tidak memungkinkan secara kuantitatif maka dapat ditentukan secara kualitatif selama jelas dan kongkret.

8) Mempunyai Kaitan Yang Jelas Dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

Perencanaan disiapkan dengan baik dengan mengaitkan hubungan antara perencanaan dokumen yang satu dengan yang lain dengan jelas. Keterkaitan tersebut tidak berarti sama, namun tidak bertentangan dan bahkan saling mendukung satu sama lainnya.

### 2.2.6 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Perencanaan

Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan antara lain meliputi:

#### 1) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan bisa berasal dari dua faktor meliputi faktor dari luar (eksternal), yaitu faktor yang berasal dari wilayah tetangga atau berasal dari dampak global yang selanjutnya berkembang dalam lingkup nasional atau internasional. Sedangkan faktor dari dalam (internal), yaitu dampak yang berasal dari ranah perencanaan itu sendiri. Unsur yang berada dalam faktor lingkungan ini dapat dibagi kedalam empat bidang yaitu:

- ✓ bidang sosial, perencanaan pembangunan di negara berkembang sebagian besar ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bisa menjadi subjek pembangunan atau menjadi objek dalam pembangunan. Kondisi sosial masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keberhasilan suatu program perencanaan pembangunan daerah.
- ✓ bidang budaya, budaya dalam masing masing masyarakat berbeda beda, namun memberikan peran dalam perencanaan pembangunan daerah. Budaya dan kultur masyarakat menjadi salah satu faktor penting dan perlu diperhatikan oleh perencana pembangunan agar dapat mencapai tujuan pembangunan seperti yang diharapkan.
- ✓ bidang ekonomi, faktor ekonomi memiliki determinan tinggi dalam suatu proses pembangunan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di

negara negara berkembang menempatkan pembangunan ekonomi pada prioritas tinggi. Dengan anggapan bahwa dengan mengejar pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan.

- ✓ bidang politik, proses pembangunan dipandang dapat dipengaruhi oleh faktor politik disamping faktor faktor lainnya. Para ahli politik memandang keterkaitan tersebut terlihat dari ideologi yang dianut dalam suatu negara, karena ideologi tersebut akan mempengaruhi pola, sistem dan kultur yang diimplementasikan dalam pembangunan.

## 2) Faktor Sumber Daya Manusia Perencana

Perencanaan pembangunan yang bersifat *top-down* dan *bottom-up* memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia menjadi faktor utama sebagai “motor” penggerak dalam suatu proses perencanaan pembangunan. Begitu pula dengan proses perencanaan pembangunan daerah, perencana selaku sumber daya manusia perencana merupakan faktor utama yang menggerakkan pelaksanaan perencanaan. Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah seorang perencana bertugas mengatur proses perencanaan di tingkat daerah. Besarnya pengaruh SDM perencana ini memang tergantung pada kualifikasi SDM perencana tersebut. Kemampuan teknik saja belum mencukupi, melainkan harus ditunjang dengan kemampuan-kemampuan lain yang lebih bersifat intersektoral, multidisipliner dan berpikir komprehensif (tidak parsial/terkotak-kotak).

## 3) Faktor sistem yang digunakan.

Yang dimaksud dengan sistem perencanaan di sini adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah/wilayah tertentu

sebagai dasar/landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan, Hal itu bisa menyangkut masalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan dan sebagainya.

#### 4) Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Dalam hal ini, penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dapat dilihat dari segi peralatan yang digunakan saja, tetapi juga berbagai teknik dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan tidak dapat disamakan atau diseragamkan. Artinya hal itu tergantung pada apa yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu digunakan. Namun yang terpenting dari semua ini adalah sampai sejauh mana sumber daya manusia perencanaannya mampu mengimprovisasi perkembangan secara optimal.

#### 5) Faktor Pendanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan, hal ini harus benar-benar diperhatikan sebagai suatu hal yang cukup penting. Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang “mahal”. Karena itu, pelaksanaannya harus benarbenar serius dalam arti pihak-pihak yang terkait harus fokus terhadap tugasnya, punya komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai dan harus bekerja keras, teliti serta tidak terburu-buru dalam penyusunannya. Selain itu, dalam perencanaan pembangunan daerah harus sudah diperhitungkan masalah pendanaannya. Jumlah anggaran yang dibutuhkan perlu diperhitungkan dari mana sumber pendanaannya dan bagaimana sistem pengelolaannya. Tentunya tidak diharapkan adanya hasil perencanaan pembangunan daerah yang tidak bisa diimplementasikan karena tidak disiapkan atau kurang diperhitungkan dukungan dananya.

### 2.2.7 Perencanaan *Top-down* dan *Bottom Up*

Suatu perencanaan terdapat dua bentuk model perencanaan berupa: 1) perencanaan yang ditentukan langsung oleh pusat, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana konsep, dan 2) perencanaan yang merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat setempat melalui diskusi jalur mekanisme formal dan non formal. Oleh karena setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang unik dan tidak selalu identik dengan daerah lain, maka perencanaan pembangunan daerah perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain dalam konteks pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dua model perencanaan tersebut membentuk suatu hubungan dua arah yaitu melalui *top-down* dan *bottom-up*. Pada prosedur *bottom-up*, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan oleh pemerintah lokal dengan memperhatikan aspirasi lokal setempat. Sedangkan prosedur *top-down*, perencanaan nasional menyediakan kerangka untuk kegiatan pembangunan nasional. Kegiatan diformulasikan secara lebih detail dengan menyediakan kerangka untuk rencana sektoral dan rencana daerah. Dalam kenyatannya, kedua prosedur ini sangat penting. Untuk menyempurnakan hasil perencanaan yang telah disusun antara *top-down* dan *bottom-up* maka komunikasi dua arah menjadi sangat berperan.

Perencanaan *top-down* berfungsi untuk menegaskan bahwa di beberapa daerah akan mempunyai proses pembangunan yang menunjang kepentingan nasional untuk waktu tertentu. Sedangkan perencanaan *bottom-up* menegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi dari wilayah (lokal) yang ada. Pada perencanaan *bottom-up* secara komparatif memastikan adanya sumberdaya dan keikutsertaan masyarakat lokal dalam

bentuk partisipasi. Namun pada sisi lain perencanaan *top-down* juga harus ada. Adanya keterbatasan dana maka, diperlukan pembagian dana dari pusat untuk semua daerah dan sektor dalam kerangka nasional untuk mencapai tujuan pembangunan.

Disamping itu, pemikiran-pemikiran yang mengedepankan pentingnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan menuntut adanya pergeseran peran pemerintah dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai dasar bagi upaya pencarian model perencanaan pembangunan yang ideal. Korten dan Klaus dalam Riyadi dan Bratakusuma (2004) menawarkan pendekatan tentang konsep pembangunan yang dinamakan dengan *people centered development* atau pembangunan bagi kepentingan rakyat sebagai pengganti sistem *top down approach*. Dalam menjalankan menjalankan model tersebut perlu didukung oleh empat aspek, yaitu *capacity* (kemampuan untuk melaksanakan proses pembangunan), *equity* (pemerataan hasil-hasilnya) *empowerment* (pemberdayaan masyarakat untuk melakukan hal-hal yang dianggap penting), dan *sustainable* (berlangsung terus-menerus/berkesinambungan).

Barret and Fudge dalam Bogason (2001 ) menyatakan bahwa perspektif *top-down* dalam memahami proses perencanaan adalah mengabaikan proses negosiasi dan meniadakan pemahaman adanya kemungkinan badan pelaksana kebijakan merespon tujuan yang telah ditentukan untuk disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal. Dengan demikian perspektif ini sangat menghindari perbedaan/pertentangan, cenderung mengabaikan peranan aktor-aktor lain di

luar top organisasi, yang pada akhirnya tidak memberikan peluang terhadap perubahan.

Disisi lain, perspektif *bottom-up* muncul, dimana perencanaan tidak lagi diciptakan oleh sebuah organisasi formal yang berwenang, melainkan harus dikombinasikan dengan beberapa organisasi formal lainnya serta dalam waktu yang bersamaan juga memperhatikan peran para aktor individu, dalam arti suatu proses perencanaan harus mempertimbangkan kemajemukan masyarakat dengan segala perbedaan yang dimilikinya.

Abe (2005) mengungkapkan bahwa prosedur *top-down* dan *bottom-up* tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah dapat terbagi dalam dua bentuk. Kedua bentuk tersebut adalah perencanaan yang merupakan implementasi atas penjabaran dari perencanaan pusat dan perencanaan daerah untuk merumuskan kepentingan lokal berdasarkan pada misi dan visi. Selanjutnya menurut kuncoro (2004) bahwa sistem perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan *top down planning* dan *bottom up planning* akan menjamin adanya keseimbangan–keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **2.2.8 Perencanaan Terdesentralisasi**

Kumar (2001) mendefinisikan perencanaan terdesentralisasi merupakan salah satu upaya mengelola persepsi dengan lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat setempat, proses membuat keputusan dengan lebih baik yang berdasarkan pada informasi yang tepat/akurat, bisa memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagai sasaran pembangunan dalam

membuat keputusan, untuk pencapaian koordinasi dan integrasi antara berbagai program yang memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan menurut Menurut Maddick dalam Kuncoro (2004), desentralisasi didefinisikan sebagai suatu proses devolusi dan dekonsentrasi. Devolusi merupakan pendelegasian kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah. Sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pendelegasian kewenangan-kewenangan tertentu kepada staf pemerintah yang berada/tinggal di luar kantor pusat.

Konsep desentralisasi muncul sebagai akibat dari adanya kelemahan-kelemahan pada perencanaan terpusat, hal ini sebagaimana menurut pendapat Abe (2005), bahwa kelemahan-kelemahan yang terjadi jika perencanaan dilakukan secara terpusat diantaranya adalah:

1. Perencanaan terpusat pada dasarnya memerlukan pengendalian yang tinggi
2. Pada perencanaan terpusat biasanya terdapat aspek politis yang tinggi
3. Cepatnya perubahan situasi dalam kurun waktu tertentu sehingga berpengaruh terhadap perencanaan yang telah disusun.
4. Adanya pengalaman dari berbagai Negara yang menganut system sentralistik, membuktikan adanya ketidakmampuan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dan keterbekangan.

Dalam pengertian yang lebih luas, langkah menuju perencanaan desentralisasi menurut Kumar (2001) merupakan reaksi terhadap aspek prosedural perencanaan terpusat saat ini diantaranya yaitu :

1. Pemahaman terhadap teori dan penerapannya pada tingkat nasional oleh komisi perencanaan yang memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan

proses perencanaan, termasuk perumusan rencana nasional dan pengeluaran rencana Negara.

2. Penentuan kewenangan terhadap sektor publik dan swasta dalam kaitannya dengan tujuan yang sesuai dari pertumbuhan abad ini.
3. Suatu prosedur yang diikuti untuk membahas strategi, prioritas, pengeluaran (baik rencana pusat dan negara) pembiayaan dan implementasi.
4. Persetujuan pengeluaran sektoral dari rencana negara oleh komisi perencanaan hingga pembangunan terakhir yang tidak signifikan.
5. Pengeanaan sektor pusat dan skema yang disponsori pusat tanpa adanya diskusi apa pun pada pertemuan kelompok kerja dengan tim negara.

Kumar (2001) menjelaskan lebih lanjut bahwa pendekatan pada perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi masih dalam tahap normatif. Hubungan prioritas nasional dan prioritas daerah terkadang tidak ada kesesuaian, tergantung pada pencapaian tingkat pembangunan dan perbedaan permasalahan yang dihadapi di tiap daerah. Apabila di tingkat daerah mengesampingkan prioritas nasional maka akan mengancam kelangsungan hidup dan keutuhan dalam bernegara. Hal ini disebabkan oleh adanya kehilangan hak layanan kebutuhan dasar dan jaminan terhadap perlindungan negara kepada warga

Kelebihan desentralisasi jika dibandingkan dengan perencanaan terpusat menurut Abe (2005) adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengurangi beban pemerintah pusat.
2. Program dan rencana pembangunan lebih realistis, lebih tepat sasaran dan lebih dekat dengan kebutuhan lokal.

3. Memberikan peluang kesempatan kepada pemerintah daerah untuk belajar mengelola rumah tangga sendiri dengan menjaring dan merumuskan aspirasi kebutuhan masyarakat.
4. Terbukanya peluang masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Abe (2005) bahwa dari kelebihan desentralisasi terdapat sisi-sisi negatif, diantaranya:

1. Terdapat potensi konflik antar daerah sebagai akibat dari konflik antar sumber daya.
2. Munculnya kesenjangan antar daerah.
3. Berkembangnya ketidakadilan lokal dan munculnya "raja-raja kecil" di daerah.

Dari beberapa uraian diatas terlihat bahwa jika desentralisasi dilaksanakan dengan baik dan meminimalisir sisi negatif tersebut, maka tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Kumar (2001) mengungkapkan bahwa tujuan perencanaan pembangunan terdesentralisasi memiliki empat tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya peningkatan produktivitas dengan menggunakan sumber daya lokal secara efisien.
2. Membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
3. Upaya untuk menghapus tingkat kemiskinan dan meningkatkan kehidupan masyarakat.
4. Memperoleh profit dari pembangunan antara masyarakat dengan daerahnya.

### **2.2.9 Perencanaan Partisipatif**

Dewasa ini, pelibatan *stakeholders* dalam suatu proses perencanaan semakin meningkat. Tjokroamidjojo (1995) menyatakan bahwa pelibatan aktif

masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perencanaan dan implementasi pembangunan. Menurut Hadiwijoyo (2018) bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dilakukan dengan pelibatan semua pihak untuk penyelesaian masalah dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan, menciptakan ras memiliki dan menciptakan aspirasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip pelibatan masyarakat secara langsung hanya dapat dicapai jika masyarakat berperan serta dan ambil bagian dimulai dari sejak awal, proses dan pada tahap perumusan hasil. Sehingga adanya keterlibatan masyarakat tersebut bisa menjadi jaminan untuk suatu proses telah berjalan dengan baik dan benar.

Samsura (2003) dalam Hadiwijoyo (2018) menyebutkan bahwa perencanaan partisipatif memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Adanya pelibatan seluruh *stakeholders*
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang legitimate dan kuat
3. Adanya proses politik melalui negosiasi yang selanjutnya ditujukan untuk pembuatan kesepakatan bersama
4. Adanya pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran secara kolektif, sebagai bagian dari proses demokratisasi

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan, dikarenakan masyarakat lebih memahami tentang permasalahan dan kebutuhan sehingga dapat menentukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Kumar (2001) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan instrument penting dalam proses merumuskan rencana dan penerapannya. Dalam siklus perencanaan, partisipasi masyarakat tidak dibatasi hanya dalam hal perencanaan. Keterlibatan masyarakat harus ada dalam tahap

pra perencanaan, tahap merumuskan rencana, pada tahap implementasi dan terakhir adalah pada tahap evaluasi.

Sedangkan Islamy (2001) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses perencanaan pembangunan dengan alasan:

1. Sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk membuat keputusan untuk solusi persoalan di kehidupan mereka dan untuk meminimalisir jarak pemerintah dengan rakyat.
2. Memberikan edukasi politik sebagai landasan demokrasi selanjutnya masyarakat akan terampil untuk merumuskan kebutuhan dan kepentingan prioritas.
3. Dampak dari adanya partisipasi masyarakat bisa memperkuat kebersamaan masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Menurut Huraerah (2008) bahwa bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terdiri dari:

- 1) Partisipasi pemikiran, yaitu partisipasi masyarakat yang diwujudkan ke dalam aktifitas diantaranya adalah dalam pertemuan atau rapat untuk mendiskusikan suatu kegiatan.
- 2) Partisipasi tenaga, yaitu partisipasi masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai aktifitas untuk tindakan bantuan bagi orang lain, tindakan nyata untuk menghasilkan suatu perbaikan dan sebagainya.
- 3) Partisipasi keterampilan, yaitu kepiawaian yang diberikan oleh seseorang dalam suatu upaya untuk mendorong dalam suatu usaha atau industry.

- 4) Partisipasi harta benda, yaitu sesuatu yang diberikan seseorang dalam bentuk uang, makanan atau bentuk lainnya dalam rangka pembangunan atau sebagai bentuk pertolongan bagi orang lain.
- 5) Partisipasi sosial, yaitu sesuatu yang diberikan oleh seseorang dengan maksud untuk tujuan kerukunan.

Selanjutnya Conyers (1991) berpendapat bahwa dalam perencanaan pembangunan partisipatif, salah satu faktor penting adalah pendidikan. Partisipatif yang efektif dapat dilakukan masyarakat yang didasari oleh keputusan yang tepat, sehingga masyarakat perlu memahami hal ini. Ada tiga hal utama dalam perencanaan pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat, diuraikan sebagaimana berikut:

- 1) Adanya partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu rencana pembangunan dikarenakan, partisipasi masyarakat adalah alat yang cukup efektif untuk menggali informasi terkait situasi dan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan sikap masyarakat dalam rencana pembangunan.
- 2) Partisipasi masyarakat akan membuat masyarakat lebih meyakini program pembangunan, dikarenakan mereka dilibatkan dalam dalam tipe proses rencana pembangunan. Sehingga masyarakat mengetahui seluk beluk program pembangunan tersebut yang selanjutnya dapat memicu timbulnya rasa memiliki terhadap program pembangunan tersebut.
- 3) Partisipasi merupakan salah satu wujud dari hak demokrasi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk berpendapat dalam menetapkan jenis dan rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah mereka.

Abe (2002) menjelaskan lebih lanjut bahwa dampak yang muncul dengan melibatkan masyarakat langsung dalam perencanaan, diantaranya

adalah: 1) dapat menghindari manipulasi dalam perencanaan, dikarenakan dengan partisipasi masyarakat maka akan memperjelas kebutuhan yang menjadi kehendak masyarakat, 2) Dapat memberikan suatu nilai lebih pada pengakuan/legitimasi pada perencanaan. Dengan pelibatan masyarakat dalam jumlah semakin banyak maka dalam perencanaan akan semakin baik, dan 3) meningkatkan kesadaran dan kemampuan politik di masyarakat.

Pada akhirnya dapat diartikan bahwa perencanaan partisipatif yaitu salah satu pendekatan dalam perencanaan dengan tujuan difokuskan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam proses terdapat keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Perencanaan dengan melibatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tentu saja harus dirumuskan dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan yang seringkali gagal dilakukan oleh pemerintah adalah kurangnya kewenangan dari pemerintah ke pemerintah di level bawahnya atau masyarakat. Pada jaman orde baru system yang dibuat pemerintah lebih bersifat sentralistis namun banyak terjadi kegagalan. Dalam perkembangannya akhirnya muncul system desentralistis untuk lebih memberi kesempatan bagi pemerintah di daerah dan masyarakat untuk mampu mengenali persoalan mereka dan mencari solusi dari persoalan tersebut.

## **2.3 Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

### **2.3.1 Pengertian Pariwisata**

Menurut Spillane (1987) pariwisata didefinisikan “sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan/keserasian dan

kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.” Kemudian Wahab dalam Yoeti (2008), mengungkapkan pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu. sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.”

Selanjutnya Pendit (2003), mendefinisikan “pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.” Menurut Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa “wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.”

Menurut Hadiwijoyo (2018) bahwa “pariwisata sebagai suatu aktivitas yang dilakukan wisatawan ke suatu tempat tujuan wisata di luar kesehariannya dan lingkungan tempat tinggal untuk melakukan persinggahan sementara waktu dari tempat tinggal, yang didorong dari beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari nafkah, namun didasarkan atas kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan disertai dengan menikmati berbagai hiburan yang dapat

melepaskan lelah dan menghasilkan suatu *travel experience* dan *hospitality service*.” Selanjutnya Muljadi dan Warman (2016) mengungkapkan bahwa kepariwisataan merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu melalui peningkatan pendapatan devisa, kesempatan kerja dan kesempatan usaha, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara maksimal agar mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Definisi pariwisata dari berbagai teori tersebut terlihat bahwa substansi dari pariwisata didalamnya terdapat aktivitas wisatawan yang menikmati perjalanan yang tidak berada di tempat tinggal mereka. Aktifitas tersebut memiliki dampak bagi tempat yang dikunjunginya dalam hal sosial ekonomi budaya, serta dalam perjalanan tersebut bukan suatu hal bagi wisatawan untuk mencari pekerjaan, namun untuk liburan dan kesenangan, sehingga wisatawan menemukan pengalaman bahkan belajar dari perjalanan tersebut. Selain itu dalam pariwisata mampu memberikan kontribusi pada negara berupa pendapatan devisa, membuka peluang usaha dan pekerjaan dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3.2 Unsur Unsur Pariwisata**

Terdapat unsur-unsur mutlak yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata. Isdarmanto (2017) menyebutkan empat unsur pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yaitu:

#### **1) Daya Tarik Wisata (*attraction*)**

Pada tiap destinasi pariwisata mempunyai daya tarik yang berbeda-beda yang didasarkan pada kemampuan atau potensi yang dimiliki. sehingga

dapat diartikan bahwa daya tarik wisata adalah salah satu unsur utama yang menjadikan daerah tersebut menjadi destinasi pariwisata. Daya Tarik wisata misalnya adalah: Daya tarik wisata alam (*natural tourist attractions*), daya tarik wisata ini merupakan daya tarik yang ada di alam diantaranya adalah laut, pantai, gunung, danau, lembah, bukit, air terjun, ngarai, sungai, hutan dan sebagainya. Daya tarik wisata yang merupakan buatan manusia (*man-made tourist attractions*), diantaranya wisata budaya (*cultural tourist attractions*), seperti tarian, wayang, upacara adat, lagu, upacara ritual dan daya tarik wisata yang merupakan hasil karya cipta, misalnya: bangunan seni, seni pahat, ukir, lukis. Daya Tarik wisata sebaiknya memiliki keunikan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Daya tarik wisata sebagai unsur pariwisata yang mempunyai kekuatan tersendiri karena mampu memunculkan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata.

## 2) Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (*Amenities*)

Yaitu semua fasilitas-fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan tersebut berada di lokasi destinasi wisata. Hal ini berkaitan diantaranya akomodasi yaitu sarana untuk menginap di lokasi destinasi, warung makan atau restoran untuk kebutuhan makan dan minum, anjungan tunai mandiri untuk keperluan financial wisatawan, transportasi misalnya ketersediaan kendaraan selama di lokasi destinasi wisata, kebutuhan untuk komunikasi. Disamping itu adanya fasilitas atau sarana pendukung yang lebih spesifik sesuai dengan karkater masing masing lokasi destinasi wisata.

## 3) Kemudahan untuk Mencapai Destinasi Wisata (*Accesibility*)

Merupakan sarana yang dapat mempermudah wisatawan untuk mencapai

destinasi wisata. Misalnya adalah akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan adalah aspek penting bagi sebuah destinasi. Aksesibilitas tidak terpaku pada alat angkutan yang dapat mengantar wisatawan dari tempat asalnya ke destinasi wisata dan kembali ketempat asalnya, namun juga terkait semua aspek dapat memperlancar perjalanan ke destinasi wisata dan kembali ke tempat asal wisatawan.

#### 4) Keramah tamahan (*Ancillary = Hospitality*)

Hal ini terkait dengan manajemen destinasi wisata yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi. Unsur keramah tamahan menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap keberlanjutan destinasi wisata. Dalam artian jika tidak dikelola dengan baik maka berpotensi terhadap terbengkalainya destinasi wisata tersebut. Keramah tamahan akan berdampak pada perasaan wisatawan saat berkunjung, yaitu kesan yang diterima wisatawan bisa citra positif atau negatif. Dengan keramah tamahan yang baik tentunya akan menimbulkan citra positif bai wisatawan, sehingga kedepannya akan berdampak sebagai pemicu wisatawan lain untuk datang berkunjung. Oleh karena itu keramah tamahan menjadi unsur yang penting dalam pengembangan pariwisata karena berkaitan dengan kesan dan kepuasan wisatawan yang datang berkunjung.

### 2.3.3 *Stakeholders* dalam Pengembangan Wisata

Kegiatan pariwisata agar dapat berjalan dengan baik, disamping unsur unsur utama pariwisata terkait *attraction*, *accessibility*, *amenities* dan *ancillary*, diperlukan perencanaan yang tepat. Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengembangan wisata dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Aspek tersebut diantaranya adalah aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam perencanaan juga perlu melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait (*stakeholders*) dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara holistik, sehingga semakin banyak informasi yang diperoleh maka *out put* sebuah perencanaan akan semakin berkualitas.

*Stakeholders* dalam pengembangan wisata maupun ekowisata tidak berbeda signifikan. Sebagai bagian pembeda adalah dimana tujuan wisata lebih ke perjalanan wisatawan dan kurang memperhatikan faktor lingkungan, sedangkan ekowisata lebih eksplisit lebih ketat dalam penyelenggaraan kegiatan wisatanya sangat memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Menurut Nugroho (2015) mengungkapkan bahwa *stakeholders* yang berperan dalam pengembangan ekowisata adalah:

1) Pemerintah

Peran strategis dimiliki oleh pemerintah yaitu dengan mengembangkan kebijakan, termasuk didalamnya mencakup perundangan strategis misalnya adalah tata ruang konservasi hingga teknis dalam hal pelayanan investasi. Kebijakan ini diperankan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Pemerintah juga berperan dalam menetapkan peraturan tentang batas wilayah, potensi, perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pengawetan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah juga mempunyai kepentingan dalam mengembangkan wilayah ekowisata atau wisata karena merupakan salah satu pintu masuk dalam dlam mengembangkan budaya nasional, buka hanya untuk menarik pajak dan devisa.

## 2) Perencana dan Peneliti

Merupakan stakeholders yang berasal dari unsur pemerintah dan dijadikan sebagai sumber saran atau produk akademik yang digunakan sebagai salah satu bahan dalam merumuskan kebijakan. Identifikasi potensi, pemetaan daya dukung kawasan, ide pengembangan, konsep perencanaan dan pengelolaan adalah produk yang dihasilkan dari dua stakeholders ini. Dengan demikian hasil hasil penelitian merupakan bentuk manfaat sosial yang dapat digunakan untuk kepentingan public. Dua stakeholders ini juga sebagai garda terdepan yang berasal dari unsur pemerintah yang berhadapan dengan stakeholders masyarakat, swasta dan dunia internasional.

## 3) Pengelola Taman Nasional / Ekosistem

Pengelola adalah stakeholders yang berasal dari unsur pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap operasional di lapangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola Taman Nasional di bantu oleh peneliti yang memiliki kompetensi dan memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap data dan informasi. Untuk mencapai harmonisasi dalam aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi, maka pengelola Taman Nasional perlu untuk berkolaborasi dengan masyarakat setempat, pihak swasta dan Taman Nasional terdekat. Out put yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan tentang teknis operasional wisata yang berkualitas dengan tetap memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan dan efisiensi pembiayaan.

## 4) Sektor Swasta

*Stakeholders* sektor swasta berperan sebagai pihak yang mengoperasionalkan kegiatan dan menyediakan fasilitas diantaranya adalah

akomodasi, produk wisata, program pendidikan dan pelatihan, tujuan wisata dan kualitas pelayanan dengan tujuan agar memberikan kepuasan terhadap wisatawan yang berkunjung. Dalam menjalankan perannya, sektor swasta menerapkan aspek legal diantaranya terkait dengan standar pelayanan, aturan taman nasional dan partisipasi penduduk setempat. Dengan melaksanakan peranya tersebut maka sektor swasta akan mendapatkan profit. Sebagian profit disetorkan ke Negara dalam bentuk pajak dan sebagian akan dikembalikan untuk pengelolaan lingkungan. Dampak positif lain yang muncul adalah dapat membuka kesempatan peluang kerja bagi masyarakat setempat, sehingga perekonomian masyarakat dapat bergerak dan tumbuh. Disisi lain sektor swasta dapat memberikan sumbangan nilai ekspor yang signifikan yang berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto.

5) Pengunjung atau Wisatawan

Merupakan salah satu stakeholders penting sebagai indikator keberhasilan pengembangan wisata. Pengunjung mendapatkan secara nyata tentang pengalaman dan pendidikan lingkungan dan tentang resiko dan dampak dari pembangunan. Pelayanan yang baik terhadap pengunjung maka akan menjadi media promosi atau sebagai sebuah pintu masuk dalam pengembangan budaya bahkan dapat menyajikan "*willingness to pay*" untuk usaha usaha konservasi.

6) Penduduk lokal

Penduduk lokal dalam hal ini berperan sebagai subjek dan objek. Dari sisi objek, maka penduduk lokal dapat dapat berpartisipasi dalam penyamapian pola pikir, kelembagaan dan kearifan penduduk lokal dapat diadopsi dala

suatu proses perencanaan. Sedangkan dari sisi objek, maka penduduk lokal dan lingkungannya membutuhkan perhatian dalam pengelolaan sehingga upaya upaya konservasi dapat mencapai tujuan dan bermanfaat bagi semua pihak. Adanya partisipasi masyarakat maska akan membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan yang selanjutnya menjadi unsur penting dala kesejahteraan masyarakat. Kesepahaman budaya juga akan terwujud jika adanya interaksi yang baik antara masyarakat setempat dengan pengunjung.

#### 7) Lembaga Swadaya Masyarakat

Merupakan lembaga non pemerintah berperan dalam menelaah potensi serta upaya pengembangan daerah daerah yang berpotensi. Lembaga Swadaya Masyarakat mampu mengorganisir volunteer untuk kerjasama dengan fungsinya masing masing dengan tujuan untuk membentuk opini, mengangkat isu strategis dan aktual, ekspos kerusakan lingkunag serta pemberdayaan masyarakat setempat. Sebagai contoh adalah Lembaga Swadya Masyarakat *Operation Wallacea* yaitu LSM internasional yang bergerak sejak tahun 1995 terlibat dalam mengembangkan Taman Nasional Wakatobi. LSM ini mendapat dukungan dari peneliti, volunteer dan mahasiswa yang berasal dari Inggris dan Irlandia yang membantu dalam mengembangkan ekonomi lokal setempat.

#### 8) Media Massa

*Stakeholders* ini berperan sebagai sumber informasi untuk pembelajaran yang baik. Informasi terkait kebijakan pemerintah akan membantu dalam memberikan wawasan bagi masyarakat yang masih awam. Disamping itu informasi yang berupa laporan perjalanan, aktivis lingkungan dan profil suatu wilayah akan menghasilkan pembentukan perubahan sikap. Disisi lain media

massa berpedan dalam upaya promosi wisata dalam suatu daerah untuk diperkenalkan ke khalayak luas, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memicu kunjungan wisatawan.

Lebih lanjut Nugroho (2015) mengungkapkan bahwa peran stakeholder dalam program pembangunan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Policy creator* yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
3. Fasilitator yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementor yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

#### **2.3.4 Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Menurut Hadiwijoyo (2018) pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) adalah sebuah konsep pariwisata yang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat atas kemajuan pariwisata di wilayahnya. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sangat ditekankan dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat karena mengacu pada kearifan lokal wilayah, dimana desa desa wisata yang dibangun dan menerapkan

pariwisata berbasis masyarakat menawarkan pariwisata yang memang sudah menjadi budaya wilayah itu sendiri.

Ciri khusus dari pariwisata berbasis masyarakat adalah berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat local serta lain kelompok memiliki ketertarikan, yang memberi kontrol lebih besar pada proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Wujud dari konsep pariwisata berbasis masyarakat adalah dikembangkannya desa desa wisata, dimana dalam desa yang berada di wilayah pariwisata mengembangkan potensinya baik potensi sumber daya alam, budaya dan juga potensi sumber daya manusianya.

Sunaryo (2013) mengemukakan bahwa dalam mewujudkan pengembangan pariwisata agar dapat berjalan dengan baik, maka suatu hal mendasar yang harus dilakukan yaitu memberikan secara luas tentang fasilitas pelibatan masyarakat setempat. Pelibatan tersebut yaitu dalam proses pengembangan dan meningkatkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari aktifitas pariwisata untuk masyarakat lokal. Dalam hal ini masyarakat lokal mempunyai peran yang sama pentingnya sebagai pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan.

Hadiwijoyo (2018) mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat dapat diwujudkan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Perencanaan (*planning stage*), pelibatan masyarakat setempat diantaranya terutama terkait dalam hal mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan alternatif fasilitas dan rencana.

2. Implementasi (*implementation stage*), pelibatan masyarakat diantaranya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan, pengelolaan kegiatan usaha/objek .
3. Nilai Manfaat (*shared benefit*), perwujudan partisipasi masyarakat dalam perdan dan posisinya untuk memperoleh nilai manfaat, baik secara ekonomi ataupun sosial budaya yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.



Gambar 2.2 Pengembangan berbasis masyarakat  
Sumber: Hadiwijoyo (2018)

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) sangat terkait erat dengan adanya kepastian pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan. Langkah strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dengan memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu :

1. Melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Kepastian masyarakat setempat tentang manfaat yang diterima dari aktifitas kepariwisataan.

3. Adanya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan pariwisata di wilayah mereka.

Sedangkan beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam pariwisata berbasis masyarakat agar mencapai tujuan yang optimal menurut Hadiwijoyo (2018) diantaranya adalah:

1. Sumber daya alam dan budaya

Ketersediaan sumber daya alam dan budaya merupakan salah satu modal dalam pengembangan wisata. Sumber daya alam suatu daerah yang memiliki keunikan dibandingkan dengan daerah lain maka akan memiliki prospek yang baik. Demikian juga budaya yang khas dan berbeda dengan daerah lain maka akan menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

2. Organisasi organisasi masyarakat

Merupakan elemen penggerak dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan adanya organisasi masyarakat maka akan dapat menampung ide gagasan masyarakat dan selanjutnya dapat melakukan tindakan kongkret.

3. Manajemen

Manajemen diperlukan agar dalam pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Dalam manajemen terdapat unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, implementasi, monitoring dan evaluasi. Masyarakat dapat terlibat aktif dan berperan dalam setiap unsur tersebut agar pengelolaan wisata dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

#### 4. Pembelajaran

Merupakan proses belajar antara tuan rumah (*host community*) dengan tamu (*guest*) untuk mendidik dan membangun pengertian tentang keberagaman budaya dan cara hidup, peningkatan kesadaran konservasi budaya dan sumberdaya antara wisatawan dengan masyarakat (Mualissin, 2007 dalam Hadiwijoyo, 2018)

Perencanaan pembangunan wisata dengan melibatkan masyarakat setempat merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan. Namun dalam implemenasinya terkadang tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Menurut Tosun (2000) dalam Adikampa (2017) mengemukakan bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) terutama di negara berkembang, terdapat tiga hambatan yaitu :

- 1) Adanya keterbatasan operasional yang meliputi: sentralisasi administrasi publik, koordinasi yang lemah, dan informasi pariwisata yang kurang.
- 2) Adanya keterbatasan struktural, meliputi: sikap pelaku pariwisata, tenaga ahli yang terbatas, adanya dominasi elite masyarakat, belum tepatnya aturan huku, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, dan akses ke modal ekonomi/finansial yang masih minim.
- 3) Adanya keterbatasan kultural, meliputi: terbatasnya kapasitas masyarakat dan sikap apatis masyarakat lokal terhadap pariwisata.

#### 2.3.5 Pemberdayaan Masyarakat

Konsepsi pemberdayaan mulai muncul pada sekitar dekade 1970-an dan berkembang terus hingga 1990-an (Hikmat, 2010 dalam Hadiwijoyo, 2018). Konsep pemberdayaan dipandang sebagai bagian dari aliran yang muncul pada

abad 20 yang dikenal sebagai aliran post modernism (Pranarka dan Vidhyandika, 1996 dalam Hadiwijoyo, 2018).

Sunaryo (2013) mendefinisikan “pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.” Sedangkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mendefinisikan “pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.”

Menurut Hadiwijoyo (2018) dalam pemberdayaan masyarakat terdapat proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada proses tersebut masyarakat melakukan aktifitas meliputi:

1. Identifikasi dan mengkaji potensi dan permasalahan yang ada wilayah mereka.
2. Hasil kajian dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan.
3. Melaksanakan rencana kegiatan tersebut.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil kegiatannya secara terus menerus.

Pemberdayaan masyarakat merupakan syarat utama dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, dimana pembangunan dimulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap pengawasan dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah nyata diperlukan untuk mencapai tujuan, namun tetap dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah meliputi:

1. *Enabling*, yaitu penciptaan suasana/iklim yang memungkinkan untuk pengembangan potensi masyarakat. Dua hal mendasar dalam membentuk suasana/iklim bagi masyarakat melalui:
  - a. Menggugah kesadaran masyarakat dan memberikan motivasi untuk berkembang, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk mengenali wilayah mereka dengan survey dan analisis atau biasa disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.
  - b. Memberikan motivasi dengan mengajak masyarakat untuk merencanakan wilayah atau disebut dengan *participatory design and planning*.
2. *Empowering*, yaitu penguatan potensi yang dimiliki masyarakat. Dilakukan dengan mengorganisir masyarakat ke dalam kelompok masyarakat, selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan masukan serta membuka peluang-peluang untuk berkembang, sehingga masyarakat semakin berdaya.
3. *Protecting*, yaitu pencegahan terhadap terjadinya persaingan yang tidak sehat atau eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, langkah-langkah yang bisa ditempuh diantaranya adalah:

- a. Penguatan akses misalnya melalui penciptaan akses dari kelompok informasi kepada kelompok formal. Akses tersebut mempengaruhi partisipasi antar *stakeholders* dalam proses pemberdayaan.
- b. Penguatan teknis melalui *advocacy* atau pengarahan sehingga dapat meningkatkan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan. Wujud pelibatan aktif masing-masing *stakeholders* dalam bentuk program, kebijaksanaan (*policy*) dan pendanaan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, maka pelibatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya ditujukan untuk masyarakat (Hadiwijoyo, 2018). Selanjutnya Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku, yaitu proses untuk menuju perilaku sadar dan peduli sehingga kapasitas diri perlu ditingkatkan.
2. Tahap transformasi, yaitu proses peningkatan kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan sehingga dapat berperan dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan, sehingga mampu berinisiatif dan inovatif untuk mengarah pada kemandirian.

#### **2.4 Perencanaan Pengembangan Pariwisata**

Muljadi dan Warwan (2016) menyatakan bahwa perencanaan kepariwisataan sebagai suatu kegiatan pengorganisasian yang dilakukan secara menyeluruh dalam pembangunan dan pengembangan tentang fasilitas-fasilitas

yang diperlukan dalam kepariwisataan, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut secara tepat dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Sehingga dapat diartikan bahwa perencanaan kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan dan pengembangan secara keseluruhan dan menggunakan sumber-sumber kekayaan alam dan budaya, kemampuan manusia serta sumber-sumber keuangan dengan efektif dan efisien. Manfaat yang sebesar-besarnya akan diperoleh jika perencanaan dilakukan dengan baik. Selain itu dampak resiko dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Perencanaan kepariwisataan dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan sudah banyak dilakukan yaitu dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan penduduk di suatu wilayah tertentu dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih fungsional, menyenangkan, menarik, aman baik yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat maupun wisatawan yang datang berkunjung. Hadiwijoyo (2018) mengemukakan bahwa “perencanaan pengembangan pariwisata merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang terhadap sumber daya bersifat hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapai sasaran yang diharapkan.” Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan pengembangan pariwisata tidak lain adalah untuk peningkatan terhadap kemakmuran masyarakat secara serasi dan seimbang dimana pemerintah dapat berperan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal. Sehingga hal ini dapat diartikan berkembangnya suatu

kawasan wisata maka tidak dapat dilepaskan dari usaha usaha yang dilakukan melalui kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam hal kepariwisataan.

Menurut Sudibjo (2005) dalam Isdarmanto (2017) menyatakan bahwa perencanaan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi daerah tujuan wisata sekaligus meminimalisir dampak negatif dari proses dan hasil pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Disisi lain pengembangan pariwisata yang harus berkesinambungan dan terus memberikan sumbangan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan penduduk,serta seterusnya meningkatkan kualitas lingkungan serta melestarikan budaya setempat.

Didalam perencanaan pariwisata tentunya terdapat kaidah kaidah atau prinsip prinsip yang digunakan agar nantinya dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Menurut Yoeti (1997) dalam Hadiwijoyo (2018), prinsip-prinsip perencanaan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- 2) Perencanaan pengembangan pariwisata harus satu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan perekonomian Negara.
- 3) Dengan menggunakan pendekatan terpadu
- 4) Berada dalam koordinasi perencanaan fisik suatu daerah tersebut secara keseluruhan
- 5) Perencanaan fisik daerah yang bertujuan untuk wisata maka perlu penelitian tentang geografi bukan hanya administrasi saja
- 6) Memperhatikan dampak sosial
- 7) Memperhatikan dampak ekologi
- 8) Perencanaan dikawasan industri perlu memperhatikan fasilitas hiburan

- 9) Pariwisata bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diperhatikan adanya kemungkinan untuk bekerjasama dengan Negara lain yang saling menguntungkan.

Dalam perencanaan pengembangan suatu kawasan wisata memerlukan tahapan tahapan yang didasarkan pada pertimbangan pertimbangan tertentu. Menurut Hadiwijoyo (2018) bahwa tahapan tahapan dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata yaitu:

- 1) Penelitian Pemasaran (*Marketing Research*)

Pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari sisi peningkatan pendapatan, baik pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang prospek ke depan tentang objek wisata yang direncanakan. Selanjutnya dapat diketahui bentuk wisata seperti apa yang akan dikembangkan sesuai keinginan pasar dan konsumen. Sehingga akan dapat diperoleh keuntungan maksimal dari objek wisata tersebut baik peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat setempat serta wisatawan dalam memperoleh kepuasan di objek wisata tersebut.

- 2) Analisis Situasi (*Situational Analysis*)

Penelitian/ kajian menjadi dasar dalam perencanaan pariwisata, yaitu terkait dengan analisis geografi tidak hanya pada administrasi saja. Disamping itu perlu dilakukan kajian dan dampak yang ditimbulkan dari lingkungan sosial (faktor demografi dan faktor ekonomi) dan faktor ekologi. Sehingga dalam perencanaan pariwisata bersifat integratif yaitu dengan mempertimbangkan analisis situasi dari beberapa aspek.

- 3) Target Pemasaran (*Marketing Target*)

Yaitu proses manajemen untuk mengidentifikasi target wisatawan dalam

rangka mempengaruhi keinginan, kebutuhan, motivasi dan untuk merumuskan produk wisata, sesuai dengan situasi untuk mencapai sasaran seperti yang diharapkan dan mewujudkan kepuasan wisatawan.

4) Promosi Pariwisata (*Tourism Promotion*)

Promosi pariwisata ditujukan untuk memperkenalkan atau memberikan informasi tentang suatu objek wisata. Dapat dilakukan secara langsung misal dengan pembuatan display, even-even wisata, brosur yang disebarlang langsung. Sedangkan secara tidak langsung bisa melalui publikasi dalam majalah, penyelenggaraan workshop, barang cetakan.

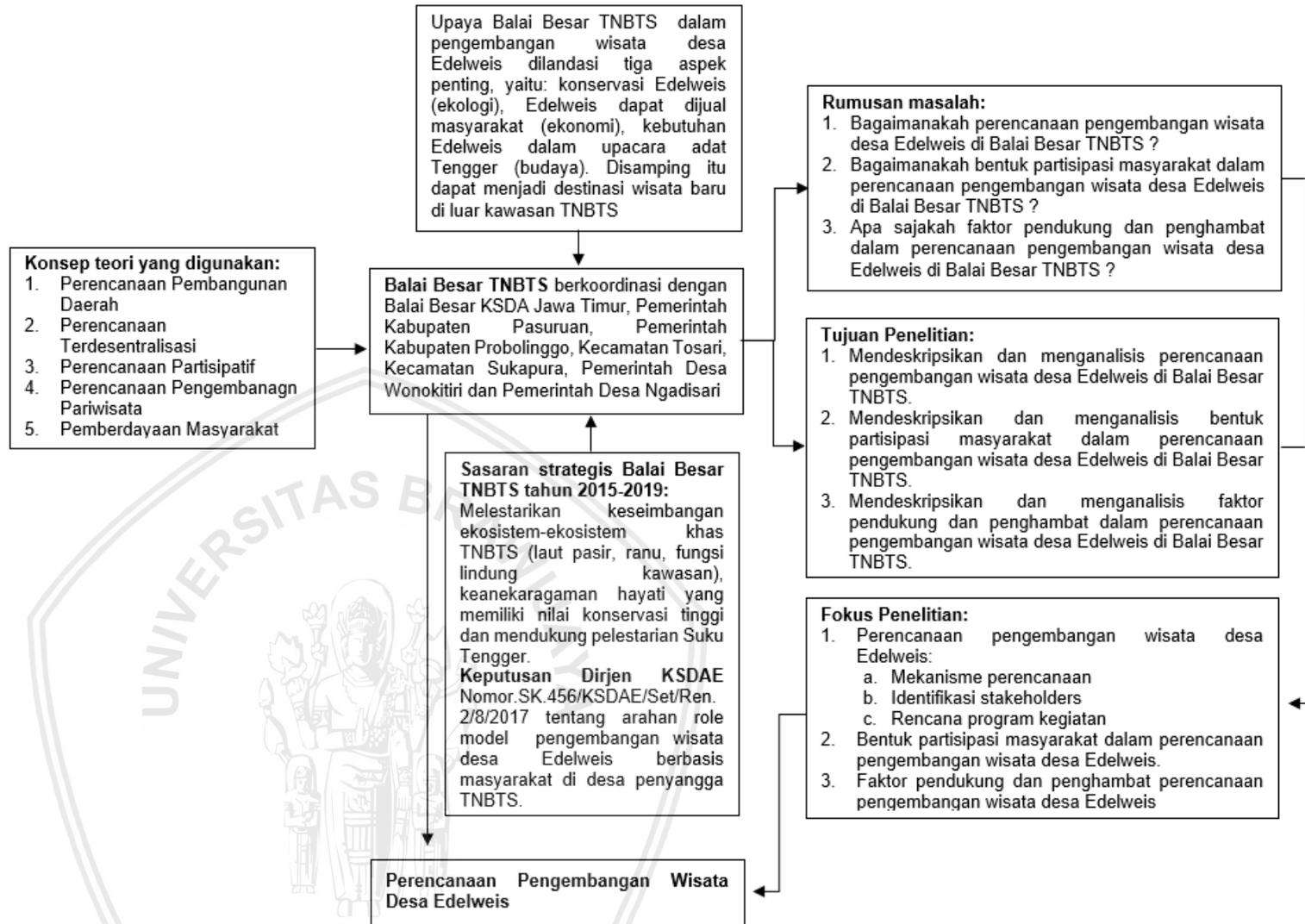
5) Pemberdayaan Masyarakat Setempat (*Local Community Empowerment*)

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari keberadaan masyarakat lokal. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan perekonomian and kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu dapat berkontribusi sebagai pendapatan daerah. Maka dengan adanya pengembangan wisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah setempat. Dengan demikian dalam pengembangan pariwisata mutlak diperlukan partisipasi masyarakat dengan strategi pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan kepariwisataan yang baik dan tepat maka akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat setempat, pelaku usaha dan negara. Masyarakat setempat akan diuntungkan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Sektor swasta diuntungkan dengan peningkatan profit dari usahanya dibidang pariwisata. Sedangkan negara juga memperoleh manfaat yaitu devisa. Namun menurut Muljadi dan Warman (2016) pembangunan dan pengembangan pariwisata tidak semudah yang dibayangkan dikarenakan adanya kendala-kendala meliputi:

- 1) Rendahnya kualitas pelayanan pariwisata yang diakibatkan oleh sumberdaya manusia yang kurang kompeten
- 2) Rendahnya jumlah dan nilai investasi dikarenakan regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron. Disamping itu koordinasi diantara *stakeholders* yang belum mendukung sepenuhnya kepada investor baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Belum memadainya saran dan prasarana wisata yang disebabkan pembangunan di daerah masih banyak memprioritaskan sektor lain daripada sektor pariwisata.
- 4) Adanya isu keamanan dan lingkungan yang kurang mendukung sehingga berdampak yang kurang bagus pada sektor pariwisata.
- 5) Peran pelaku usaha yang kurang optimal, sehingga wisatawan yang datang berkunjung kurang merasakan kepuasan dan tidak sesuai dengan ekspektasi wisatawan.
- 6) Belum memadainya anggaran untuk kegiatan promosi pariwisata.
- 7) Peran masyarakat dirasakan masih kurang, dengan alasan masyarakat masih menganggap bahwa dalam pembangunan kepariwisataan maka akan banyak berdampak negative, diantaranya adalah pergaulan bebas dan perbuatan maksiat.
- 8) Koordinasi antar *stakeholders* masih lemah, karena ada anggapan dari masing masing sektor bahwa sektor mereka paling penting atau dengan istilah lain masih adanya ego sektoral.
- 9) Adanya persaingan antara negara negara tujuan wisata baik ditingkat regional atau internasional.

## 2.5 Kerangka Pikir Penelitian



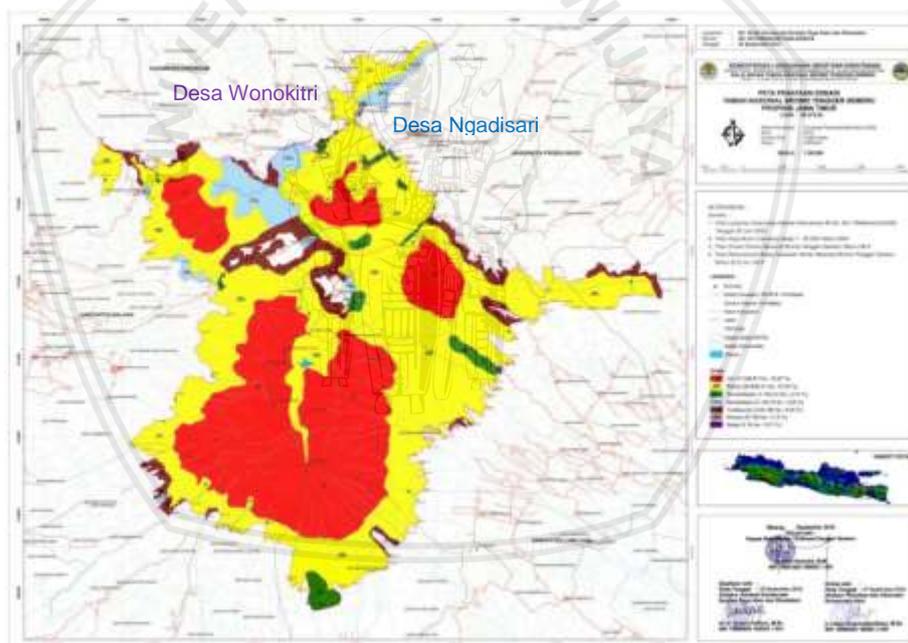
Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

## BAB III

### ANALISIS LATAR SOSIAL PENELITIAN

#### 3.1 Gambaran Umum Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan luas total kawasan yang dikelola 50.276,20 hektar.



Gambar 3.1 Peta kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.381/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Zonasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, kawasan TNBTS dibagi kedalam 7 (tujuh) zonasi, yaitu zona inti seluas : 17.028,67 Ha,

zona rimba seluas : 26.806,31 Ha, zona pemanfaatan seluas 1.193,43 Ha :, zona rehabilitasi seluas : 2.139,19 Ha, zona tradisional Seluas 3.041,86 Ha, zona khusus Seluas 61,56 Ha dan Zona Religi seluas : 5,18 Ha.

Secara administrasi wilayah terletak di empat wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Pengelolaan kawasan dibagi kedalam dua bidang wilayah, yaitu :

- 1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan dengan wilayah kerja meliputi administrasi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang.
- 2) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Lumajang dengan wilayah kerja meliputi Administrasi Kabupaten Lumajang.

### **3.2 Visi dan Misi Organisasi**

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sesuai peraturan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan fungsi Balai Besar Taman Nasional Broimo Tengger Semeru adalah sebagai berikut:

- a) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b) Perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c) Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;

- d) Pengendalian kebakaran hutan;
- e) Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h) Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i) Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j) Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
- m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Pembangunan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan bagian dan harus mengacu pada kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

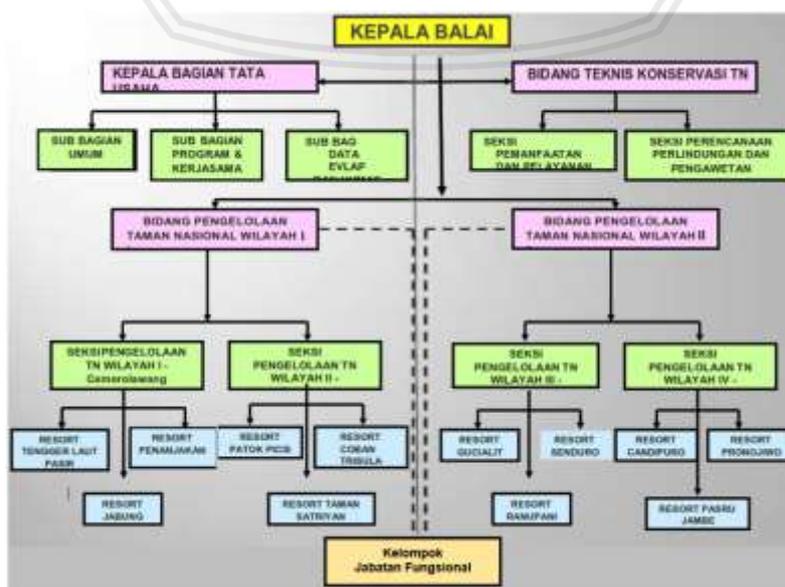
Visi pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengacu sepenuhnya pada visi Ditjen KSDAE. Sesuai dengan visi Ditjen KSDAE maka visi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah *Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong*. Visi tersebut menjadi acuan atau pedoman pencapaian misi, tujuan, sasaran kegiatan serta kebijakan dan kegiatan organisasi selama lima tahun dan

dimanifestasikan dalam Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2015 -2019. Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

### 3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, diklasifikasikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kelas I (satu) Tipe B (eselon IIb).



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BBTNBTS (2018)

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dipimpin oleh Kepala Balai Besar dengan struktur organisasi terdiri dari:

1. **Bagian Tata Usaha** dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan. Berkaitan dengan tugas, maka Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- b) Penyiapan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan;
- c) Pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan

Dibawah hierarki Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) **Subbagian Umum**, dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dengan tugas yaitu melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan.
- 2) **Subbagian Program dan Kerjasama**, dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Kerjasama dengan tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta kerja sama

- 3) **Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan**, dipimpin oleh Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan, dengan tugas yaitu melaksanakan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan serta kehumasan
2. **Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional**, dipimpin oleh Kepala Bidang Teknis Pengelolaan dengan tugas yaitu melaksanakan penyiapan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam kawasan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Nasional/ Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, evaluasi kesesuaian fungsi, pelayanan dan promosi taman nasional. Kemudian fungsi yang diselenggarakan yaitu:
    - a) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
    - b) Pepenyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis perlindungan dan pengamanan kawasan;
    - c) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
    - d) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan;
    - e) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
    - f) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;

- g) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l) Penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Dibawah hierarki Bidang Teknis Pengelolaan Taman Nasional terdiri dari:

- 1) **Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan**, dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan dengan tugas yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan dan pengamanan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pelaksanaan teknis bidang informasi perpetaan, sistem informasi geografis dan website serta pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di dalam kawasan.

- 2) **Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan**, dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan dengan tugas yaitu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), pelaksanaan promosi dan pemasaran, penyiapan administrasi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan.
3. **Bidang Pengelolaan Taman Nasional**, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional. Terdiri dari dua Bidang Pengelolaan Taman Nasional, yaitu Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah I berada di Wonorejo-Pasuruan dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II berada di Purworejo-Lumajang. Memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan kawasan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Selanjutnya Bidang Pengelolaan Taman Nasional menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
  - b) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan;
  - c) Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
  - d) Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;

- e) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f) Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h) Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i) Pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j) Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k) Pelaksanaan pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Hierarki dibawah Bidang Pengelolaan Taman Nasional adalah Seksi Pengelolaan Taman Nasional. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan Taman Nasional, maka berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional pasal 35, Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menetapkan sembilan Resort. Dalam hierarki organisasi, Resort berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Seksi Pengelolaan Taman Nasional. Sembilan Resort tersebut terbagi masing-

masing tiga resort untuk setiap Seksi Pengelolaan Taman Nasional sebagai berikut:

1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I terdiri dari:

i. **Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I**

Membawahi Resort Tengger Laur Pasir, Resort Pananjakan dan Resort Jabung

ii. **Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II**

Membawahi Resort Patok Picis, Resort Coba Trisula dan Resort Taman Satriyan

2) Sedangkan hierarki dibawah Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II terdiri dari:

i. **Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III**

Membawahi Resort Gucilait, Resort Ranupani dan Resort Senduro

ii. **Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV**

Membawahi Resort Candipuro, Resort Pasru Jambe dan Resort Pronojiwo

Masing-masing Seksi Pengelolaan Taman Nasional dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional dengan tugas yaitu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan dan pengelolaan kawasan, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

4. **Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Polisi Kehutanan (POLHUT) dan Penyuluh Kehutanan dimana masing-masing jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok/ Koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.4 Sumber Daya Manusia

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Kondisi sumber daya manusia Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hingga akhir tahun 2018 berjumlah 173 orang, terdiri dari 102 Pegawai Negeri Sipil dan 71 orang Tenaga Kontrak.

Tabel 3.1. Distribusi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis Jabatan

No.	Unit Kerja	Jenis Jabatan							Tenaga kontrak	Jml	
		Struktural/Eselon			Fungsional Tertentu			Fungs Umum			Calon Arsiparis
		IIb	IIIb	IVa	Polhut	PEH	Penyuluh				
1	Balai	1	2	5	0	1	1	28	1	19	58
2	BPTN I	0	1	2	9	9	2	14		32	69
3	BPTN II	0	0	2	10	4	1	9		20	46
TOTAL		1	3	9	19	14	4	51	1	71	173

Sumber: Balai Besar TNBTS (2018)

Tabel 3.2. Distribusi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan PNS dan jenis Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun 2018														
		IV	III	II	I	JML	IV	III	II	I	JML	IV	III	II	I	JML
		BALAI					BPTN Wilayah I					BPTN Wilayah II				
1	DOKTOR		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PASCA SARJANA	5	3	-	-	8	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2
3	SARJANA		13	-	-	13	-	11	-	-	11	-	8	-	-	8
4	SARJANA MUDA		1	1	-	2	-	1	2	-	3	-	2	-	-	2
5	SLTA		12	2	-	14	-	8	8	-	16	-	8	4	-	12
6	SLTP		-	1	1	2	-	-	-	4	4	-	-	-	0	0
7	SD		-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1
TOTAL						40					37					25

Sumber: Balai Besar TNBTS (2018)

### 3.5 Potensi Sumber Daya alam

#### 3.5.1 Ekosistem Daratan

Berdasarkan perbedaan tinggi tempat, ekosistem Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dibagi menjadi tiga zona yaitu:

##### 1) Zona Sub Montane (750-1.500 m.dpl)

Zona ini termasuk tipe hutan hujan tropis daratan rendah dan pegunungan dan merupakan daratan primer di Semeru Selatan dan Semeru Timur. Pada Zona ini didominasi oleh jenis famili *Fagaceae*, *Moraceae*, *Anacardiaceae*, *Sterculiaceae*, dan *Rubiaceae*. Tumbuhan bawah meliputi famili *Anacardiaceae*, *Araceae*, *Poaceae*, dan *Zingiberaceae*. Zona ini juga merupakan habitat berbagai anggrek alam epifit maupun terrestrial dimana terdapat 226 jenis anggrek galur murni.

## 2) Zona Montane (1.500-2.400 m.dpl)

Zona ini merupakan hutan sekunder yang keanekaragaman jenisnya sudah mulai berkurang. Zona Montane didominasi oleh jenis cemara (*Casuariana junghuhniana*), mentigi (*Vaccinium varangifolium*), kempladingan gunung (*Albizzia lophanta*), akasia (*Acacia decurrens*), edelwiss (*Anaphalis longifolia*), senduro (*Anaphalis javanica*), alang-alang (*Imperata cylindrica*), paku-pakuan (*Pteris sp.*), rumput merakan (*Themeda sp.*), dan calingan (*Catella asiatica*). Selain itu, terdapat ekosistem Laut Pasir dan merupakan habitat anggrek tanah endemik, yaitu *Habeneria tosariensis*.

## 3) Zona Sub Alpin (2.400 mdpl keatas)

Pada zona ini, ditumbuhi pohon-pohon yang kerdil dan miskin jenis. Jenis yang dominan adalah mentigi (*Vaccinium varangifolium*), dan cemara gunung (*Casuariana junghuhniana*). Dapat dijumpai bunga kempladingan gunung (*Albizzia lophata*), dan **Edelweis (*Anaphalis sp.*)**. Di Gunung Semeru pada ketinggian 3.676 mdpl merupakan hamparan tanpa vegetas sama sekali.

### 3.5.2 Ekosistem Perairan

Di dalam kawasan TNBTS terdapat ekosistem perairan berupa danau dan coban/air terjun, yaitu : Ranu Darungan seluas 6 hektar, Ranu Pani seluas 4 hektar, Ranu Regulo seluas 6 hektar, Ranu Kumbolo seluas 8 hektar, Ranu Tompe seluas 4 hektar, Air terjun Coban Trisula, Air Terjun Coban Lajing, Air Terjun Tirtowening, dan Air Terjun Ranupane.

## 3.6 Potensi Flora Fauna

Terdapat sebanyak 1025 jenis flora, yang terdiri dari 260 tanaman obat-obatan/tanaman hias, 226 merupakan famili *Orchidaceae* (Anggrek), 158 jenis anggrek, 40 jenis diantaranya tergolong anggrek langka, 3 jenis anggrek langka

endemik jawa, 15 jenis endemik Jawa Timur, dan 3 jenis anggrek khas Semeru Selatan. Jenis flora/ tumbuhan berkayu yang dapat dijumpai adalah cemara gunung (*Casuariana junghuhniana*), Kemladingan gunung (*Albizzia lophanta*), Akasia (*Acacia decurrens*), *Quercus sp.*, *Eupatorium pallescens*, *Crotalaria striata*, *Anaphalis javanica*, *Anaphalis longifolia*, Adas (*Foenicullum vulgarea*, *Vaccinium varingiaefolium*, *Styphellia pungeus*, *Sphagum sp.*, *Mimosa sp.*, *Pragmatis herba*, *Myrisca sp.*).

Fauna yang terdapat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru antara lain 15 jenis mamalia yaitu: *Manis javanica*, *Panthera pardus*, *Hystrix branchyura*, *Laricus sp.*, Kijang (*Muntiacus muntjak*), dll, klas aves yang dilindungi adalah Elang Jawa, Elang Bondol, *Falco maucensis*, *Pavo muticus*, *Halcyon cyanopventris*, *Pericrocatus miniatus*, dan *Parus mayor*. Secara keseluruhan terdapat 158 jenis satwa liar yang terdiri dari 22 jenis mamalia dan 130 jenis aves.

### 3.7 Potensi Wisata

Potensi wisata di TNBTS adalah Kaldera Tengger, Gunung Bromo, Gua/ Gunung Widodaren, Gunung Batok, Sumur Pitu/ Gua Lava, Blok Adasan, Bukit Kaki Jenggot (Teletubies), Hutan Pananjakan, Gunung Pananjakan, Bukit Kingkong/ Bukit setya, Bukit Cinta/ Bukit Ayu, Puncak B29, Air Terjun Trisula, Air Terjun Coban Lajing, Air Terjun Tirtowening, Air Terjun Gunung Raksasa, Ranu Darungan, Ranu Tompe, Ranu Pani, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo, Waturejeng, Oro- oro Ombo, Cemoro Kandang, Padang Rumput Jambangan, Kalimati, Arcopodo, Cemoro Tunggal, Lereng Semeru, dan Puncak Gunung Semeru.

### 3.8 Gambaran Umum Desa Wonokitri

Desa Wonokitri merupakan salah satu desa penyangga dan berbatasan dengan wilayah kerja Resort Penanjakan, Seksi Pengelolaan Wilayah I Cemorolawang, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sedangkan secara administratif Desa Wonokitri terletak di wilayah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Secara geografis batas wilayah desa Wonokitri yaitu sebelah barat dengan desa Tosari, sebelah Timur dengan desa Keduwung, sebelah Utara dengan desa Sedang dan sebelah Selatan dengan desa Podokoyo.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (2019) menunjukkan bahwa desa Wonokitri merupakan desa paling luas wilayahnya dibandingkan dengan desa desa lain dalam wilayah kecamatan Tosari yaitu 38,18 km<sup>2</sup> atau 41% luas wilayah kecamatan Tosari. Desa Wonokitri memiliki 2 Dusun, 5 Rukun Warga dan 26 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk pada tahun 2018 berjumlah 3.019 jiwa dengan komposisi 1.474 laki laki dan 1.545 perempuan. Jumlah keluarga menurut tingkat kesejahteraannya terdiri dari 81 keluarga pra sejahtera, 241 keluarga sejahtera I, 408 keluarga sejahtera II, 389 keluarga sejahtera II dan 29 keluarga III+. Agama yang dianut penduduk Wonokitri menurut Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (2012) yaitu Islam 57 orang, Kristen 4 orang dan Hindu 2.911 orang. Mata pencaharian penduduk Wonokitri menurut Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (2017) yaitu belum bekerja 840 orang, 1.868 petani, pertambangan 1 orang, industry pengolahan 4 orang, konstruksi 32 orang, perdagangan/hotel/restoran 16 orang, jasa angkutan 2 orang, lainnya 207 orang.

### 3.9 Gambaran Umum Desa Ngadisari

Desa Ngadisari merupakan salah satu desa penyangga dan berbatasan dengan wilayah kerja Resort Tengger Laut Pasir, Seksi Pengelolaan Wilayah I Cemorolawang, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Secara administratif Desa Ngadisari terletak di wilayah Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Sedangkan secara geografis desa Ngadisari berbatasan dengan desa Wonotoro di sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan desa Ngadirejo, sebelah Barat berbatasan dengan desa Keduwung dan sebelah selatan berbatasan dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo (2019) menunjukkan bahwa Desa Ngadisari merupakan desa paling luas wilayahnya dibandingkan dengan desa desa lain dalam wilayah kecamatan Tosari yaitu 4.993 km<sup>2</sup>. Desa Ngadisari terdiri dari 3 Dusun, 3 Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk pada tahun 2018 berjumlah 1.510 jiwa dengan komposisi 728 laki laki dan 782 perempuan. Tingkat pendidikan penduduk 218 orang tidak/belum tamat SD, 787 orang tamat SD, 441 orang tamat SMTP, 138 orang tamat SMTA dan 37 orang tamat akademi/perguruan tinggi. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Ngadisari yaitu beragama Islam 62 orang, Hindu 1.447 orang dan 1 orang Budha. Mata pencaharian penduduk Desa Ngadisari mayoritas sebagai sebagai petani yaitu 746 orang, kemudian PNS 13 orang, buruh tani 11, pedagang 22 orang, jasa angkutan 41 orang, jasa hotel/penginapan 86 orang, pensiunan 1 orang dan bidang bangunan 6 orang.

### 3.10 Karakteristik Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari

Suku Tengger adalah salah satu suku yang mendominasi penduduk desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pada penelitian ini, desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari mayoritas beragama Hindu. Masyarakat di dua desa ini memiliki budaya untuk menghormati leluhur, kehidupan dunia dan lingkungan alam sekitar. Dalam tataran masyarakat memiliki kelas sosial tertinggi yaitu dukun. Mereka menguasai adat istiadat sehingga dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat suku Tengger.

Dukun dalam struktur kehidupan masyarakat di Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari tergolong orang-orang yang terpandang dan disegani. Dukun memiliki dua fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Fungsi pertama yaitu sebagai fungsi spiritual yaitu sebagai pemimpin pada saat pelaksanaan upacara-upacara adat. Kedua adalah sebagai fungsi sosial yaitu memediasi hubungan di antara masyarakat suku Tengger dan masyarakat suku Tengger dengan pemerintah. Disamping itu dukun berperan dalam memimpin suatu musyawarah untuk mengambil keputusan, aturan dan sanksi adat. Secara umum masyarakat suku Tengger hidup dalam suasana gotong royong, saling menghormati dan tolong-menolong.

Budaya masyarakat Tengger di Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari selalu melakukan upacara-upacara adat yang tidak terlepas dari pemanfaatan bunga Edelweis atau dalam adat Tengger dinamai *kembang tanalayu*. Upacara tersebut diantaranya adalah adat *Karo*, adat *kasada*, adat *entas-entas*, adat

*unan-unan*, adat *sesanding* dan adat *liliwet*. Bunga Edelweis digunakan sebagai salah satu kelengkapan sesaji yang wajib ada. Tumbuhan Edelweis merupakan jenis tumbuhan dilindungi, sehingga sudah menjadi kewajiban Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama masyarakat desa Desa Wonokitiri dan Ngadisari untuk bersama melakukan upaya konservasi Edelweis. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian Edelweis, keberlanjutan budaya adat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat suku Tengger di Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari.



## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa dengan memperhatikan teori yang berkembang dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Moleong (2018) menyatakan penggunaan metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa : 1) lebih mudah apabila dihadapkan dengan kenyataan jamak, 2) menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan 3) lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Moleong (2018) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah :

“penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”

Menurut Menurut Creswell (2014) mengemukakan bahwa :

“pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu-individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia. Proses penelitian dilakukan dengan memunculkan pertanyaan yang sesuai prosedur, mengoleksi data partisipan, menganalisis secara induktif yaitu dari hal khusus menjadi umum dan peneliti menginterpretasikan data tersebut.”

Sedangkan Singarimbun (1995) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk pengukuran terhadap

fenomena sosial tertentu, melalui pengembangan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

#### 4.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan upaya membatasi ruang lingkup penelitian, melalui spesifikasi penggalan fenomena penelitian. Menurut Sugiyono (2009) fokus penelitian digunakan untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial sehingga peneliti mengetahui bagaimana data yang perlu dikumpulkan sesuai dengan penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, yaitu :
  - a. Mekanisme perencanaan
  - b. Identifikasi *stakeholders*
  - c. Rencana program kegiatan
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis.
3. Faktor pendukung dan penghambat perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, yaitu :
  - a. Faktor pendukung, meliputi: faktor lingkungan (budaya), faktor perkembangan ilmu dan teknologi, faktor sistem yang digunakan dan faktor pendanaan.

- b. Faktor penghambat, meliputi: faktor lingkungan (sosial), faktor sumber daya manusia perencana, dan faktor lainnya yaitu: dukungan perencanaan pemerintah daerah, dan ego sektoral.

#### 4.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian sebagai berikut :

- 1) Salah satu kebijakan Balai Besar Bromo Tengger Semeru dalam upaya konservasi Edelweis adalah melalui pengembangan wisata desa Edelweis.
- 2) Kondisi masyarakat sekitar Bromo Tengger Semeru masih sangat bergantung pada potensi sumber daya alam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, salah satu potensi sumber daya alam tersebut berupa bunga Edelweis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan upacara adat.
- 3) Sesuai dengan informasi pra penelitian bahwa pengembangan wisata desa Edelweis belum sepenuhnya berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti melaksanakan pengambilan data penelitian. Pada penelitian ini peneliti mendatangi situs-situs yaitu : 1) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2) Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan, 3) Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemoro Lawang, 4) Kantor Resort Penanjakan, 5) Kantor Resort Tengger Laut Pasir, 6) Desa Ngadisari, dan 7) Desa Wonokitri.

#### 4.4 Jenis dan Sumber Data

##### 4.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data dimana menurut Bungin (2011) jenis data terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut :

###### 1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang berasal dari narasumber sebagai informan yang diwawancarai yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemoro Lawang, Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama, Kepala/Staf Resort Penanjakan, Penyuluh Kehutanan, Kepala Desa Wonokitri, Ketua Kelompok “Hulun Hyang” Desa Wonokitri, Ketua kelompok “Kembang Tana Layu” Desa Ngadisari.

###### 2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti yang berasal dari dokumen dokumen diantaranya adalah buku-buku, laporan-laporan, majalah dan hasil penelitian yang berkorelasi dengan penelitian ini. Data diperoleh dari Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru diantaranya dokumen rencana strategis (Renstra) tahun 2015-2019, dokumen *role model* pengembangan wisata desa Edelweis berbasis masyarakat, Data LAKIP Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2018 dan data laporan kegiatan, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, data Biro Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo dan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

#### 4.4.2 Sumber Data

Menurut Bungin (2011) sumber data yang diperoleh bersumber dari objek penelitian. Sumber data pada penelitian ini berasal dari :

##### 1) Informan

Merupakan personal yang mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Penentuan informan dilakukan dengan *snowball sampling technique* yang menurut Wuisman (1991) yaitu peneliti menghubungi orang tertentu untuk memintai keterangan kepadanya, kemudian orang tertentu tersebut ditanyai lagi kiranya siapa yang menarik untuk dihubungi dan seterusnya. Apabila dengan menambah informan tetapi informasi yang diperoleh relatif sama, maka diartikan bahwa data sudah jenuh sehingga informan sudah cukup. Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemoro Lawang, Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama, Kepala/Staf Resort Penanjakan, Penyuluh Kehutanan, Kepala Desa Wonokitri, Ketua Kelompok "Hulun Hyang" Desa Wonokitri, Ketua kelompok "Kembang Tana Layu" Desa Ngadisari.

##### 2) Lokasi dan Peristiwa

Penelitian kualitatif maka peneliti mencermati secara langsung berbagai fenomena dan peristiwa yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah 1) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2) Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan, 3) Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemoro Lawang, 4) Kantor Resort Penanjakan, 5) Kantor Resort Tengger Laut Pasir, 6) Desa Wonokitri, dan

7) Desa Ngadisari. Disamping lokasi dan peristiwa yang bersifat formal, lokasi dan peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini bersifat non formal sepanjang data yang diperoleh masih dalam konteks penelitian dan dapat mendukung keperluan data.

3) Dokumen dan arsip

Data ini bersumber dari data data yang merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut bermanfaat sebagai pendukung fakta-fakta empirik. Dokumen tersebut diantaranya adalah dokumen rencana strategis (renstra) tahun 2015-2019, dokumen *role model* pengembangan wisata desa edelweis berbasis masyarakat, Data LAKIP Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2018 dan data laporan kegiatan, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, data Biro Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo dan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

#### 4.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasir (2011) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data terdiri dari :

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Menurut Faisal (1990) sebagaimana dikutip Sugiyono (2009) observasi

diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu observasi partisipatif (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*) dan observasi tak berstruktur (*unstructured observation*). Dalam hal ini peneliti cenderung memilih observasi partisipatif dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usman dan Akbar, 2009). Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer). Pelengkap teknik pengumpulan data penelitian lainnya dan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin sebagaimana dijelaskan oleh Usman dan Akbar (2009) yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Keunggulan dari jenis wawancara terpimpin ini adalah pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali, pemecahan masalah lebih mudah, memungkinkan analisis kuantitatif dan kualitatif, dan kesimpulan yang diperoleh lebih *realible*. Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada informan yaitu Kepala Bidang Pegelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemoro Lawang, Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama, Kepala/Staf Resort Penanjakan, Penyuluh Kehutanan, Kepala Desa Wonokitri, Ketua Kelompok “Hulun Hyang” Desa Wonokitri, Ketua kelompok “Kembang Tana Layu” Desa Ngadisari.

## 3) Dokumentasi

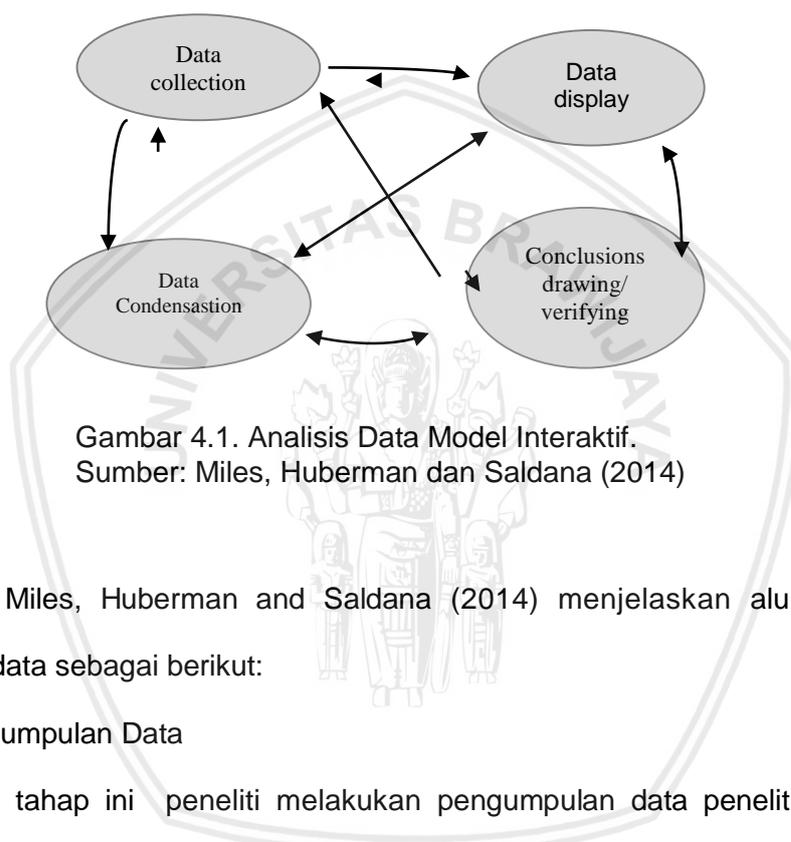
Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dengan cara pencatatan terhadap berbagai dokumen yang memperkuat data penelitian yang dilakukan dengan mencari dan menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen rencana strategis (renstra) tahun 2015-2019, dokumen *role model* pengembangan wisata desa edelweis berbasis masyarakat, Data LAKIP Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2018 dan data laporan kegiatan, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, data Biro Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo dan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

#### 4.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009:244). Dijelaskan lebih lanjut oleh Moleong (2018) bahwa proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Kemudian ditelaah dan selanjutnya dilakukan reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan terakhir penafsiran data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (*interaktive model of analysis*) dari Miles Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 4.1. Analisis Data Model Interaktif.  
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Miles, Huberman and Saldana (2014) menjelaskan alur kegiatan analisis data sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa dokumen, hasil wawancara, foto, dan observasi pada lokasi penelitian, yaitu di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

#### 2. Kondensasi Data

Pada tahap ini kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak, perubahan data yang berasal dari catatan peneliti di lapangan, data wawancara, dokumen, dan data-data empiris yang diperoleh dari lapangan. Peneliti melakukan kondensasi data dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian di tuangkan dalam bentuk

laporan atau uraian secara komprehensif dan terinci. Kemudian laporan atau uraian tersebut disederhanakan, dirangkum, dipilih pilih hal hal penting. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berjalan dan hingga pada tahap analisa yang lain yaitu penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

Pada tahap ini penyajian data yang paling sering dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Peneliti melakukan penyederhanaan informasi yang kompleks menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

### 4. Tahap Verifikasi Data / Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini verifikasi data, peneliti menyusun sebuah narasi dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk memastikan data-data tersebut benar-benar data yang valid maka data harus melalui pengujian kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya.

## 4.7 Keabsahan Data

Menurut Moleong (2018) keabsahan data dalam suatu penelitian adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi 1) mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedur dan kenetralan dari temuan keputusan-keputusannya. Pemeriksaan keabsahan data salah satunya dapat dilakukan dengan penggunaan teknik triangulasi.

Penggunaan teknik triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi pada saat pengumpulan data tentang kejadian dan

hubungan dari berbagai pandangan. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, dimana yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Teknik pemeriksaan data yang digunakan untuk keabsahan data berdasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1) Derajat kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan inkuiri sedemikian rupa untuk mencapai tingkat kepercayaan penemuan. Disamping itu, untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti dengan kenyataan ganda yang sedang diteliti (Moleng, 2018). Untuk mencapai derajat kepercayaan, maka peneliti menempuh upaya melalui:

- a. Observasi secara terus menerus sehingga penelitian yang dilakukan lebih cermat dan terinci.
- b. Melakukan triangulasi menggunakan sumber dengan melakukan komparasi antara hasil observasi dengan data wawancara, melakukan komparasi antara pandangan informan dengan informan lainnya, dan melakukan komparasi antara hasil wawancara dengan dokumen dokumen terkait dengan perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis.

2) Keteralihan (*transferability*)

Menurut Moleng (2018) bahwa konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Konsep

keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung kepada kesamaan semua konteks pengirim dan penerima. Dalam hal ini peneliti melakukan perekaman seluruh hasil penelitian yaitu berupa hasil observasi, hasil wawancara dan hasil studi dokumen. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dengan sedetail mungkin dan rinci dan dapat juga disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan gambar.

3) Kebergantungan (*dependability*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replika studi. Jika dalam dua kali atau beberapa kali dilakukan pengulangan studi dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dapat diartikan bahwa reabilitasnya tercapai (Moleng, 2018). Untuk mendapatkan standar ini, maka peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk menilai dan mengecek ketepatan dan ketelitian hasil penelitian.

4) Kepastian (*confirmability*)

Kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Hal ini diartikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, penemuan seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif, tetapi jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang maka dapat dikatakan objektif (Moleong, 2018). Scriven (1971) dalam Moleong (2018) menyatakan bahwa jika sesuatu itu objektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Pada kriteria ini, peneliti melakukan diskusi dengan informan-informan selama proses penelitian sehingga terjamin objektivitas dan kepastian data.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian didasarkan pada tiga fokus penelitian, yaitu: 1) perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, meliputi mekanisme perencanaan, identifikasi *stakeholders* dan rencana program kegiatan pengembangan wisata, 2) bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dan 3) faktor pendukung dan penghambat, terdiri dari: a) meliputi faktor pendukung, meliputi: faktor lingkungan (budaya), faktor perkembangan ilmu dan teknologi, faktor system yang digunakan dan faktor pendanaan, b) faktor penghambat meliputi: faktor lingkungan (sosial), faktor sumber daya manusia perencana, faktor lainnya yaitu dukungan perencanaan pemerintah daerah dan ego sektoral.

##### 5.1.1 Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis

###### 5.1.1.1 Mekanisme Perencanaan

Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan Balai Besar TNBTS yang mengacu pada kebijakan-kebijakan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disamping itu, perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis disusun sebagai upaya dalam pencapaian sasaran strategis Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019, lebih eksplisit pada pengelolaan Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari sebagai desa penyangga TNBTS yang didominasi oleh suku Tengger.

Masyarakat suku Tengger memiliki adat budaya yang berhubungan dan memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam hati di dalam kawasan. Oleh karena itu, Balai Besar TNBTS berkewajiban secara moral untuk berperan dalam menjaga keberlanjutan adat budaya masyarakat Tengger dan kelestarian alam hayati didalam kawasan. Disisi lain, perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis juga ditujukan untuk mengembangkan destinasi wisata baru diluar kawasan TNBTS. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meminimalisir dampak negatif dari *mass tourism* di dalam kawasan TNBTS.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Balai Besar TNBTS tertuang dalam Rencana Strategis Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019, mengacu pada visi pembangunan nasional 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019

Visi	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.</li> <li>2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga lingkungan hidup yang stabil dalam memberikan daya dukungnya, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan daerah aliran sungai yang sehat, Keanekaragaman hayati yang lestari, serta pengendalian perubahan iklim.</li> <li>2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, menjaga populasi jenis flora dan fauna, serta menghindarkan kepunahan <i>endangered species</i>.</li> <li>3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem, dengan indikator keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya alam.</li> </ol>

Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan potensi jasa lingkungan wisata alam dan air untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya masyarakat Suku Tengger.</li> <li>2. Melestarikan keseimbangan ekosistem ekosistem khas TNBTS (laut pasir, ranu, fungsi lindung kawasan), keanekaragaman hayati yang memiliki nilai konservasi tinggi dan mendukung pelestarian Suku Tengger.</li> <li>3. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan sumber daya manusia yang berkualitas.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan kesejahteraan masyarakat tradisional, serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam.</li> <li>2. Peningkatan populasi jenis satwa liar prioritas, menurunnya gangguan ekosistem dan keanekaragaman hayati;</li> <li>3. Peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (<i>Management Effectiveness Tracking Tool</i>) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.</li> </ol>
Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan dan pengamanan kawasan diprioritaskan pada penanganan masalah perambahan, pencurian, kebakaran.</li> <li>2. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem diprioritaskan pada ekosistem esensial sebagaimana diamanatkan dalam surat keputusan penunjukan yaitu perlindungan ekosistem laut pasir dan ranu, fungsi lindung kawasan dan perlindungan jenis-jenis yang menjadi prioritas perlindungan nasional yaitu elang jawa, macan, dan jenis-jenis yang dilindungi lainnya.</li> <li>3. Pemanfaatan potensi jasa lingkungan melalui pengembangan ekowisata dan peningkatan kunjungan wisman serta penataan pemanfaatan air. Sementara potensi keanekaragaman hayati seperti anggrek, tumbuhan obat, lumut jenggot, dan bambu akan dikembangkan secara bertahap.</li> <li>4. Peningkatan efektifitas tata kelola TNBTS penguatan pengelolaan berbasis resort (<i>Resort Based Management</i>), peningkatan kerjasama dan sinergi pengelolaan, penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui penguatan basis data dan sistem informasi, penataan kawasan dan evaluasi pengelolaan.</li> <li>5. Pengembangan daerah penyangga melalui peningkatan peran masyarakat Tengger dalam konservasi yang diprioritaskan pada daerah <i>enclave</i> Ranu Pani dan Ngadas serta desa-desa penyangga yang berbatasan dengan zona tradisional yang tersebar di 8 resort, yaitu Resort Jabung, Resort Pananjakan, Resort Tengger Laut Pasir, Resort Coban Trisula, Resort Ranu Pani, Resort Seroja, Resort Sumber, dan Resort Patok Picis.</li> </ol>

Sumber: Balai Besar TNBTS (2015)

Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019, terkait pengembangan daerah penyangga melalui peningkatan peran masyarakat Tengger (point no 5) telah diterbitkan Keputusan Kepala Balai Besar TNBTS Nomor SK.13/T8/BIDTEK/BIDTEK.1/PM/1/2019 tentang Penetapan Desa-Desa Penyangga di Sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di dalam keputusan tersebut menunjukkan bahwa desa-desa penyangga kawasan TNBTS terdiri dari 50 desa yang meliputi empat wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.

Tabel 5.2 Desa-Desa Penyangga di Sekitar TNBTS

No.	Kabupaten	No.	Kecamatan	No.	Desa
1	Malang	1	Tirtoyudo	1	Taman Satriyan
				1	Argoyuwono
				2	Taman Sari
		3	Pocokusumo	1	Sumberejo
				2	Gubugklakah
				3	Ngadas
		4	Wajak	1	Sumber Putih
				2	Bambang
				3	Patok Picis
		5	Tumpang	1	Benjir
		6	Jabung	1	Ngadirejo
				2	Taji
				3	Argosari
				4	Pandansari Lor
				5	Gading Kembar
	<i>Jumlah</i>	<i>6</i>		<i>15</i>	
2	Lumajang	1	Pronojiwo	1	Sidomulyo
				2	Sumber Urip
				3	Pronojiwo
				4	Oro-Oro Ombo
				5	Sapiturang
		2	Candipuro	1	Sumber Mujur

No.	Kabupaten	No.	Kecamatan	No.	Desa
		3	Pasrujambe	1	Pasrujambe
				2	Jambe Kumbu
		4	Senduro	1	Burno
				2	Kandang Tepus
				3	Wonocepokoayu
				4	Argosari
				5	Ranupani
		5	Gucialit	1	Gucialit
				2	Kertowono
				3	Pakel
	<i>Jumlah</i>	<i>5</i>		<i>16</i>	
3	Probolinggo	1	Sukapura	1	Ngadisari
				2	Ngadirejo
				3	Ngadas
				4	Wonotoro
				5	Sariwani
		2	Sumber	1	Ledokombo
				2	Pandansari
				3	Wonokerso
				4	Cepoko
		3	Lumbang	1	Sapuh
	<i>Jumlah</i>	<i>3</i>		<i>10</i>	
4	Pasuruan	1	Tutur	1	Blarang
				2	Kayu Kebek
				3	Ngadirejo
				4	Andonosari
		2	Puspo	1	Keduwung
		3	Tosari	1	Podokoyo
				2	Wonokitri
				3	Mororejo
		4	Lumbang	1	Wonorejo
	<i>Jumlah</i>	<i>4</i>		<i>16</i>	
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>4</b>		<b>50</b>	

Sumber: Balai Besar TNBTS (2019)

Penetapan desa desa penyangga sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru didasarkan pada pertimbangan untuk mengembangkan kemandirian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar TNBTS dalam

rangka mendukung kelestarian TNBTS melalui pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, dalam rangka untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian ALam.

Proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis meski sudah ditetapkan sebagai *role model* pada tahun 2017. Namun langkah langkah untuk menuju desa wisata desa Edelweis sudah berlangsung sejak lama. Sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNBGTS (BTR, L, 31):

“Pengembangan wisata desa Edelweis adalah salah satu misi Balai Besar TNBTS untuk menyelaraskan pengelolaan TNBTS dengan Budaya Tengger. Salah satu dasar untuk pengembangan desa Edelweis, karena sejak awal tahun 2014 kita sudah berhasil membudidayakan Edelweis dari biji di persemian Resort Tengger Laut Pasir. Kemudian kita juga telah melakukan uji coba konservasi ek situ tumbuhan edelweis melalui penanaman di lima sekolah disekitar Resort Tengger Laut Pasir pada akhir tahun 2014.” (Wawancara, 28 Agustus 2019).

Hal yang senada disampaikan Kepala Subbagian Program dan Kerjasama (AA, L, 38):

“Ini bukan proses pada tahun berjalan, tapi sudah dimulai sejak lama. Kenapa kok Edelweis karena salah satunya untuk keperluan adat masyarakat Tengger. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat masih mengambil dari dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terus bagaimana caranya agar tidak mengambil dari kawasan? Akhirnya petugas dilapangan berpikir bagaimana kalau dibudidayakan. Sehingga ketemu sinergi budaya religi dengan konservasi. Dan pada akhirnya ketemu aspek ekonomi ternyata bisa menjadi atraksi wisata.” (Wawancara, 5 September 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balai Besar TNBTS melaksanakan pengelolaan kawasan berpedoman pada Rencana

Strategi Balai Besar TNBTS tahun 2015-2019. Didalam rencana strategis terdapat sasaran strategis yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem ekosistem khas TNBTS (laut pasir, ranu, fungsi lindung kawasan), keanekaragaman hayati yang memiliki nilai konservasi tinggi dan mendukung pelestarian suku Tengger. Desa-desa yang berada di sekitar TNBTS ditetapkan sebagai desa-desa penyangga, sebagai dasar dalam pengelolaannya. Masyarakat suku Tengger sebagian besar hidup di wilayah penyangga kawasan TNBTS. Masyarakat Tengger memiliki adat budaya dan bergantung terhadap keberadaan sumber daya hayati yaitu tumbuhan Edelweis. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan adat budaya masyarakat Tengger dan kelestarian Edelweis, maka Balai Besar TNBTS melakukan upaya konservasi Edelweis yang diawali dengan merumuskan perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis.

Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis oleh Balai Besar TNBTS dilandasi oleh nilai penting Edelweis. Nilai penting tersebut terdiri dari tiga aspek. Pertama, aspek ekologi dimana Edelweis merupakan jenis tumbuhan dilindungi sehingga harus terjaga kelestariannya. Kedua, aspek sosial budaya dimana masyarakat Tengger memanfaatkan bunga Edelweis untuk keperluan adat yang tidak bisa digantikan dengan bunga jenis lain. Ketiga, aspek ekonomi dimana bunga Edelweis diperjual belikan oleh masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dikemas dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang diharapkan adalah untuk mencapai ketiga aspek tersebut. Selain itu sebagai sarana pembelajaran diantara pengelola kawasan konservasi dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis

Taman Nasional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Program dan Kerjasama Balai Besar TNBTS (AA, L, 38):

“Mekanisme teknokratik didasari oleh arahan pak Dirjen yang mengatakan kenapa ada *role model* ? karena tipologi kawasan berbeda beda. Sebagai contoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terdapat permasalahan kopi sedangkan Bromo dengan persoalan wisatanya sehingga dapat *share learning*. Apa yang ada di satu kawasan bisa untuk belajar di kawasan yang lain, siapa tahu kawasan tertentu itu punya permasalahan yang mirip tapi yang disana mampu terselesaikan dengan baik, itu proses teknokratik *scientific based* karena ada landasan ilmiah sebagai dasar *role model*.” (Wawancara, 5 September 2019).

Selanjutnya berdasarkan studi dokumen diketahui bahwa kajian ilmiah sebagai landasan dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhuardi Rheza Fauzi oleh dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 2015 tentang *Willingness to Pay* Bunga Edelweiss hasil budidaya Balai Besar TNBTS menunjukkan bahwa legalitas penjualan bunga edelweiss hasil budidaya di TNBTS mampu meningkatkan pendapatan masyarakat penjual bunga edelweiss 160-600 %.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Amanu Budi Setiyo dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 2015 tentang Etnobotani Edelweiss Masyarakat Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang menunjukkan bahwa Masyarakat Tengger untuk mendapatkan bunga Edelweis semakin lama semakin jauh masuk ke dalam kawasan TNBTS dari radius awal satu kilometer menjadi radius dua kilometer dari desa.

Selanjutnya dengan adanya arahan dari Direktur Jenderal KSDAE sebagaimana tertuang dalam surat nomor S.456/KSDAE/SET/REN.2/8/2017

berisi tentang arahan bahwa setiap Unit Pelaksana Teknis diwajibkan untuk melaksanakan satu paket program kegiatan atau disebut dengan *role model*. Adapun *role model* tersebut bertujuan untuk peningkatan kinerja dari seluruh Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal KSDAE, sebagai tindak lanjut berupa aksi nyata terhadap dinamika yang muncul di sekitaran kawasan konservasi. Selain itu ditujukan untuk membangun suatu organisasi lingkup Direktorat KSDAE dalam mengantisipasi dan penanggulangan ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi di dalam atau diluar kawasan/penyangga kawasan konservasi dan disertai dengan upaya pengembangan potensi yang ada. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perencanaan tersebut merupakan perencanaan *top-down*.

Langkah awal Balai Besar TNBTS dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis adalah dengan penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan berupa dokumen Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*) yang didalamnya berisi tahapan kerja/program, tata waktu pelaksanaan kerja/program, perencanaan kebutuhan biaya untuk mendukung kegiatan dan data hasil identifikasi mitra/stakeholders yang terlibat. Didalam arahan tersebut juga disebutkan bahwa jangka waktu *role model* tersebut wajib dan harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun pada tahun 2018 oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis dan wajib melaporkan progres dan hasil akhir *role model* kepada Direktur Jenderal KSDAE.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah I (M, L, 57):

“*Role model* itu mewajibkan setiap Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat KSDAE mempunyai program prioritas. Kepala Balai Besar TNBTS telah mengambil kebijakan berupa pengembangan wisata desa Edelweis sebagai *role model* dari

Balai Besar TNBTS. Langkah yang ditempuh salah satunya dengan menerbitkan Keputusan tim kerja *role model*.” (Wawancara, 4 September 2019)

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Resort Penanjakan (DPR, L, 53):

“Mekanisme *top down* karena adanya program *role model*, dimana Balai Besar TNBTS harus punya program unggulan yang harus dilaksanakan pada tahun 2018. Sehingga kami harus siap melaksanakan.” (Wawancara, 2 Oktober 2019).

Perencanaan *top down* di Balai Besar TNBTS, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Arahan Direktur Jenderal KSDAE tentang Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE wajib menyusun paket kegiatan (*role model*)
2. Koordinasi internal tingkat Balai Besar TNBTS
3. Perencanaan program
4. Penetapan program
5. Penetapan Tim Pelaksana

Mekanisme perencanaan berdasarkan arahan Direktur Jenderal KSDAE dan setiap Unit Pelaksana Teknis wajib membuat program *role model*. Respon Balai Besar TNBTS yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar kemudian melakukan rapat koordinasi internal dengan menghadirkan sumber daya manusia yang menaungi perencanaan dan pengelola teknis lapangan. Sumber daya manusia yang menaungi perencanaan terdiri dari pejabat struktural meliputi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Teknis Konservasi, Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan serta staf Balai Besar TNBTS. Sedangkan sumber daya manusia pengelola teknis lapangan terdiri dari pejabat struktural Kepala Bidang

Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, pejabat struktural Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan (non struktural), Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir (non struktural), pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan petugas di tingkat lapangan.

Hasil rapat koordinasi internal kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana. Dalam merencanakan didasarkan pada kajian ilmiah dan keberhasilan Balai Besar TNBTS dalam membudidayakan tumbuhan Edelweis. Disamping itu juga dengan pertimbangan keberhasilan dalam konservasi eks situ di sekolah sekolah di wilayah kerja Resort Tengger Laut Pasir, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemoro Lawang, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan. Langkah berikutnya dilakukan penetapan program pengembangan wisata desa Edelweis beserta tim kerja.



Gambar 5.1 Rapat koordinasi internal Balai Besar TNBTS

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar TNBTS Nomor SK.08/T8/BIDTEK/BIDTEK.2/1/2018 tentang Tim Kerja Pelaksanaan *Role Model*

Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat di Desa Penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menunjukkan bahwa tim kerja berjumlah dua puluh tiga orang terdiri dari pejabat struktural dan jabatan fungsional tertentu serta staf, sebagaimana berikut:

Tabel 5.3 Tim Kerja *role model* Pengembangan Wisata Desa Edelweis di desa penyangga TNBTS.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1	Ir. John Kenedie, MM 19601020 199003 1001	Kepala Balai Besar TNBTS	Pengarah
2	Ir. Pujiati 19630203 199003 2 003	Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar TNBTS	Penanggung jawab
3	Murdiyono, SH 19620228 199103 1003	Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I TNBTS	Ketua
4	Novita Kusuma W, S.Hut., M,AP., M.Env 19761125 200003 2 001	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar TNBTS	Sekretaris
5	Sarmin, S.Hut 19640409 198601 1 002	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I TNBTS	Koordinator Lapangan
6	Tatag Hari Rudhata, SH 19740509 199903 1 002	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II TNBTS	Anggota
7	Ir. Agus Dwiandono 19650817 199803 1 004	Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda Balai Besar TNBTS	Anggota
8	Birama Terang Radityo, S.Hut 19880504 201402 1 003	Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Pertama Balai Besar TNBTS	Anggota
9	Yohanes Cahyo Dwi Hartono, S.Hut 19720312 200003 1 005	Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda Balai Besar TNBTS	Anggota
10	Toni Artaka, S.Hut 19730912 200005 1 001	Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda Balai Besar TNBTS	Anggota
11	Elham Purnomo, S.Hut 19720429 200012 1 003	Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama Balai Besar TNBTS	Anggota
12	Ardian Widagdo, S.Hut., M.Sc 19810210 2006 1 002	Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda Balai Besar TNBTS	Anggota
13	Yuni Dian Sari, S.Hut 19730607 199903 2 003	Pengolah Data Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
14	Nina Puspita, S.Si 19900214 201402 2 004	Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Pertama Balai Besar TNBTS	Anggota

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
15	Nursidiq, S.Hut 19781110 199903 1 002	Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama Balai Besar TNBTS	Anggota
16	Siti Maya, A.Md 19810124 200501 2 016	Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan Balai Besar TNBTS	Anggota
17	Subur Hari Handoyo 19640527199301 1 001	Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir	Anggota
18	Sukaris 19711108 200812 1 001	Tenaga Pengaman Hutan Lainnya Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan	Anggota
19	Asmoro 19670804 201407 1 001	Pramu Kantor Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir	Anggota
20	Endrip Wahyutama, S.Ikom	Staf Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan Balai Besar TNBTS	Anggota
21	Poppy Sukma Herdiana, S.Hut	Staf Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar TNBTS	Anggota
22	Wiryo Harsono	Staf Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I TNBTS	Anggota
23	Wartono	Staf Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan	Anggota

Sumber: Balai Besar TNBTS (2018)

Dalam keputusan Kepala Balai Besar TNBTS tersebut tercantum tugas dan tanggung jawab tim kerja, yaitu:

1. Pengarah

Memberikan pengarah dalam pelaksanaan *role model* Pengembangan Wisata Desa Edelweis di desa penyangga TNBTS.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan *role model* Pengembangan Wisata Desa Edelweis di desa penyangga TNBTS.

3. Ketua

a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar TNBTS.
4. Sekretaris
    - a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan.
    - b. Membantu penyusunan laporan kegiatan
  5. Koordinator Lapangan
    - a. Megkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
    - b. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
    - c. Melaporkan progres kegiatan secara periodik kepada Ketua.
  6. Anggota
    - a. Membantu ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
    - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan *role model* Pengembangan Wisata Desa Edelweis di desa penyangga TNBTS.
    - c. Melaksanakan kegiatan kegiatan *role model* Pengembangan Wisata Desa Edelweis di desa penyangga TNBTS.
    - d. Melaporkan perkembangan *role model* Pengembangan Wisata Desa Edelweis di desa penyangga TNBTS.
    - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi *role model* Pengembangan Wisata Desa Edelweis di desa penyangga TNBTS.

Tim kerja disusun berdasarkan pertimbangan untuk optimaliasi pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya target kerja *role model* pengembangan wisata desa edelweis di desa penyangga TNBTS. Namun dalam perkembangannya tim kerja direvisi diakibatkan oleh adanya dinamika mutasi jabatan administratur (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV). Revisi

tentang perubahan tim kerja tertuang dalam Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Nomor: SK. 26/T.8/BIDTEK/BIDTEK.2/4/2018 tentang Revisi Tim Kerja Pelaksanaan *role model* Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat di Desa Penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis pada lingkup Balai Besar TNBTS dilaksanakan mulai dari level bawah keatas secara berjenjang. Hal ini dimaksudkan untuk menjangring masukan dan usulan dari level bawah, dimulai dari tingkat Resort Pengelolaan Taman Nasional Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Penanjakan Tengger Laut Pasir. Disamping itu, petugas lain di tingkat lapangan juga berkesempatan menyampaikan ide dan gagasannya. Hal ini dilandasi bahwa petugas di tingkat lapangan lebih memahami persoalan dan langkah-langkah solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Subbagian Program dan Kerjasama Balai Besar TNBTS (AA, L, 38):

“*Role model* dirapatkan secara berjenjang / bertahap. Petugas lapangan juga berperan dalam menyusun *Term Of Reference* dan Rancangan Anggaran Biaya dan hal lain apa yang perlu disiapkan” Dari lapangan kemudian ditampung dan didiskusikan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, dan selanjutnya ke Bidang Pengelolaan Taman Nasioanal Wilayah I terus di Balai.  
” (Wawancara, 5 September 2019).

Petugas lapangan yang bertugas di Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir bersama dengan penyuluh kehutanan TNBTS berkoordinasi dan menyampaikan ide dan gagasan. Kemudian secara berjenjang disampaikan ke Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, selanjutnya ke Bidang

Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan terakhir disampaikan ke kantor Balai TNBTS. Sebagaimana yang disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan TNBTS (BTR, L, 31):

Rencana pengembangan wisata desa Edelweis berangkat dari ide dan gagasan kami dan Resort, kemudian disampaikan ke Seksi kemudian ke Bidang Pengelolaan Wilayah I. Sehingga secara organisasi bukan hanya diinisiasi satu dua orang namun dimatangkan melalui personil yang ada dan siap untuk melaksanakan. Ide dan gagasan untuk pengembangan Edelweis tersebut dijadikan program Balai Besar TNBTS, selanjutnya keseluruhan rencana pengembangan wisata desa Edelweis menjadi tanggung jawab bersama” (Wawancara, 28 Agustus 2019).

Perumusan rencana pengembangan wisata Desa Edelweis pada lingkup Balai Besar TNBTS diuraikan sebagai berikut:

1. Petugas Resort Pengelolaan Taman Nasional Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir bersama dengan penyuluh kehutanan menggali informasi tentang Edelweis. Informasi tersebut diperoleh dari tokoh adat Tengger dan masyarakat Desa Wonokitiri dan Desa Ngadisari melalui pertemuan dengan metode *focus group discussion*.



Gambar 5.2 *Focus Group Discussion* petugas TNBTS dengan masyarakat Tengger

Disamping itu, Informasi tentang Edelweis juga diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penggalian informasi tersebut menunjukkan bahwa Edelweis sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Wonokitri dan NGadisari, terutama untuk kebutuhan adat. Sebagaimana disampaikan Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNBTS (BTR, L, 31):

“Model kita menggali kebutuhan masyarakat dari tokoh masyarakat, pertemuan dengan masyarakat, hasil penelitian dari akdemisi/mahasiswa untuk meneliti Edelweis dimanfaatkan sebagai apa. Dari penelitian diketahui bahwa masyarakat desa Ngadas mencari bunga Edelweis dengan radius 2 km dari desa, sehingga lama kelamaan bisa habis.” (Wawancara, 28 Agustus 2019).

2. Petugas di tingkat lapangan dalam hal ini Resort Pengelolaan Taman Nasional Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir bersama Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNBTS selanjutnya berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Wonokitri dan Pemerintah Desa Ngadisari.
3. Penyuluh kehutanan menyusun konsep perencanaan program kegiatan pengembangan wisata desa Edelweis.
4. Konsep perencanaan program kegiatan pengembangan wisata desa Edelweis yang telah disusun, setelah dikoordinasikan dengan Resort pengelolaan Taman Nasional Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir, kemudian disampaikan ke Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I.
5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I melakukan pembahasan konsep perencanaan program kegiatan pengembangan wisata desa Edelweis, selanjutnya di sampaikan ke Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I.

6. Konsep perencanaan program kegiatan pengembangan wisata desa Edelweis setelah melalui pembahasan di tingkat Bidang Pengelolaan Taman nasional Wilayah I kemudian disampaikan Ke Balai Besar TNBTS, untuk selanjutnya ditelaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Hasil telaah di tingkat Balai kemudian ditindak lanjuti untuk kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL) Balai Besar TNBTS.

Balai Besar TNBTS dalam merumuskan perencanaan mengacu pada indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Balai Besar TNBTS 2015-2019. Indikator kinerja kegiatan tersebut yaitu pembinaan desa penyangga kawasan dengan target kinerja sebanyak 2 desa yang dibina pada tahun 2018.

Dalam proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, koordinasi terus berjalan. Koordinasi tersebut dilakukan agar dalam merumuskan perencanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNBTS (BTR, L, 31):

“Kami selalu melaporkan progres rencana pengembangan wisata desa Edelweis. Kemudian untuk akselerasi, kami mengajukan dukungan pendanaan dengan koordinasi dengan Resort Pengelolaan Taman Nasional Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir. Kami juga konsultasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I. Pada tahun 2017 ada arahan *role model*, kemudian kami usulkan pendanaan untuk program di tahun 2018.”(Wawancara, 28 Agustus 2019)”

Terkait proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis juga disampaikan oleh Kepala Resort Penanjakan (DPR, L, 53):

“Kami sebagai petugas di lapangan setelah melalui diskusi dengan Penyuluh Kehutanan dan masyarakat juga berpartisipasi.

Karena kita tahu bahwa Edelweis sangat dibutuhkan oleh masyarakat suku Tengger, ya dalam hal ini adalah masyarakat desa Wonokitri. Dan saya kira juga sama teman teman yang bertugas di Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir.” (Wawancara, 2 Oktober 2019).

Selain memberikan kesempatan bagi level bawah pada lingkup Balai Besar TNBTS, dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis juga dilaksanakan dengan pelibatan masyarakat desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan dan desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pelibatan masyarakat dari dua desa tersebut diperlukan agar informasi yang disampaikan benar benar sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Disamping itu, pelibatan masyarakat sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenali potensi di wilayah masing-masing dan upaya apa yang harus dilakukan. Sehingga apa yang menjadi usulan nantinya dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Balai Besar TNBTS mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, sehingga disebut sebagai perencanaan *bottom-up*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Program dan Kerjasama Balai Besar TNBTS (AA, L, 38):

“Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis ini tentu melibatkan masyarakat, karena informasi juga muncul dari kelompok masyarakat *“mas aku ingin gini ke penyuluh penyuluh Balai Besar TNBTS, ayok kita mikir bareng, klo gini gimana”*. Maka setiap ide yang kuat, yang kemudian ide gagasan itu bisa prediktif dan jika ditindaklanjuti dan dikelola maka bisa bagus, termasuk desa Edelweis karena punya sejarah yang kuat yaitu konservasi budaya, religi, ekonomi, klo dikelola dengan baik maka wisatawan akan datang.” (Wawancara, 5 September 2019).

Masih terkait dengan hal yang sama juga disampaikan Penyuluh Kehutanan (BTR, L, 31):

“Dalam penyusunan program kegiatan, strategi yang dilakukan dengan menggali informasi tentang Edelweis termasuk kebutuhan masyarakat melalui tokoh masyarakat salah satunya tokoh Tengger. Untuk konfirmasi sebetulnya apa sih menurut masyarakat Tengger itu apa makna Edelweis? kemudian tergali informasi bahwa Edelweis memiliki peran penting untuk adat Tengger, sehingga sangat miris jika Balai Besar TNBTS melarang masyarakat Tengger mengambil Edelweis. Kemudian pemuda pemudi Tengger juga kepada penjual bunga Tengger. Apa sebenarnya akar masalahnya dan ide untuk solusinya.” (Wawancara, 28 Agustus 2019).

Masih terkait dengan penyusunan perencanaan program kegiatan ini senada sebagaimana yang disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNBTS (MR, L, 38):

“Dalam proses perencanaan program kegiatan hanya penyuluh kehutanan TNBTS yang berpikir untuk merumuskan kegiatan, selanjutnya diajukan ke Balai. Kemudian ditelaah di subaggian program dan kerjasama. Karena proses awal tergesa gesa dan perencanaan kurang matang, akhirnya ada kelompok yang kelembagaannya belum siap sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak maksimal.” (Wawancara, 3 September 2019).

Perencanaan program kegiatan pengembangan wisata desa Edelweis, semua konsep dirumuskan oleh Balai Besar TNBTS. Sedangkan pelibatan masyarakat terbatas pada penggalan informasi tentang Edelweis. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Hulun Hyang desa Wonokitri (TW, L, 35):

“Semua konsep rencana program kegiatan pengembangan wisata desa Edelweis berasal dari Balai Besar TNBTS kemudian ditawarkan ke masyarakat yang mau, kemudian disampaikan ke Pemerintah Desa. Kami dimintai informasi, bahwa Edelweis bukan sekedar bunga namun untuk masyarakat Tengger lebih ke faktor kebutuhan adat budaya dari nenek moyang yang tidak bisa digantikan dengan bunga yang lain. Keberadaan Edelweis pasti dibutuhkan, akan tetapi Edelweis adalah tumbuhan dilindungi. Atas dasar budaya adat maka Balai Besar TNBTS tidak dapat berbuat banyak karena hubungannya dengan kearifan lokal.

Jika tidak disiasati maka maka nanti berpotensi menimbulkan permasalahan.” (Wawancara, 2 Oktober 2019).

Infomasi terkait pentingnya Edelweis bagi masyarakat Desa Ngadisari juga dikemukakan oleh Ketua Kelompok Tani Kembang Tana Layu (SYD, L):

“Kami sebagai masyarakat Tengger memang masih memegang teguh adat dari nenek moyang. Nah, Edelweis ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk adat budaya, misal adat Karo dan semua adat memakai Edelweis.” (Wawancara, 27 Agustus 2019).



Gambar 5.3 Wawancara dengan ketua Kelompok Tani Kembang Tana Layu Desa Ngadisari

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar TNBTS dilakukan dengan dengan pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Perumusan perencanaan pengembangan wisata desa Edelwies secara *top-down* dilakukan oleh Balai Besar TNBTS berdasarkan arahan Dirjen KSDAE. Kemudian proses perencanaan disusun mulai dari level bawah pada lingkup Balai Besar TNBTS, yaitu dimulai dari Resort Pengelolaan Taman Nasional Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir. Selanjutnya secara berjenjang disampaikan ke Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, kemudian ke Bidang Oengelolaan Taman Nasional Wilayah I, dan terakhir hingga level Balai.

Dalam proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelwies juga telah melibatkan masyarakat. Merujuk pada hasil wawancara dengan ketua Kelompok Tani Hulun Hyang Desa Wonokitri dan ketua Kelompok Tani Kembang Tana Layu Desa Ngadisari, menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat hanya sebatas pada penggalian informasi tentang pentingnya Edelweis. Informasi tersebut berupa peranan Edelweis bagi masyarakat Tengger, salah satunya sebagai sesaji dalam upacara adat Tengger. Dengan demikian, perencanaan pengembangan wisata desa dengan mengakomodir partisipasi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari disebut sebagai perencanaan *bottom-up*.

#### 5.1.1.2 Identifikasi *stakeholders*

Dalam suatu perencanaan pengembangan pariwisata agar mencapai hasil yang optimal perlu adanya kerjasama dengan pihak pihak terkait lainnya. Demikian halnya dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis yang digagas oleh Balai Besar TNBTS. Proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak sehingga dapat mendukung dalam proses implementasi nantinya.

Peran dari pihak pihak terkait/*stakeholders* berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Hal ini diperlukan agar perencanaan akomodatif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dengan adanya peran pihak pihak terkait, maka semakin kaya informasi sebagai bahan pemikiran dalam penyusunan perencanaan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Subbagian Program dan Kerjasama (AA, L, 38):

“Dalam menyusun sebuah perencanaan kita melibatkan banyak pihak. Petugas dilapangan kita libatkan secara aktif. Dengan

kondisi Edelweis termasuk tumbuhan dilindungi maka ada mekanisme yang harus dilalui yaitu mengurus ijin penangkaran dan ijin edar ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Selain itu Pemerintah Desa menerbitkan SK Kelompok dan mendorong penerbitan Perdes, Pelibatan Pemda Probolinggo dan Pasuruan. Kita juga melibatkan LIPI namun *scope* yang lebih luas bukan focus Edelweis saja. Misal daya dukung *mass tourism berapa sih di penanjakan di laut pasir?* Kita juga menggandeng akademisi IPB, UGM, UB” (Wawancara, 5 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen menunjukkan bahwa *stakeholders* dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dinarasikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 *Stakeholders* dan Perannya dalam Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis

No.	<i>Stakeholders</i>	Peran dan Fungsi
1	Balai	<p><u>Policy Creator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan penelaahan draft usulan rencana program dari Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I</li> <li>2) Melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.</li> <li>3) Melaksanakan kegiatan supervisi/arahan tentang perencanaan dan penganggaran program kegiatan</li> <li>4) Melaksanakan koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.</li> <li>5) Melaksanakan koordinasi dengan Bupati Pasuruan dan Bupati Probolinggo.</li> <li>6) Menerbitkan kebijakan pendukung</li> </ol>
2.	Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I	<p><u>Koordinator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan penelaahan dan pembahasan usulan program kegiatan dari tingkat Seksi Pengelolaan Wilayah I</li> <li>2) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.</li> <li>3) Menyampaikan usulan rencana program kegiatan ke Balai</li> <li>4) Melaksanakan kegiatan supervisi terkait perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan ke Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan, Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir.</li> </ol>

No.	Stakeholders	Peran dan Fungsi
3.	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I	<p><u>Fasilitator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memfasilitasi usulan rencana program kegiatan hasil koordinasi Resort pengelolaan Taman Nasional wilayah Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir serta Penyuluh Kehutanan.</li> <li>2) Melakukan penelaahan dan pembahasan usulan rencana program kegiatan hasil koordinasi Resort pengelolaan Taman Nasional wilayah Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir serta Penyuluh Kehutanan.</li> <li>3) Melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan Tosari dan Kecamatan Sukapura</li> <li>4) Menyampaikan usulan rencana program kegiatan ke Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I.</li> <li>5) Melaksanakan kegiatan supervisi terkait dengan perencanaan pelaksanaan program kegiatan di Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan, Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir.</li> </ol>
4.	Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir	<p><u>Fasilitator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dengan tokoh adat, penjual bunga Edelweis, komunitas wisata, kelompok tani, pemuda pemudi Tengger di Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari</li> <li>2) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa Wonokitri dan desa Ngadisari</li> <li>3) Merencanakan program kegiatan bersama sama dengan Penyuluh Kehutanan TNBTS</li> <li>4) Menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan ke Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I.</li> </ol>
5.	Penyuluh Kehutanan	<p><u>Fasilitator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bekerja sama dengan Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan dan Kantor Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir untuk pengumpulan informasi dengan tokoh adat, penjual bunga Edelweis, komunitas wisata, kelompok tani, pemuda pemudi Tengger dan <i>stakeholders</i> lainnya di Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari.</li> <li>2) Melaksanakan kegiatan konsultasi ke pimpinan baik di tingkat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan</li> </ol>

No.	Stakeholders	Peran dan Fungsi
		Balai Besar TNBTS. 3) Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari.
7.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	<u>Akselerator:</u> 1) Melaksanakan penelitian secara komprehensif di kawasan TNBTS. 2) Menyampaikan rekomendasi pengelolaan TNBTS.
8.	Akademisi/Mahasiswa	<u>Akselerator:</u> 1) Melakukan penelitian tentang hasil budidaya yang menunjukkan legalitas penjualan bunga Edelweis hasil budidaya di TNBTS mampu meningkatkan pendapatan masyarakat penjual bunga edelweiss 160-600 %. 2) Melakukan penelitian tentang Etnobotani Edelweiss Masyarakat Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa untuk kebutuhan Edelweis, Masyarakat Tengger semakin lama semakin jauh masuk ke dalam kawasan TNBTS dari radius awal 1 km menjadi radius 2 km dari desa.
9.	Pemerintah Desa Wonokitri dan Pemerintah Desa Ngadisari	<u>Akselerator:</u> 1) Memberikan arahan kepada Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu. 2) Memberikan dukungan berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan "Kelompok Tani Hulun Hyang" dan "Kelompok Tani Kembang Tana Layu". 3) Memberikan dukungan material berupa lahan desa untuk budidaya pengembangan tumbuhan Edelweis.
10.	Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu	<u>Implementor:</u> 1) Menyampaikan informasi tentang adat budaya masyarakat Tengger kepada Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir dan Penyuluh Kehutanan 2) Berpartisipasi dalam budidaya Edelweis. 3) Melaksanakan koordinasi dengan Penyuluh Kehutanan TNBTS dan Petugas lapangan lainnya. 4) Sebagai pelaksana program pengembangan wisata desa Edelweis
11.	Tokoh masyarakat/Tokoh Adat, Pemuda-pemudi Tengger, ibu-ibu PKK	<u>Akselerator:</u> Memberikan informasi tentang adat budaya masyarakat Tengger dan arti penting bunga Edelweis bagi masyarakat Tengger.

No.	Stakeholders	Peran dan Fungsi
12.	Kecamatan Tosari dan Kecamatan Sukapura	<u>Akselerator:</u> 1) Memberikan dukungan moral kepada Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu 2) Koordinasi dengan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I
13	Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo	<u>Akselerator:</u> Memberikan dukungan moral dan dukungan material berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Edelweis
14	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur	<u>Akselerator:</u> 1) Melaksanakan koordinasi dengan Balai Besar TNBTS. 2) Memberikan supervisi/arahan kepada Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu terkait perijinan penangkaran. 3) Memberikan dukungan berupa penerbitan ijin penangkaran kepada Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu sebagai bukti legalias budidaya Edelweis diluar kawasan.

Sumber : Olahan hasil wawancara dan studi dokumen

Dari uraian diatas dapat diinterpretasikan bahwa *stakeholders* dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis berasal dari internal dan eksternal. *Stakeholders* internal adalah Balai Besar TNBTS beserta unit organisasi dibawahnya. Pada tingkat Balai berperan sebagai *policy creator*, koordinator dan fasilitator. *Stakeholders* eskternal yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, LIPI, tokoh masyarakat Tengger, Pemerintah Desa Wonokitiri, Pemerintah Desa Ngadisari, Kecamatan Tosari, Kecamatan Sukapura, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, akademisi/mahasiswa berperan sebagai akselerator. Berikutnya Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu sebagai implementor. *Stakeholders* memiliki peran dan fungsi masing-masing dan sangat diperlukan untuk memperoleh informasi secara komprehensif, sehingga

perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dapat berjalan secara efektif.

### 5.1.1.3 Rencana Program Pengembangan

Berdasarkan hasil studi dokumen terkait proses awal perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, diperoleh informasi bahwa Balai TNBTS telah melakukan identifikasi jenis tumbuhan edelweis di TNBTS sejak tahun 2006. Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa jenis Edelweis ada tiga jenis yaitu *Anaphalis javanica*, *Anaphalis longifolia*, dan *Anaphalis viscida*. Hasil identifikasi ditindak lanjuti dengan melakukan uji coba penanaman Edelweis berlokasi di desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2008-2013. Namun uji coba tersebut gagal dikarenakan adanya faktor alam berupa embun es yang melanda desa tersebut.

Balai Besar TNBTS melakukan uji coba kembali pada awal tahun 2014 dengan lokasi berbeda yaitu di Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir. Bibit Edelweis yang digunakan adalah bibit cabutan alam (F0). Dari uji coba tersebut menunjukkan hasil yang bagus dan selanjutnya berhasil membudidayakan Edelweis dari biji (F1) yang berasal dari budidaya Edelweis hasil cabutan dari alam. Pada tahun 2015-2016 kemudian dilakukan uji coba yang sekaligus sosialisasi penanaman Edelweis di kawasan desa penyangga yang dikemas dalam Taman Edukasi Edelweis. Lokasi penanaman yaitu di tujuh Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah Pertama wilayah Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat kunjungan dinas memberikan apresiasi atas keberhasilan pengembangan Edelweis tersebut,

kemudian diikuti dengan peresmian Taman Edelweis di TNBTS pada bulan Maret 2016 dan Agustus 2016. Selanjutnya Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginstruksikan Balai Besar TNBTS untuk melakukan upaya konservasi Edelweis dengan melibatkan masyarakat desa penyangga.

Berawal dari kronologis di atas dan adanya arahan *role model* dari Driektur Jenderal KSDAE yaitu setiap Unit Pelaksana Tenis wajib membuat satu paket kegiatan yang didasari permasalahan di masing-masing Unit Pelaksana Teknis, maka Balai Besar TNBTS menetapkan *role model* pengembangan wisata desa Edelweis. Dalam rangka mendukung keberhasilan *role model* tersebut, Balai Besar TNBTS merumuskan rencana program kegiatan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I (M, L, 57):

“Program kegiatan dalam rangka *role model* desa Edelweis ada pembentukan kelompok, penguatan kelompok, pelatihan budidaya Edelweis, pelatihan pengemasan menjadi souvenir, pengemasan wisata dengan mendatangkan nurdin Razak ahli ekowisata, festival Edelweis pada akhir 2018. Nanti lebih lengkap bisa dicek di dokumen.” (Wawancara, 4 September 2019).

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemorolawang (S, L, 55) :

“Terkait program yang dilakukan Balai Besar TNBTS dalam *role model* diantaranya identifikasi, pembentukan kelompok, pembibitan dan penanaman Edelweis, kemudian ada pembentukan kelompok penyusuan RKT kelompk, pelatihan budidaya Edelweis, pembuatan paket wisata Edelweis, festival land of Edeweis” (Wawancara, 26 Agustus 2019)

Berdasarkan studi dokumen, peneliti berhasil mendapatkan informasi bahwa rencana program kegiatan yang telah dirumuskan Balai Besar TNBTS

beserta dengan pendanaan terdiri dari dua belas rangkaian rencana program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rencana Program kegiatan Pengembangan wisata desa Edelweis

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Pendanaan
1	Identifikasi Desa Edelweis TNBTS	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 33.800.000,-
2	Pembentukan Kelompok Desa Edelweis	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 44.180.000,-
3	Penyusunan RKT Kelompok Desa Edelweis	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 22.740.000,-
4	Pendampingan Kelompok Desa Edelweis	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 28.980.000,-
5	Pembibitan Edelweis 2 Desa (12.320 bibit)	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 73.660.000,-
6	Penanaman Edelweis 11.200 bibit	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 46.600.000,-
7	Pemeliharaan Edelweis 11.200 bibit	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 14.560.000,-
8	Pelatihan Budidaya Edelweis	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 98.040.000,-
9	Workshop Pembuatan Paket Wisata Edelweis	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp 100.680.000,-
10	Promosi Land Of Edelweis TNBTS di Bandara Udara	Bandara Abdulrahman Saleh dan Bandara Juanda	Rp 200.000.000,-
11	Festival Land of Edelweis TNBTS	Desa Wonokitri	Rp 307.900.000,-
12	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Desa Edelweis	Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari	Rp14.100.000,-
TOTALPENDANAAN			Rp 985.240.000

Sumber: Balai Besar TNBTS (2017)

Bentuk rencana program kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar TNBTS, diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Identifikasi Desa Edelweis TNBTS*

Perencanaan identifikasi desa Edelweis dilakukan di dua desa yaitu desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan dan desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang akan menjadi dasar untuk pengembangan wisata desa Edelweis. Proses identifikasi Desa Edelweis dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat/masyarakat, pemuda desa dan ibu-ibu PKK serta *stakeholder* terkait. Kegiatan identifikasi ini dimaksudkan untuk menggali permasalahan dan untuk mempersiapkan desa Edelweis. Disamping itu dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ditemui nantinya.

#### 2. *Pembentukan Kelompok Desa Edelweis*

Terbentuknya kelompok desa Edelweis ditujukan sebagai penggerak masyarakat setempat dengan melibatkan pemuda pemudi desa dan ibu-ibu rumah tangga untuk pengembangan Edelweis di pekarangan rumah. Disamping bisa mengakomodasi para penjual souvenir Edelweis yang selama ini dijual secara sembunyi sembunyi untuk membantu meningkatkan perekonomian. Dalam pembentukan kelompok, Balai Besar TNBTS berperan sebagai fasilitator. Sehingga masyarakat lebih banyak berperan dalam proses pembentukan kelompok desa Edelweis diantaranya dalam penentuan nama kelompok, AD/ART, serta susunan pengurus kelompok dengan disahkan minimal oleh Pemerintah Desa dan TNBTS sebagai bukti legalitas kelompok.

### 3. *Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kelompok Desa Edelweis*

Pada prosesnya dilakukan secara partisipatif untuk menentukan kegiatan kelompok dalam mewujudkan Desa Edelweis dalam jangka waktu satu tahun. Perencanaan kegiatan dengan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan ide dan gagasan.

### 4. *Pendampingan Kelompok Desa Edelweis*

Dilakukan oleh penyuluh kehutanan Balai Besar TNBTS atau petugas lapangan lainnya untuk memberikan dukungan dan bimbingan terhadap kegiatan kelompok selama satu tahun. Selain itu bertujuan agar dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pengembangan wisata desa Edelweis.

### 5. *Pembibitan Edelweis 2 Desa (12.320 bibit)*

Perencanaan pembibitan ini untuk mendukung pengembangan desa Edelweis. Jumlah bibit yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan bibit Edelweis sejumlah 12.320 bibit.

### 6. *Penanaman Edelweis 11.200 bibit*

Bibit yang telah siap tanam yaitu bibit dengan umur minimal 3 (tiga) bulan. Penanaman dilakukan di 6 lokasi sebagai berikut:

Tabel 5.6 Lokasi penanaman bibit Edelweis

No	Lokasi Tanam	Desa Wonokitri	Desa Ngadisari
1	Pekarangan Penduduk, @ 15 batang x 300 KK	4.500 batang	4.500 batang
2	Tanah Desa	200 batang	200 batang
3	Halaman SD	100 batang	100 batang
4	Halaman SMP	50 batang	50 batang
5	Halaman SMA	150 batang	150 batang
6	Jalan Desa	600 batang	600 batang

Sumber: Balai Besar TNBTS (2017)

7. *Pemeliharaan Edelweis 11.200 bibit*

Pemeliharaan ini ditujukan untuk mengatasi gulma yang mengganggu pertumbuhan Edelweis dan pemupukan untuk menunjang pertumbuhan Edelweis. Pemeliharaan juga dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan pada musim kemarau.

8. *Pelatihan Budidaya Edelweis*

Pelatihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam membudidayakan Edelweis. Biji Edelweis dibudidayakan berasal dari kebun benih masing-masing desa. Budidaya Edelweis melalui biji diprediksi dapat menunjang wisata edukasi di desa Edelweis.

9. *Workshop Pembuatan Paket Wisata Edelweis*

Terdiri dari pelatihan berupa pembuatan souvenir bunga Edelweis, pelatihan pengemasan paket wisata Edelweis di desa, serta pelatihan pemasaran wisata edukasi budidaya Edelweis, wisata menanam Edelweis, wisata petik bunga Edelweis, wisata pemanfaatan bunga edelweiss dalam Budaya Tengger, swafoto dihamparan bunga Edelweis. Workshop ini dalam perencanaannya menghadirkan para pakar yang ahli di bidang pembuatan souvenir, pakar pengemasan produk, serta pakar pemasaran wisata. *Workshop* ini diharapkan mampu menghasilkan paket wisata Edelweis secara kongkret dan terkoneksi dengan perhotelan dan travel agen/ biro perjalanan wisata.

10. *Promosi Land Of Edelweis TNBTS di Bandar Udara*

Dilakukan dengan pemasangan bahan promosi berupa neon box di 2 (dua) bandar udara Abdulrahman Saleh di Malang dan bandar udara Juanda di

Sidoarjo. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi kepada setiap orang yang tiba dan berangkat dari kedua bandara udara tersebut baik orang/wisatawan lokal/nusantara maupun mancanegara/asing, sebagai *trigger* untuk mengunjungi kawasan wisata di TNBTS dan desa Edelweis. Kunjungan wisatawan ke desa Edelweis diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui pelayanan wisata dan penjualan souvenir bunga Edelweis.

#### 11. *Festival Land of Edelweis TNBTS*

Sebagai sarana peresmian dan *launching* dan sarana promosi pemasaran wisata desa Edelweis. Pada program ini dilakukan rangkaian kegiatan berupa peresmian dan *launching* Desa Edelweiss TNBTS; penyerahan sertifikat legalitas penjualan dan pemasaran bunga maupun paket wisata Edelweis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada desa Edelweis TNBTS; *talkshow* Land of Edelweiss TNBTS dengan menghadirkan akademisi, Balai Besar TNBTS/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerhati Konservasi/Lingkungan/ Edelweis; pemilihan duta Edelweiss TNBTS; kampanye dan pertunjukan *Land of Edelweiss* TNBTS; dan pertunjukan kesenian dan budaya Tengger.

#### 12. *Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Desa Edelweis*

Program ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan wisata desa Edelweis. Disamping itu untuk mengetahui permasalahan yang muncul sehingga dapat segera didarikan solusi yang tepat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu.

Balai Besar TNBTS mengalokasikan rencana program kegiatan untuk mendukung keberhasilan pengembangan wisata desa Edelweis. Namun kedepan perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menciptakan peluang baru demi menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Sehingga wisatawan tidak hanya terfokus pada objek wisata alam di dalam kawasan TNBTS, namun ada alternatif destinasi wisata lainnya yaitu desa Edelweis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Subbagian Program dan Kerjasama (AA, L, 38):

“Pengembangan wisata desa Edelweis berada diluar kawasan TNBTS, karena wisata didalam kawasan sudah sesak (*mass tourism*). Perlu diversifikasi pengembangan wisata penyangga agar memiliki spot wisata baru, agar wisatawan tidak terkonsentrasi di objek wisata TNBTS, misal Bromo dan Penanjakan. Dengan membuat paket wisata kuliner Tengger, tari budaya Tengger, wisata edukasi menanam Edelweis serta *story* kenapa Edelweis dilindungi, dan lain lain. Wisatawan yang biasanya cuma sehari naik “jeep” ke bromo akhirnya bisa menginap karena adanya diversifikasi objek wisata tersebut. Sehingga kawasan Bromo Tengger Semeru yang telah ditetapkan sebagai sepuluh bali baru dapat terwujud.” (Wawancara, 5 September 2019).

Lebih lanjut disampaikan Kepala Subbagian Program dan Kerjasama (AA, L, 38):

“Kebijakan didorong untuk menerbitkan perdes untuk secara legal dapat menarik karcis masuk desa Edelweis. Kasus menarik di Kalibiru Yogyakarta. Dulu hutan Produksi dan pemerintah beri ijin ke masyarakat untuk mengelola berupa menanam kemudian bisa diambil hasilnya dengan system bagi hasil. Namun dalam perjalanannya berubah menjadi kawasan lindung, dimana tanaman sudah tinggi, tajuk tanaman sudah rapat dan tidak bisa ditanami tanaman tahunan/tumpang sari. Dampaknya masyarakat gelisah karena tidak dapat memanen akibat perubahan status itu. Akhirnya masyarakat memikirkan cara lain yaitu wisata. Namun jangan dilihat sekarang yang sudah ramai dengan omset miliaran per tahun. Waktu itu masyarakat memikirkan wisata, orang lain mikir aneh. Akses jalan masih jelek, cm ada hutan mau lihat apa.” (Wawancara, 5 September 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa desa Edelweis Wonokitri dan desa Edelweis Ngadisari sebagai desa Edelweis diinisiasi Balai Besar TNBTS melalui proses yang tidak singkat. Balai Besar TNBTS merumuskan dua belas rencana program kegiatan dalam mendukung pengembangan wisata desa Edelweis. Rencana program kegiatan tersebut sebagai *trigger* bagi desa Edelweis Wonokitri dan Ngadisari dalam pengembangan wisata desa Edelweis. Selain fokus pada pemanfaatan Edelweis untuk kebutuhan adat budaya Tengger dan wisata desa Edelweis, selanjutnya dapat mengembangkan peluang-peluang baru yang dapat meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

#### **5.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis**

Suatu program pembangunan yang dilakukan dari atas ke bawah (*top down*) seringkali mengalami kegagalan. Salah satu alasan dari kegagalan adalah kurangnya keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam perencanaan, sehingga mengakibatkan masyarakat kurang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut. Balai Besar TNBTS dalam merencanakan pengembangan wisata desa Edelweis juga telah melibatkan masyarakat (*bottom-up*)

Berdasarkan data hasil wawancara, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, diwujudkan dalam dua bentuk partisipasi berupa: 1) Partisipasi Pemikiran, yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis yang ditunjukkan oleh kesediaan masyarakat desa Wonokitri dan masyarakat desa Ngadisari untuk

memberikan informasi dan mau berdiskusi dengan petugas Balai TNBTS terkait Edelweis. Informasi yang diperoleh adalah Edelweis sangat dibutuhkan masyarakat Tengger untuk sesaji adat dan sebagian masyarakat kurang mampu menjual Edelweis tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Hulun Hyang desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan (TW, L, 35):

“Edelweis selain tumbuhan yang dilindungi, Edelweis bukan sekedar bunga namun untuk masyarakat Tengger lebih ke faktor kebutuhan adat budaya dari nenek moyang yang tidak bisa digantikan dengan bunga yang lain. Namun keberadaannya yang pasti dibutuhkan akan menimbulkan masalah karena tumbuhan Edelweis dilindungi, dimana habitat tumbuhannya Edelweis mungkin tidak akan bertambah namun penduduk semakin bertambah, berkembang semakin banyak otomatis kebutuhan Edelweis semakin banyak..” (Wawancara, 2 Oktober 2019).

Selain partisipasi pemikiran yang berasal dari masyarakat desa Wonokitri, desa lain yang menjadi desa Edelweis yaitu desa Ngadisari juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua kelompok Tani Kembang Tana Layu desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo (SYD, L):

“Sebelum di bentuk kelompok, saya diundang informal oleh Penyuluh Kehutanan TNBTS untuk diskusi terkait Edelweis. Karena saya sudah terjun di bidang Edelweis. Edelweis ini dibutuhkan oleh masyarakat Tengger untuk adat budaya, misal adat Karo dan semua adat memakai Edelweis.” (Wawancara, 27 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat desa Wonokitri dan masyarakat desa Ngadisari memiliki kesediaan untuk menyampaikan informasi dan berdiskusi tentang Edelweis sebagai salah satu dasar dalam pengembangan wisata desa Edelweis. Informasi yang diperoleh tersebut sangat penting artinya dalam perencanaan pengembangan desa Edelweis karena

berasal dari masyarakat. Sehingga perumusan perencanaan akan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dua desa tersebut. 2) Partisipasi Keterampilan, yaitu partisipasi masyarakat yang diawali melalui upaya persuasif oleh Balai Besar TNBTS dan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk budidaya Edelweis. Proses ini dilakukan sebelum Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari ditetapkan sebagai desa Edelweis. Sebagian masyarakat menyambut baik kesempatan tersebut dengan melakukan uji coba budidaya Edelweis. Dalam uji coba tersebut dapat berhasil meskipun beberapa kali mengalami kegagalan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Hulun Hyang desa Wonokitri (TW, L, 35) :

“Pada waktu itu Penyuluh Kehutanan TNBTS menawari bimbingan untuk membudidayakan Edelweis. Awalnya kami kurang lebih 8 orang menyambut baik karena hal ini positif untuk menyediakan Edelweis tanpa mengambil di alam. Ini dilakukan dengan swadaya. Percobaan dilakukan berkali kali dan tidak jarang gagal, namun kami tetap semangat. Akhirnya kami bisa membuktikan bahwa kami bisa membudidayakan. (Wawancara, 2 Oktober 2019).

Masyarakat desa Ngadisari terkait dengan partisipasi ketrampilan, sebagian masyarakat sudah bisa budidaya sendiri. Dilakukan dengan menanam Edelweis di sekitaran rumah tinggal mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Kembang Tana Layu (SYD, L):

“Ada beberapa warga desa Ngadisari sudah bisa mengembangbiakkan Edelweis. Awalnya dengan mengambil bunganya lalu ditaburkan begitu saja di pekarangan rumah. Namun memang tidak banyak yang jadi. Tapi paling nggak kami sudah melihat bahwa Edelweis bisa dibudidayakan dengan biji (Wawancara, 27 Agustus 2019)

Selain data yang dihasilkan dari wawancara, peneliti melakukan observasi lapangan dan studi dokumen. Observasi dilakukan di lokasi

penelitian yaitu di Desa Ngadisari dan Desa Wonokitri. Observasi bertujuan untuk menemukan fenomena dan fakta yang ada di lapangan yang berkaitan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata desa Edelweis. Sedangkan studi dokumen dilakukan peneliti dengan menganalisis data pada dokumen-dokumen terkait dengan pengembangan wisata desa Edelweis.

Berdasarkan hasil obervasi peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Wonokitri memberikan dukungan sebagai wujud partisipasi masyarakat, dengan memberikan sebagian lahan desa untuk digunakan sebagai Taman Edelweis. Lokasi Taman Edelweis berjarak  $\pm$  1,3 kilometer dari pintu masuk objek wisata Gunung Bromo di Penanjakan, Wonokitri. Jika ditempuh dengan berjalan kaki memerlukan waktu 16 menit. Namun jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor hanya memerlukan waktu 4 menit saja. Kondisi akses jalan dari pintu masuk objek wisata Gunung Bromo menuju Taman Edelweis beraspal dan cukup bagus. Sarana transportasi sudah memadai yaitu tersedianya transportasi berupa “jeep” yang disewakan penduduk desa Wonokitri.



Gambar 5.4 Taman Edelweis di Desa Wonokitri

Taman Edelweis di kelola oleh masyarakat desa Wonokitri, khususnya oleh Kelompok Tani Hulun Hyang. Untuk mendampingi wisatawan yang datang berkunjung, Kelompok Tani Hulun Hyang memiliki interpreter sehingga pengunjung tidak hanya menikmati keindahan atraksi wisata, namun juga memperoleh edukasi tentang Edelweis. Kunjungan wisatawan berjumlah lebih dari 2000 orang sejak November 2018 sampai dengan penelitian ini dilakukan. Taman Edelweis dijadikan sebagai salah satu atraksi wisata dalam rangka pengembangan wisata desa Edelweis di Desa Wonokitri. Sarana prasarana dilokasi Taman Edelweis masih belum memadai, diantaranya tidak tersedianya MCK dan sarana ibadah bagi pengunjung muslim.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di desa Ngadisari, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Ngadisari juga mendukung dalam pengembangan wisata desa Edelweis. Dukungan tersebut sebagai wujud dari partisipasi masyarakat desa Ngadisari dengan memberikan sebagian lahan desa untuk dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya Edelweis. Lokasi budidaya Edelweis tersebut dipadukan dengan lokasi wisata rumah adat Tengger. Lokasi ini berjarak  $\pm$  3 kilometer dari pintu masuk objek wisata Gunung Bromo di Cemoro Lawang. Lokasi budidaya Edelweis terletak tidak jauh dari objek wisata Seruni Point yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Untuk menuju lokasi budidaya Edelweis Desa Ngadisari, dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dengan waktu tempuh  $\pm$  10 menit perjalanan. Sarana transportasi juga sudah memadai berupa penyewaan mobil "jeep" masyarakat desa Ngadisari. Kondisi akses jalan beraspal namun di beberapa bagian mengalami kerusakan. Lokasi Budidaya Edelweis di desa Ngadisasi dijadikan

sebagai atraksi wisata “Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger Desa Ngadisari”.



Gambar 5.5 Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger di Desa Ngadisari

Atraksi wisata tersebut dikelola oleh Kelompok Tani Kembang Tana Layu. Interpreter untuk mendukung atraksi wisata tidak ada. Sedangkan kunjungan wisatawan sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada. Sarana prasarana pendukung di lokasi atraksi wisata Edelweis di Desa Ngadisari belum memadai, diantaranya tidak tersedianya MCK, warung makan berjarak cukup jauh dari lokasi atraksi wisata dan tidak tersedia sarana beribadah khususnya bagi wisatawan muslim.

Disisi lain, hasil observasi juga menunjukkan bahwa Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknonologi dan infomasi salah satunya berupa media sosial Instagram. Tujuan dari penggunaan media sosial Instagram adalah sebagai sarana promosi wisata dengan biaya murah dan efektif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas, khususnya bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Media sosial Intagram dikelola oleh

Kelompok Tani Hulun Hyang dengan akun @hulun\_hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu Desa Ngadisari yaitu @kembangtanalayu.

Berikutnya berdasarkan studi dokumen berupa data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan tahun 2019, peneliti menemukan bahwa di Desa Wonokitri memiliki sarana penunjang pariwisata yaitu 30 penginapan, sarana ibadah yaitu 2 pura, sarana kesehatan berupa 1 puskesmas pembantu. Sedangkan berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo tahun 2019, sarana penunjang pariwisata di Desa Ngadisari yaitu 6 hotel non bintang, 79 *home stay*/penginapan. Namun di dua desa tersebut tidak terdapat fasilitas pendukung pariwisata lainnya, misalnya fasilitas ATM.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen, peneliti menginterpretasikan bahwa masyarakat desa Wonokitri dan Desa Ngadisari telah berpartisipasi dalam bentuk partisipasi pemikiran dan partisipasi keterampilan. Partisipasi masyarakat yang lain adalah melalui Pemerintah Desa dengan memberikan sebagian lahan milik desa untuk dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya Edelweis. Lokasi budidaya Edelweis tersebut dikembangkan masyarakat sebagai atraksi wisata. Untuk memberikan edukasi pengunjung atraksi wisata, kelompok tani hutan Hulun Hyang telah menyediakan interpreter. Sedangkan di desa Ngadisari belum tersedia interpreter. Dalam hal transportasi, masyarakat juga telah berpartisipasi melalui penyewaan mobil "jeep" bagi wisatawan yang ingin datang berkunjung. Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan dalam penyediaan sarana prasarana demi kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung meski masih terbatas. Disisi lain, bentuk partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu media sosial instgram sebagai sarana promosi wisata.

### 5.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pengembangan

#### Wisata Desa Edelweis

##### 5.1.3.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang ditemukan pada saat penelitian dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis sebagai berikut:

##### 1. Lingkungan (Budaya)

Faktor lingkungan memiliki pengaruh kuat terhadap suatu proses perencanaan. Budaya masyarakat Tengger menjadi pendukung dalam proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Masyarakat Tengger hingga saat ini masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan upacara adat Tengger, diantaranya adalah *kasada*, *sesanding* dan *entas entas*. Pada pagelaran prosesi adat Tengger, Edelweis menjadi salah satu bahan sesaji. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I (M, L, 57):

“Masyarakat Tengger itu hingga saat ini masih memegang kuat adat budaya mereka. Ada Kasada, ada entas entas, sesanding dan lainnya. Budaya Tengger adat ritual dari lahir hingga meninggal tidak lepas dari keberadaan Edelweis untuk kelengkapan acaranya.” (Wawancara, 4 September 2019)

Bunga Edelweis berperan penting dalam kehidupan masyarakat Tengger terutama digunakan untuk bahan sesaji dalam upacara adat. Jenis bunga ini tidak dapat digantikan oleh bunga yang lain, sehingga wajib ada untuk sesaji. Sesuai dengan uraian di atas dapat interpretasikan bahwa masyarakat Tengger masih memegang teguh adat budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian bunga Edelweis dibutuhkan pada setiap saat upacara adat. Oleh karena itu, faktor lingkungan dari sisi budaya menjadi faktor pendukung dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis.

## 2. Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini cukup pesat. Ilmu dan teknologi dalam proses perencanaan sangat berperan dalam proses perencanaan. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna akan mendukung dalam proses perencanaan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa Balai Besar TNBTS menggunakan aplikasi RKAKL-DIPA yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan.

Penggunaan aplikasi RKAKL-DIPA dilakukan pada proses akhir perencanaan di tingkat Balai. Data perencanaan yang diperoleh melalui pendekatan teknokratik, *top down* dan *bottom up* dan pendekatan partisipatif, selanjutnya ditelaah di tingkat Balai. Hasil telaahan menghasilkan data final yang kemudian diinput pada aplikasi RKA-KL. Out put yang dihasilkan dari aplikasi tersebut kemudian disampaikan ke pusat untuk penelaahan lanjut dan mendapatkan pengesahan. Disamping fungsinya untuk input data perencanaan, aplikasi RKA-KL digunakan untuk revisi data perencanaan. Revisi data perencanaan dilakukan jika dalam perkembangannya mengalami perubahan kebijakan anggaran atau perubahan dalam perencanaan pengelolaan TNBTS.

Pemanfaatan teknologi terbukti mempermudah bagi Balai Besar TNBTS dalam perencanaan pengelolaan TNBTS, khususnya perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor perkembangan ilmu dan teknologi sangat mendukung dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis.

## 3. Sistem Yang Digunakan

Sistem yang digunakan dalam hal ini diartikan sebagai kebijakan-kebijakan, mekanisme/prosedur yang digunakan sebagai landasan/pedoman

dalam perencanaan. Hasil studi dokumen terkait sistem yang digunakan pada perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar TNBTS adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
- 2) Kebijakan tentang *Role Model* melalui Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor 456/KSDAE/SET/REN.2/8/2017 setiap Unit Pelaksana Teknis diwajibkan melaksanakan satu paket kegiatan yang disebut dengan *Role Model* dan harus diselesaikan pada akhir tahun 2018 oleh masing masing Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
- 3) Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.456/KSDAE/Set/Ren.2/8/2017 tentang arahan role model pengembangan wisata desa Edelweis berbasis masyarakat di desa penyangga Balai Besar TNBTS, yang kemudian ditetapkan 2 (dua) desa binaan yaitu: Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan dan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
- 4) Keputusan Kepala Balai Besar TNBTS Nomor SK.08/T8/BIDTEK/BIDTEK.2/1/2018 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Role Model Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat di Desa Penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
- 5) Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Se.meru Nomor: SK. 26/T.8/BIDTEK/BIDTEK.2/4/2018 tentang Revisi Tim Kerja

Pelaksanaan Role Model Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat di Desa Penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

- 6) Keputusan Kepala Balai Besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor: SK. 110/K.2/BIDTEK.1/KSA/11/2018 tentang Izin Penangkaran Tumbuhan Dilindungi Undang Undang Jenis Edelweis (*Anaphalis javanica*) Generasi Kedua (F2) dan Berikutnya Kepada Kelompok Tani Desa Edelweis Wonokitri.
- 7) Keputusan Kepala Desa Wonokitri Nomor: 141/02/424/321.2.05/2018 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Desa Edelweis "Hulun Hyang".
- 8) Keputusan Kepala Desa Ngadisari Nomor: 141/13/2018 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Desa Edelweis "Kembang Tana Layu" Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pedoman Balai Besar TNBTS. Kebijakan kebijakan tersebut memuat prosedur, ketentuan dan tata cara, sehingga Balai Besar TNBTS dalam merencanakan pengembangan wisata desa Edelweis dapat berjalan dengan efektif dan akuntabel.

#### 4. Pendanaan

Pendanaan berperan penting dalam suatu proses pembangunan. Tanpa pendanaan maka proses pembangunan tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Hal sama jika pembangunan dengan dukungan pendanaan, namun jika dalam proses implementasinya tidak tepat maka pembangunan tersebut dapat berakibat terjadinya kegagalan. Balai Besar TNBTS memberikan *support* pendanaan dengan maksud untuk mengakselerasi pengembangan wisata Edeweis di desa Wonokitri dan desa Ngadisari. Diharapkan dengan dukungan

pendanaan tersebut dapat mendukung keberhasilan program. Seperti yang dikemukakan oleh Penyuluh Kehutan (BTR, L, 31):

“Pimpinan kami menyetujui desa Wonokitri dan desa Ngadisari sebagai *role model* desa Edelweiss dan akhirnya masuk dalam perencanaan dan anggaran. Kami yakini dalam pemberdayaan masyarakat itu adalah bahwa anggaran itu bukan segalanya. Banyak di tempat lain tempat anggaran bisa membuat kelompok terpecah, namun di waktu yang tepat anggaran itu dapat mengakselerasi keberhasilan program pemberdayaan. Waktu yang tepat dapat diketahui dengan pendampingan langsung, yakni dari nol hingga perjalanan waktu hingga tahu progres keberhasilannya.” (Wawancara, 28 Agustus 2019).

Senada dengan apa yang disampaikan Penyuluh Kehutan (MR, L, 38):

Perencanaan program yang diusulkan dari lapangan ditelaah dari segi Standar Biaya Umum di Subagian Program dan Kerjasama. Anggaran relatif tidak ada masalah. Usulan anggaran hampir bisa diakomodir oleh Subagian Program dan Kerjasama. Tergantung siap melaksanakan apa tidak karena kondisi sumber daya manusia Penyuluh Kehutan di TNBTS yang terbatas.” (Wawancara, 3 September 2019).

Selain dukungan pendanaan yang berasal dari Balai Besar TNBTS, Kelompok Tani Hulun Hyang mendapatkan dukungan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Indonesia dan Wanawiyata Kemnetrian Lingkungan Hidup dan Kehutan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Hulun Hyang Desa Wonokitri (TW, L 35):

“Bantuan pendanaan dari BBTNBTS dalam pengembangan wisata desa Edelweis hanya selama tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, kami sudah dilepas dan diharapkan bisa mandiri. Saat ini sudah dapat pendanaan dari CSR Bank Indonesi dan Wanawiyata KLHK.” (Wawancara, 2 Oktober 2019).

Hasil studi dokumen menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis didukung pendanaan sebesar Rp 985.240.000,-. Pendanaan tersebut dialokasikan ke dalam dua belas rencana program kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen tersebut dapat

disimpulkan bahwa faktor pendanaan merupakan pendukung dalam pengembangan wisata desa Edelweis. Disamping itu, pendanaan berasal dari CSR Bank Indonesia dan Wanawiyata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### 5.1.3.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis adalah sebagai berikut:

##### 1. Lingkungan (Sosial)

Kondisi sosial berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu. Faktor lingkungan dari aspek sosial pada perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis menjadi salah satu kendala. Motivasi dan kesadaran masyarakat Tengger untuk budidaya Edelweis relatif kurang. Meskipun Edelweis memiliki arti penting bagi masyarakat Tengger untuk keperluan ritual adat. Disamping itu masyarakat pada level ekonomi kurang mampu masih secara sembunyi sembunyi melakukan pengambilan Edelweis dari dalam kawasan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNBTS (BTR, L, 31):

“Mencari orang yang tepat dan sadar untuk mengembangkan edelweiss itu sulit, bukan hanya sekedar. Karena kalau nggak tepat jika pas kumpul ada dana jalan setelah itu bubar. Kesadaran internal kelompok di Ngadisari kurang kuat, sedangkan di wonokitri relatif kuat.”(Wawancara, 27 Agustus 2019)”

Lebih lanjut diungkapkan oleh Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNBTS (BTR, L, 31):

“Setelah kami berhasil melakukan riset membudidayakan Edelweis, kemudian kami baru menyampaikan masyarakat secara

pelan-pelan. Kepada masyarakat pelan pelan karena masyarakat masih punya resistensi. Kami juga memulai di lingkungan kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemorolawang, sekolah sekolah menanam dan berhasil. Bu menteri datang sebagai bukti tidak terbantahkan bahwa Edelweis dapat dibudidayakan asal kita mau, karena masyarakat untuk mencoba hal baru perlu bukti contoh yang berhasil dan bisa jadi desa desa lainya akan mengadopsi untuk budidaya Edelweis, seperti di desa Ngadas meski baru beberapa orang” (Wawancara, 28 Agustus 2019)

Senada dengan apa yang disampaikan Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNBTS

(MR, L, 38):

“Resistensi terhdap program itu juga cukup besar, karena masyarakat desa cukup makmur dengan hasil pertanian. Desa Ngadisari memiliki potensi penjualan Edeweis cukup bagus, namun masyarakat belum menyadari potensi tersebut. Sedangkan kesadaran masyarakat desa Wonokitri relatif cukup bagus sehingga Kelompok Tani Hulun Hyang masih berjalan.” (Wawancara, 3 September 2019).

Masih terkait dengan hal sama disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemorolawang (S, L, 55) :

“Kesadaran masyarakat dirasa masih kurang untuk budidaya tumbuhan Edelweis dikarenakan jasa wisata lebih menjanjikan. Misal menyewakan kuda dan jeep langsung menerima hasil. Namun budidaya Edelweiss butuh waktu dan proses panjang” (Wawancara, 26 Agustus 2019).

Kemudian disampaikan juga oleh Ketua Kelompok Tani Hulun Hyang (TW, L, 35) :

“Kesadaran masyarakat untuk pengembangan wisata desa Edelweis masih kurang. Harapan kami kedepan pendampingan tetep berlanjut dari pihak taman nasional dan pihak desa agar kedepan menjadi lebih baik”. (Wawancara, 2 Oktober 2019).

Dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat dalam perencanaan pengembangan desa wisata desa Edelweis relatif kurang. Kedepan perlu adanya pendampingan secara kontinyu oleh Penyuluh Kehutanan TNBTS atau Petugas lapangan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menggugah

kesadaran dan motivasi masyarakat untuk upaya konservasi Edelweis. Karena Edelweis memiliki peran yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Tengger.

## 2. Sumberdaya Manusia Perencana

Berdasarkan studi dokumen diketahui bahwa sumber daya manusia Balai Besar TNBTS seluruhnya berjumlah 173 orang. Terdiri dari 102 orang pegawai negeri sipil dan 71 orang tenaga kontrak. Sumber daya manusia dengan kategori pegawai negeri sipil terdiri dari:

- 1) Pejabat struktural, yaitu: eselon II berjumlah 1 orang, pejabat struktural eselon III berjumlah 3 orang, pejabat struktural eselon IV berjumlah 9 orang.
- 2) Pejabat Fungsional Tertentu, yaitu: Polisi Kehutanan berjumlah 19 orang, Pengendali Ekosistem Hutan berjumlah 14 orang, Penyuluh Kehutanan berjumlah 4 orang dan calon Arsiparis berjumlah 1 orang.
- 3) Pejabat Fungsional Umum/ Non Struktural berjumlah 51 orang

Sumber daya manusia di Balai Besar TNBTS tidak terdapat jabatan fungsional perencana. Tidak tersedianya jabatan fungsional perencana yang benar-benar memahami konsep dan teori tentang perencanaan, tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kualitas suatu perencanaan. Namun demikian disampaikan Kepala Subbagian Program dan Kerjasama (AA, L,38):

“Balai Besar TNBTS tidak ada jabatan fungsional perencana. Akan tetapi sumberdaya perencana tergantung pribadi masing masing, hal pokok yang harus dimiliki oleh perencana adalah *sense of belonging* rasa memiliki. Yang penting energi positif ditularkan, kerjasama ditingkatkan dan ada kemauan belajar, maka jika ada persoalan saya kira dapat diselesaikan, misalnya dalam hal perencanaan.” (Wawancara, 5 September 2019).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di Balai Besar TNBTS tidak ada jabatan fungsional perencana. Kondisi saat ini dilaksanakan oleh jabatan

fungsional umum atau jabatan fungsional tertentu, namun harus mampu berimprovisasi dengan tetap berpedoman pada kebijakan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian sebaiknya Balai Besar TNBTS memiliki jabatan fungsional perencana yang memiliki kompetensi, baik konsep maupun teori tentang perencanaan yang baik.

3. Tidak ada dukungan perencanaan pemerintah daerah.

Pembangunan agar dapat berjalan dengan baik memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara moril sangat mendukung. Akan tetapi jika dilihat dari sisi program belum ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemorolawang (S, L, 55) :

“Pemerintah daerah sangat mendukung untuk destinasi wisata baru dan selanjutnya belum ada *support* program dari pemda baru sebatas dukungan legalitas dalam bentuk SK Bupati untuk penetapan desa wisata. Kita sebagai pemicu / *trigger* harusnya ada *support* dari pemda, karena mekanisme kita adalah bantuan masyarakat dalam konsep pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara, 26 Agustus 2019).

Senada seperti yang diungkapkan oleh Penyuluh Kehutanan Balai TN BTS (BTR, L, 31):

“Kita melakukan pendekatan untuk dapat mendapat pengesahan desa Edelweis dari Pemerintah Daerah yang nantinya bisa sebagai dasar bagi Pemerintah daerah untuk program pendanaan. Harapan kami desa Edelweis bisa menjadi prioritas sehingga mendapat bantuan pengembangan selanjutnya.” (Wawancara, 28 Agustus 2019).

Disisi lain, hal yang senada terkait dukungan program oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo disampaikan oleh Ketua Kelompok Kembang Tana Layu (SYD, L):

“Harapannya ditindak lanjuti melalui Bappeda untuk dukungan selanjutnya. Namun kita juga maklum bahwa pemerintah daerah banyak hal yang diurus sehingga prioritasnya berbeda-beda.” (Wawancara, 28 Agustus 2019).

Tidak adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan wisata desa Edelweis di Desa Ngadisari, hal yang sama juga dialami dalam pengembangan wisata desa Edelwies di Desa Wonokitri. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Hulun Hyang (TW, L, 35):

“Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan selama ini sejak terbentuknya Kelompok Tani Hulun Hyang belum ada bantuan pendanaan”. (Wawancara, 2 Oktober 2019).

Peneliti kemudian melakukan studi dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Hasil menunjukkan bahwa permasalahan dan isu-isu strategis daerah di bidang pariwisata pada RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 sebagai berikut:

1. Pengelolaan infrastruktur penunjang wisata, kawasan wisata belum optimal. Disamping itu promosi wisata dan penyelenggaraan wisata masih kurang sehingga dampak yang ditimbulkan adalah minat wisatawan yang ingin berkunjung juga kurang.
2. Belum terwujudnya sinergitas kelompok pariwisata dalam hal ini adalah kelompok sadar wisata.
3. Pengelolaan daya tarik Kawasan Strategis Pariwisata Propinsi ataupun Kabupaten dan kota masih lemah dan kualitas serta kompetensi para pelaku usaha pariwisata dalam kategori masih kurang memadai.
4. Pelaku ekonomi kretaif belum terakomodir dan kualitas SDM peningkatan inovasi dan industri masih kurang memadai

Selanjutnya berdasarkan data Pagu Indikatif Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang termuat didalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, menunjukkan bahwa program pengembangan destinasi pariwisata dengan indikator peningkatan sarana dan prasarana ODTW yang sesuai dengan standar adalah 100 ODTW pada kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2018). Pada tahun 2019 alokasi target kinerja 10 ODTW, sedangkan pada tahun 2019 – 2023 tidak ada alokasi program pengembangan destinasi pariwisata. Alokasi pendanaan pada program pengembangan destinasi pariwisata pada RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 sebesar Rp 8.180.349.000,-. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen dapat disimpulkan bahwa tidak ada dukungan perencanaan tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan wisata desa Edelweis di desa Wonokitri.

Hasil studi dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-2023 menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan terkait pengembangan terhadap sektor strategis lainnya (sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata) masih belum optimal. Sedangkan Isu Strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 tentang peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar yang memperhatikan aspek penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan, yaitu belum optimalnya pengembangan dan penyediaan infrastuktur yang berkualitas dan memadai. Sedangkan di bidang pariwisata yaitu infrastruktur menuju destinasi wisata bagi masyarakat kurang memadai.

Berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mendapat alokasi pendanaan Rp 10.294.184.000,- pada tahun 2019. Sedangkan sedangkan pada

tahun 2019 – 2023 tidak ada alokasi program pengembangan destinasi pariwisata. Dengan demikian sesuai dengan hasil wawancara dan studi dokumen dapat disimpulkan bahwa tidak ada dukungan perencanaan tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam pengembangan wisata desa Edelweis di desa Ngadisari.

#### 4. Masih adanya ego sektoral

Ego sektoral hingga saat ini masih menjadi tantangan dalam pembangunan. Ego sektoral muncul salah satunya bisa diakibatkan dari perbedaan produk kebijakan/regulasi yang digunakan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara Kepala Subbagian Program dan Kerjasama (AA, L, 38):

“Pengembangan desa wisata harusnya di pemerintah daerah. Bisa dicek ke pemerintah daerah, apakah mereka melirik untuk mengembangkan desa Edelweis apa nggak ?” (Wawancara, 5 September 2019).

Masih terkait hal sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I (M, L, 57):

“Kita bukan membentuk desa wisata tapi menyediakan membantu pengembangan jika mau dijadikan desa wisata. Kalau pengembangan desa wisata adalah kewenangan Pemda programnya Dinas Pariwisata, Balai Besar TNBTS hanya memfasilitasi pengembangan Edelweis dan taman Edeweisnya saja. Misal Pemda Probolinggo yang nantinya dapat menggabungkan desa wisata edelweis Ngadisari dengan Seruni point yang ditetapkan oleh Bupati Probolinggo. Sedangkan desa Wonokitri bisa ditetapkan desa wisata budaya oleh Bupati Pasuruan” (Wawancara, 4 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masih terdapat ego sektoral dalam pengembangan wisata desa Edelweis . Balai Besar TNBTS mengusung konsep pemberdayaan masyarakat dalam

perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, produk kebijakan sebagai acuan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Hal ini berbeda dengan pemerintah daerah yang menggunakan produk kebijakan berupa Peraturan Bupati. Hal ini terlihat pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang berpedoman pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 51 tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Probolinggo.

## **5.2 Pembahasan**

### **5.2.1 Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis**

#### **5.2.1.1 Mekanisme Perencanaan**

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang konservasi (perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan), Balai Besar TNBTS berpedoman pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan Rencana Strategis Balai Besar TNBTS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, perencanaan di Balai Besar TNBTS terdiri dari: 1)

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNBTS disusun untuk jangka waktu sepuluh tahun. Penyusunan rencana didasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dalam zona/ blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah, 2) Rencana Jangka Pendek merupakan penjabaran lebih detil dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif untuk jangka waktu satu tahun.

Disisi lain, Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE untuk jangka waktu lima tahun. Didalam Rencana Strategis Balai Besar TNBTS 2015-2019, memuat sasaran strategis salah satunya yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem ekosistem khas TNBTS (laut pasir, ranu, fungsi lindung kawasan), keanekaragaman hayati yang memiliki nilai konservasi tinggi dan mendukung pelestarian Suku Tengger.

Masyarakat suku Tengger adalah suku yang mendominasi desa-desa penyangga kawasan TNBTS. Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar TNBTS Nomor SK.13/T8/BIDTEK/BIDTEK.1/PM/1/2019 tentang Penetapan Desa-Desa Penyangga di Sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, desa penyangga kawasan TNBTS berjumlah 50 desa yang meliputi empat wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Penetapan ini didasarkan atas pertimbangan untuk mengembangkan kemandiran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar TNBTS dalam rangka mendukung kelestarian

TNBTS melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungannya terhadap sumber daya hayati di dalam kawasan TNBTS.

Kehidupan masyarakat Tengger yang mendiami desa-desa penyangga kawasan TNBTS bergantung pada sumber daya alam kawasan TNBTS, terutama Edelweis. Peranan penting Edelweis meliputi 3 aspek, yaitu aspek ekologi, sosial budaya dan aspek ekonomi. Dari aspek ekologi, yaitu Edelweis merupakan jenis tumbuhan yang dilindungi sehingga kelestariannya harus tetap terjaga. Aspek sosial budaya, yaitu Edelweis memiliki peran penting bagi adat budaya masyarakat Tengger untuk kelengkapan sesaji adat yang tidak bisa digantikan dengan jenis bunga yang lain. Aspek Ekonomi, yaitu Edelweis dapat dibudidayakan dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup namun tetap dengan memperhatikan regulasi yang berlaku.

Selanjutnya Balai Besar TNBTS melakukan upaya konservasi Edelweis secara in situ dan konservasi ek situ. Konservasi in situ dilakukan dengan pengembangbiakan di dalam kawasan, yaitu di lokasi Bukit Cinta seluas satu hektar di wilayah kerja Resort Gunung Pananjakan, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Pasuruan. Sedangkan konservasi ek situ melalui budidaya penangkaran di desa binaan di sekitar kawasan melalui program pengembangan wisata desa Edelweis, dengan sasaran program yaitu Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Disamping itu, pengembangan wisata desa Edelweis di Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari berpotensi sebagai destinasi wisata baru di luar kawasan TNBTS. Sehingga kunjungan wisatawan tidak hanya terfokus pada objek wisata

alam Bromo dan bukit Penanjakan. Selanjutnya dapat meminimalisir dampak negatif berupa kerusakan ekosistem di dalam kawasan TNBTS akibat dari peningkatan kunjungan wisatawan (*mass tourism*).

Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengembangan wisata desa Edelweis. Perencanaan merupakan bagian penting sebagai pedoman agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Tjokroamidjojo (1995) mendefinisikan perencanaan sebagai proses dalam mempersiapkan secara sistematis suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Abe (2005) mengungkapkan bahwa perencanaan dalam kerangka pemerintahan diartikan sebagai bagian dari instrument pembangunan sebagai upaya untuk mengubah posisi dan kondisi masyarakat untuk mencapai situasi yang lebih baik dan bermakna. Selanjutnya menurut Diana Conyers dan Peter Hills dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan: "*Planning is a continuous process which involves decisions, or choice, about alternative ways of using available resources, with the aim of achieving particular goal at some time in the future*". Pengertian tersebut bisa diartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.

Proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis melalui proses yang tidak singkat. Diawali dengan penggalian informasi tentang Edelweis oleh Penyuluh Kehutanan TNBTS dan petugas lapangan lainnya. Informasi tersebut menunjukkan bahwa peranan Edelweis sangat penting bagi masyarakat Tengger, terutama untuk keperluan adat diantaranya upacara adat *Kasada*,

*Sesanding* dan *Entas Entas*. Informasi diperoleh dari masyarakat desa Wonokitri dan desa Ngadisari, termasuk tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda pemudi Tengger.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, kemudian Penyuluh Kehutanan TNBTS dan petugas lain ditingkat lapangan melakukan uji coba budidaya Edelweis selama lima tahun sejak tahun 2008 hingga tahun 2013. Namun selalu gagal, karena lokasi uji coba yaitu di desa Wonotero Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo terjadi embun es. Uji coba terus dilanjutkan hingga akhirnya berhasil pada akhir tahun 2014. Keberhasilan dalam uji coba budidaya Edelweis ini menjadi modal bagi Penyuluh Kehutanan TNBTS dan petugas lapangan lainnya untuk meyakinkan masyarakat desa Wonokitri dan desa Ngadisari bahwa Edelweis bisa dibudidayakan.

Kemudian pada bulan Maret 2016 dan Agustus 2016 dalam agenda kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengapresiasi keberhasilan budidaya Edelweis dengan meresmikan Taman Edelweiss di TNBTS dan selanjutnya memberikan instruksi untuk melakukan budidaya Edelweis dengan melibatkan masyarakat desa penyangga. Instruksi ini tidak lain karena budidaya Edelweis adalah sebuah langkah dalam upaya konservasi Edelweis, melestarikan budaya Tengger serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sebuah perencanaan disusun berdasarkan mekanisme atau prosedur yang ada untuk pencapaian tujuan. Abe (2005) mengungkapkan bahwa sebuah perencanaan merupakan himpunan langkah untuk memecahkan persoalan dan kebutuhan masyarakat tersebut untuk mencapai maksud tertentu yang bisa diidentifikasi sebagai keadaan (posisi dan kondisi) yang lebih baik.

Dalam merumuskan perencanaan maka perlu memperhatikan hal hal penting, yaitu: gambaran mengenai situasi dan kondisi, kebutuhan dari masyarakat, tujuan dan target yang hendak dicapai, daya dukung dan sumber daya alam yang dimiliki. Langkah langkah detail yang akan dilakukan dan anggaran. Sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnell dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004) perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan- kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada

Berdasarkan informasi dari masyarakat terkait Edelweis, keberhasilan dalam budidaya Edelweis dan instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut selanjutnya dijadikan landasan dalam penyusunan perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Disamping itu, pada tahun 2017 diketahui bahwa Direktur Jenderal KSDAE menerbitkan kebijakan yang tertuang surat nomor S.456/KSDAE/SET/REN.2/8/2017 berisi tentang arahan bahwa setiap Unit Pelaksana Teknis diwajibkan untuk melakukan satu paket program kegiatan atau disebut dengan *role model* yang didukung dengan anggaran pada tahun 2018, sehingga kebijakan tersebut turut berkontribusi sebagai pertimbangan Balai Besar TNBTS dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis.

Disamping itu, Balai Besar TNBTS dalam merumuskan perencanaan berlandaskan kajian ilmiah (*scientific based*) melalui beberapa penelitian terkait Edelweis. Penelitian tersebut diantaranya adalah *Willingness to Pay* Bunga Edelweiss hasil budidaya Balai Besar TNBTS yang menunjukkan bahwa legalitas penjualan bunga Edelweis hasil budidaya di TNBTS mampu meningkatkan pendapatan masyarakat penjual bunga edelweiss 160-600 %.

Penelitian lainnya yaitu etnobotani Edelweis masyarakat Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa Masyarakat Tengger untuk mendapatkan bunga Edelweis semakin lama semakin jauh masuk ke dalam kawasan TNBTS dari radius awal satu kilometer menjadi radius dua kilometer dari desa.

Atas dasar tersebut, kemudian Balai Besar TNBTS menetapkan *role model* pengembangan wisata desa Edelweis dengan mengusung konsep pemberdayaan masyarakat. Kepala Balai Besar TNBTS selaku pimpinan selanjutnya melakukan koordinasi internal merencanakan pengembangan wisata desa Edelweis. Dalam koordinasi internal tersebut dihadirkan sumberdaya yang menaungi perencanaan dan teknis lapangan. Setelah melalui berbagai pertimbangan kemudian ditunjuk tim kerja pelaksana *role model* yang terdiri dari 23 orang melalui keputusan Kepala Balai Besar TNBTS. Dengan demikian perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar TNBTS disebut sebagai perencanaan *top-down*.

Merujuk pada Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan *top down* adalah perencanaan yang dilakukan dari atas ke bawah menurut jenjang pemerintahan. Dalam perspektif Wahyudi (2006), maka perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis sebagai perencanaan *top-down*, yaitu perencanaan yang aliran prosesnya berlangsung dari atas ke bawah dalam hirarki pemerintahan. Sedangkan dalam perspektif Faludi (1973) perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis sebagaimana diuraikan di atas, disebut sebagai *procedural theory* atau dikenal dengan *theory of planning*, yaitu bersifat pada keilmuan dengan mengembangkan teori yang bersifat umum, perencanaan

dianggap sebagai serangkaian prosedur untuk mencapai tujuan dan terdapat urutan logis yang harus diikuti untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang baik.

Perencanaan *top-down* berfungsi untuk menegaskan bahwa di beberapa daerah akan mempunyai proses pembangunan yang menunjang kepentingan nasional untuk waktu tertentu. Kelebihan dari perencanaan *top-down* adalah: 1) masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya peran pemerintah yang optimal, 2) hasil yang dikeluarkan bisa optimal dikarenakan biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah, dan 3) mengoptimalkan kinerja para pekerja dipemerintahan dalam menyelenggarakan suatu program.

Disisi lain, perencanaan *top-down* memiliki beberapa kelemahan, diantaranya: 1) masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah yang lebih dominan bila dibanding peran dari masyarakat itu sendiri, 2) masyarakat tidak bisa melihat seberapa jauh suatu program telah dilaksanakan, 3) peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir, 4) tujuan utama dari program tersebut yang hendaknya akan dikirimkan kepada masyarakat tidak terwujud dikarenakan pemerintah pusat tidak begitu memahami hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat, 5) masyarakat akan merasa terabaikan karena suara mereka tidak begitu diperhitungkan dalam proses berjalannya suatu proses, dan 6) masyarakat menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka

Proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis juga menunjukkan adanya kesempatan untuk menyampaikan usulan/gagasan dari

level bawah pada lingkup Balai Besar TNBTS. Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan dan Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tengger Laut Pasir bersama Penyuluh Kehutanan dan petugas lapangan lainnya menyampaikan usulan upaya konservasi Edelweis untuk dijadikan program *role model*. Usulan tersebut disampaikan secara berjenjang ke Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cemorolawang untuk dilakukan diskusi. Selanjutnya disampaikan ke Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I untuk dilakukan pembahasan. Hasil final dari Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I kemudian disampaikan ke Balai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan *top-down* dalam pengembangan wisata desa Edelweis sudah dilaksanakan cukup baik, dengan alasan bahwa masih ada kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasan bagi level bbawah pada lingkup Balai Besar TNBTS.

Proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis juga telah melibatkan masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari. Adanya pelibatan masyarakat tersebut selanjutnya disebut sebagai perencanaan *bottom-up*. Lincoln Arsyad (1999) dalam Nursini (2010) mengemukakan bahwa perencanaan *bottom up* merupakan perencanaan dimana arus informasi dari bawah atau dikenal dengan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*).

Sedangkan menurut Menurut Hadiwijoyo (2018) bahwa perencanaan partisipatif (*bottom-up*) adalah perencanaan yang dilakukan dengan pelibatan semua pihak untuk penyelesaian masalah dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan, menciptakan ras memiliki dan menciptakan aspirasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip pelibatan masyarakat secara langsung

hanya dapat dicapai jika masyarakat berperan serta dan ambil bagian dimulai dari sejak awal, proses dan pada tahap perumusan hasil. Sehingga adanya keterlibatan masyarakat tersebut bisa menjadi jaminan untuk suatu proses telah berjalan dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sebatas pada penggalian informasi tentang Edelweis. Langkah yang ditempuh melalui penggalian informasi dengan tokoh masyarakat, pemuda pemudi Tengger, penjual bunga Edelweis dan pertemuan dengan masyarakat untuk mendiskusikan tentang Edelweis. Sedangkan rencana program kegiatan dirumuskan oleh Balai Besar TNBTS. Seharusnya Balai Besar TNBRS melibatkan masyarakat sebagai sasaran pembangunan, untuk diberikan kesempatan seluas luasnya dalam pembuatan keputusan dan mengkoordinasikan rencana program kegiatan pengembangan wisata desa Edelweis. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memahami tentang permasalahan dan kebutuhan sehingga dapat menentukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa perencanaan *bottom-up* dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Kumar (2001) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan instrument penting dalam proses merumuskan rencana dan penerapannya. Perspektif Kumar (2001) menjelaskan lebih lanjut bahwa proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis disebut sebagai:

*“Decentralized planning connotes a better perception of the needs of local areas, makes better informed decisionmaking possible, gives a greater voice in decision-making to the people for whom the development is meant, and serves to achieve better co-ordination and integration among programmes enabling the felt needs of the people to be taken into account.”*

Ungkapan tersebut diartikan bahwa perencanaan terdesentralisasi merupakan upaya mengelola persepsi yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat setempat, membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tepat, memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam membuat keputusan oleh masyarakat sebagai sasaran pembangunan, untuk mencapai koordinasi dan integrasi antara berbagai program yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan dalam perspektif Islamy (2001) bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dengan alasan: 1) sebagai kesempatan bagi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari untuk membuat keputusan untuk solusi persoalan di kehidupan mereka dan untuk meminimalisir jarak pemerintah dengan rakyat, 2) memberikan edukasi politik sebagai landasan demokrasi selanjutnya masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari akan terampil untuk merumuskan kebutuhan dan kepentingan prioritas, dan 3) dampak dari adanya partisipasi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari bisa memperkuat kebersamaan masyarakat setempat. Berikutnya dalam perspektif Abe (2002) bahwa dampak yang muncul dengan melibatkan masyarakat langsung dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelwies, diantaranya adalah: 1) dapat menghindari manipulasi dalam perencanaan, dikarenakan dengan adanya partisipasi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari maka akan memperjelas kebutuhan yang menjadi kehendak masyarakat, 2) Dapat memberikan suatu nilai lebih pada pengakuan/legitimasi pada perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Dengan pelibatan masyarakat dalam jumlah semakin banyak maka

dalam perencanaan akan semakin baik, dan 3) meningkatkan kesadaran dan kemampuan politik di masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (4) dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional salah satu tujuannya adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 6 ayat (2), bahwa rencana kerja Kementerian Lembaga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam pada pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa rencana pemberdayaan masyarakat disinergikan dengan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) dan merupakan bagian dari rencana pengelolaan.

Namun realita yang terjadi menunjukkan bahwa perumusan rencana pengembangan wisata desa Edelweis tidak disinergikan dengan musrenbangdes, baik musrenbangdes di Desa Wonokitri atau musrenbangdes di Desa Ngadisari. Padahal musrenbangdes memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pengembangan wisata Edelweis. Kondisi demikian tentunya

tidak seirama dengan tujuan musrenbangdes sebagai sarana untuk sinkronisasi pendekatan *top-down* dengan *bottom-up* terkait dengan penetapan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa.

Disamping itu, didalam proses musrenbangdes dihadiri oleh Pemerintah Daerah. Sehingga perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis perlu disinergikan dalam musrenbangdes. Peneliti berpendapat bahwa perencanaan akan lebih baik lagi jika dilakukan sinergi dalam musrenbangdes, musrenbangcam dan musrenbangkab. Sehingga akan terwujud rencana yang tersinkronisasi dan tidak terjadi tumpang tindih antara perencanaan di Balai Besar TNBTS dengan perencanaan di Pemdes Wonokitri, Pemdes Ngadisari, Kecamatan Tosari, Kecamatan Sukapura, Pemkab Pasuruan dan perencanaan di Pemkab Probolinggo. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perencanaan *bottom-up* yang dilakukan oleh Balai Besar TNBTS belum berjalan dengan maksimal.

Dalam proses mensinergikan perencanaan dalam musrenbang, peran pihak-pihak terkait dan partisipasi masyarakat harus benar-benar diperhatikan dan diakomodir. Jika dalam musrenbang mengesampingkan peran pihak-pihak terkait dan partisipasi masyarakat, maka produk perencanaan yang dihasilkan tidak akan efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh Kumar (2001) sebagai berikut:

*“People participation in planning it is a sordid fact of reality that despite quite a few decades of economic planning and concerted efforts at revamping and reorganizing the administrative monolith, the notion of active participation and involvement of the people in the plan processes including plan formulation, implementation, monitoring has, by and large, remained a mere myth. This is inspite of the myriad pronouncements in the successive plan documents as well as in the policies and programmes put forth by Central and States Governments from time to time, with regard to involving people in the plan processes.”*

Ungkapan tersebut diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan adalah sesuatu suram dari kenyataan bahwa meskipun beberapa dekade perencanaan ekonomi dan upaya bersama dalam pembenahan dan penataan kembali administrasi monolit, gagasan partisipasi aktif dan keterlibatan orang-orang dalam proses rencana termasuk perumusan rencana, implementasi, pemantauan pada umumnya masih merupakan mitos belaka. Ini terlepas dari berbagai pernyataan dalam dokumen rencana berturut-turut serta dalam kebijakan dan program yang diajukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu, berkenaan dengan melibatkan orang dalam proses perencanaan.

Sedangkan dalam perspektif Abe (2005) bahwa suatu perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis akan baik jika perencanaan mampu secara tepat menetapkan pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Data informasi akan menjadi penentu, dimana data semakin akurat maka akan perencanaan yang disusun akan semakin baik.

Kumar (2001) juga mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan terdesentralisasi memiliki empat tujuan penting yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya peningkatan produktivitas dengan menggunakan sumber daya lokal secara efisien.
2. Membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
3. Upaya untuk menghapus tingkat kemiskinan dan meningkatkan kehidupan masyarakat.
4. Memperoleh profit dari pembangunan antara masyarakat dengan daerahnya.

Sedangkan pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dalam perspektif Abe (2005) akan

membawa dampak yaitu: 1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, 2) memberi nilai tambah bagi legitimasi rumusan perencanaan, dikarenakan semakin banyak masyarakat terlibat maka akan semakin baik, dan 3) meningkatkan kesadaran dan politik masyarakat

Kemudian dalam perspektif Conyers (1991) bahwa alasan utama partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis yaitu: 1) partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa kehadiran masyarakat maka program pengembangan wisata desa Edelweis yang dilaksanakan tidak akan optimal, 2) masyarakat akan lebih mempercayai program pengembangan wisata desa Edelweis apabila mereka dilibatkan pada setiap tahapan atau proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring. Dengan demikian, masyarakat lebih mengetahui seluk beluk program tersebut sehingga akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut, dan 3) merupakan hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri, dalam hal ini adalah pengembangan wisata desa Edelweis.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Segala sesuatu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendirian. Energi dari masyarakat khususnya di daerah pedesaan, selanjutnya masyarakat dapat berpartisipasi untuk pengembangan di wilayah masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam tahap perencanaan, namun harus terlibat dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Kumar (2001:17) bahwa:

*“In the planning cycle it is enough if participation is limited to just some kind of representation on some planning bodies. The involvement should be there at the pre-plan stage, plan formulation stage, at the level of implementation and finally at the level evaluation.”*

Dalam siklus perencanaan, partisipasi masyarakat tidak dibatasi hanya dalam hal perencanaan saja. Namun keterlibatan masyarakat harus ada dalam tahap pra perencanaan, tahap merumuskan rencana, pada tahap implemtasi dan terakhir adalah pada tahap evaluasi.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis secara *top-down*, dalam penerapannya masih ada kesempatan untuk mengajukan ide/gagasan bagi level bawah pada lingkup Balai Besar TNBTS, sehingga dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Sedangkan perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis secara *bottom-up* belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana program sangat terbatas, hanya dilakukan pertemuan antara masyarakat dengan Balai Besar TNBTS. Disamping itu, tidak ada sinergi perencanaan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Peneliti berpendapat bahwa dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis oleh Balai Besar TNBTS, partisipasi masyarakat perlu dibuka seluas-luasnya dan perlu ditingkatkan. Disamping itu perlu dilakukan dengan sinergi perencanaan melalui musrenbangdesa, musrenbangcam dan musrenbangkab agar terwujud perencanaan yang tersinkronisasi dan tidak terjadi tumpah tindih.

#### **5.2.1.2 Identifikasi Stakeholders**

Balai Besar TNBTS dalam merencanakan pengembangan wisata desa

Edelweis tidak sendirian, namun dengan melibatkan *stakeholder* terkait. Stakeholder adalah pihak-pihak yang dilibatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Freesman (1984) mendefinisikan bahwa *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Pada perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, *stakeholders* yang terlibat terdiri dari internal dan eksternal. Stakeholder internal adalah Balai, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Penanjakan, Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tenggara Laut Pasir dan Penyuluh Kehutanan TNBTS. Sedangkan *stakeholders* eksternal terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Sukapura, Pemerintah Desa Wonokitri, Pemerintah Desa Ngadisari. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Akademisi/mahasiswa, tokoh adat/tokoh masyarakat, Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu.

*Stakeholders* tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Merujuk pada pendapat Nugroho (2015) dapat diketahui bahwa *stakeholder* internal yaitu 1) Balai Besar TNBTS berperan sebagai *policy creator*, 2) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I sebagai koordinator, dan 3) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Resort Pengelolaan Taman Nasional Penanjakan, Resort Pengelolaan Taman Nasional Tenggara Laut Pasir dan Penyuluh Kehutanan sebagai fasilitator. *Policy creator*, yaitu sebagai pihak yang mengambil keputusan dan menentukan kebijakan. Koordinator, yaitu sebagai pihak yang

mengkoordinasikan dengan pihak lain yang terkait. Selanjutnya fasilitator, yaitu sebagai pihak yang berperan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran program.

*Stakeholder* eksternal berperan sebagai akselerator dan implementor. Akselerator pada perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis yaitu 1) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, 2) Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 3) Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 4) Kecamatan Tosari, 5) Kecamatan Sukapura, 6) Pemerintah Desa Wonokitri, 7) Pemerintah Desa Ngadisari, 8) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 9) Akademisi/mahasiswa, 10) tokoh adat/tokoh masyarakat. Akselerator berperan untuk mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Sedangkan implementor adalah pihak yang melaksanakan kebijakan program/kelompok sasaran. Sedangkan implementor yaitu 1) Kelompok Tani Hulun Hyang Desa Wonokitri, dan 2) Kelompok Tani Kembang Tana Layu Desa Ngadisari. Implementor berperan sebagai pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.

Dengan melibatkan *stakeholders* terkait maka perencanaan yang disusun akan lebih komprehensif mengakomodir pihak-pihak yang berkepentingan sehingga perencanaan yang dihasilkan juga semakin baik dan berkualitas. *Stakeholders* dalam pengembangan wisata desa Edelweis berperan penting untuk pencapaian keberhasilan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ariani dan Suryawan (2018), berdasarkan penelitiannya mengungkapkan bahwa perencanaan pengembangan kawasan di Pantai Lebih memerlukan setiap

pemangku kepentingan diperlukan untuk perencanaan pembangunan kawasan pariwisata agar berhasil.

Dalam perspektif Nugroho (2015) bahwa *stakeholders* dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis: 1) *Stakeholders* pemerintah berperan dalam mengembangkan kebijakan, termasuk didalamnya mencakup perundangan strategis misalnya adalah tata ruang konservasi hingga teknis dalam dalam hal pelayanan investasi. Kebijakan ini diperankan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Pemerintah juga berperan dalam menetapkan peraturan tentang batas wilayah, potensi, perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pengawetan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan berperan dengan menerbitkan Keputusan Bupati Pasuruan tentang Desa Edelweis Wonokitri. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 51 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Probolinggo, dimana didalam keputusan tersebut desa Ngadisari merupakan Desa Wisata, Adat Tengger dan Edelweis Seruni.

Disamping itu, Pemerintah Desa Wonokitri berperan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Wonokitri Nomor: 141/02/424/321.2.05/2018 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Desa Edelweis Hulun Hyang Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Pemerintah Desa Ngadisari dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ngadisari Nomor:141/13/2018 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Desa Edelweis Kembang Tana Layu Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Berikutnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Timur dengan menerbitkan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor: SK: 110/K.2/BIDTEK.1?KSA/11/2018 tentang Izin Penangkaran Tumbuhan Dilindungi Undang-Undang Jenis Edelweis (*Anaphalis javanica*) Generasi Kedua (F2) dan Berikutnya Kepada Kelompok Tani Desa Edelweis Wonokitri.

2) *Stakeholder* peneliti berperan sebagai sumber saran atau produk akademik yang digunakan sebagai salah satu bahan dalam merumuskan kebijakan. 3) *Stakeholder* Pengelola Taman Nasional, yaitu Balai Besar TNBTS berperan dalam operasional dilapangan dengan kompetensi, pengetahuan dan penguasaan data dan informasi serta kolaborasi dengan masyarakat untuk harmonisasi dalam aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi. 4) *Stakeholder* penduduk lokal, yaitu Kelompok Tani Hulun Hyang Desa Wonokitri dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu Desa Ngadisari berperan sebagai subjek dan objek. Dari sisi objek, maka penduduk lokal dapat dapat berpartisipasi dalam penyamapaian pola pikir, kelembagaan dan kearifan penduduk lokal dapat diadopsi dala suatu proses perencanaan. Sedangkan dari sisi objek, maka penduduk lokal dan lingkungannya membutuhkan perhatian dalam pengelolaan sehingga upaya upaya konservasi dapat mencapai tujuan dan bermanfaat bagi semua pihak. Freeman (1984) berpendapat bahwa “perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik maka komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan manfaatnya.”

### 5.2.1.3 Rencana Program Pengembangan Wisata

Dalam mendukung *role model* pengembangan wisata desa Edelweis, Balai Besar TNBTS menganggarkan Rp 985.240.000,- yang dialokasikan pada

dua belas program kegiatan, yaitu: identifikasi desa Edelweis, pembentukan kelompok desa Edelweis, penyusunan rencana kerja tahunan kelompok desa Edelweis, pendampingan kelompok desa Edelweis, pembibitan Edelweis di dua desa sejumlah 12.320 bibit, penanaman Edelweis 11.200 bibit, pemeliharaan Edelweis 11.200 bibit, pelatihan budidaya Edelweis, workshop pembuatan paket wisata Edelweis, *promosi Land Of Edelweis TNBTS* di Bandar Udara, *festival Land of Edelweis TNBTS* serta monitoring dan evaluasi pembinaan desa Edelweis

Program kegiatan tersebut bertujuan untuk mengakselerasi agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2016) menyebutkan bahwa pelaksanaan program dengan melakukan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di kawasan destinasi wisata utama, pembinaan melalui pelatihan, dan studi banding bertujuan untuk menunjang akselerasi pembangunan pariwisata daerah di Kabupaten Pekalongan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abe (2005) bahwa program berperan penting dalam mendukung perencanaan, karena perencanaan bukan hanya dilihat dari kualitasnya namun sebetulnya apa yang akan dilaksanakan.

Rencana program kegiatan pengembangan wisata desa Edelweis terbatas pada fokus konservasi Edelweis di Desa Wonokitri dan desa Ngadisari. Namun sebaiknya dua desa tersebut berkolaborasi dengan desa desa yang lain untuk membentuk kawasan wisata baru. Strategi dalam kolaborasi yang bisa dilakukan adalah membentuk desa desa sekitarnya destinasi wisata baru dengan keunikan yang berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadiwijoyo (2018) bahwa satu desa wisata pada umumnya tidak akan bisa memiliki seluruh atraksi wisata seperti alam, kesenian, budaya, *local knowledge* sehingga

sebaiknya berkolaborasi dengan desa desa sekitarnya membentuk kawasan wisata.

### **5.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengembangan Wisata Desa Edelweis**

Perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat akan mendorong dalam menghasilkan produk perencanaan yang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai instrumen dalam pembangunan tentu lebih memahami seluk beluk potensi dan permasalahan yang berada di daerahnya. Disisi lain, pelibatan masyarakat dalam suatu proses perencanaan pembangunan, maka mendorong masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki terhadap program-program pembangunan tersebut. Disamping itu, masyarakat akan merasa mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sehingga mendukung program-program yang telah disusun hingga pada implementasinya.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dalam perspektif Faludi (1973) disebut sebagai *substantive theory* atau bisa disebut dengan *theory in planning*, yaitu perencanaan lebih mengarah kepada pemahaman terhadap konsep dan metode yang sesuai yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terdapat penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain selanjutnya memberikan fleksibilitas dalam merumuskan permasalahan dan cara penyelesaian permasalahan tersebut sehingga lebih bersifat praktis.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh selama penelitian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa

Edelweis, yaitu: 1) partisipasi pemikiran dari masyarakat desa dan tokoh adat desa Wonokitri dan masyarakat desa Ngadisari membuktikan sangat membantu dalam proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Pemikiran tersebut berupa kesediaan masyarakat untuk memberikan informasi tentang Edelweis dan mau berdiskusi dengan petugas Balai TNBTS. Informasi tersebut diketahui bahwa masyarakat suku Tengger memiliki ketergantungan terhadap bunga Edelweis. Pemanfaatan bunga Edelweis yaitu untuk kelengkapan sesaji adat yang tidak bisa digantikan dengan bunga jenis yang lain. Disamping itu bagi masyarakat dalam golongan kurang mampu, bunga Edelweis dipetik kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari masyarakat dan tokoh adat desa Wonokitri dan desa Ngadisari menjadi dasar pertimbangan dalam upaya konservasi eksitu melalui pengembangan wisata desa Edelweis. Merujuk pada Huraerah (2008) maka partisipasi pemikiran diartikan sebagai partisipasi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari yang diwujudkan ke dalam aktifitas diantaranya adalah dalam pertemuan atau rapat untuk mendiskusikan tentang pengembangan wisata desa Edelweis, dan 2) partisipasi keterampilan, yaitu partisipasi keterampilan yaitu berupa keterampilan masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari dalam membudidayakan Edelweis. Keterampilan budidaya yang dimiliki ini sangat penting dalam mendukung perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Karena jika tidak ada keterampilan dalam budidaya Edelweis, maka perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis akan sia-sia dan pada implementasi nantinya akan mengalami kegagalan. Merujuk pada pendapat Huraerah (2008) maka partisipasi keterampilan merupakan kepiawaian yang

diberikan oleh masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari dalam suatu upaya untuk mendorong dalam pengembangan wisata Desa Edelweis.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan diwujudkan dalam berbagai bentuk partisipasi. Hakim *et al* (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tulungrejo Kota Batu dalam pengembangan desa wisata diwujudkan dalam bentuk partisipasi berupa partisipasi tenaga dan partisipasi harta benda. Sedangkan dampak yang diperoleh sangat positif yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka kesempatan pekerja dan adanya peningkatan terhadap nilai penjualan buah apel. Jika di bandingkan dengan hasil penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat berbeda.

Kiska *et al* (2019) dalam penelitiannya yang berjudul partisipasi masyarakat dalam *community based tourism* di desa wisata Puton Watu Ngelak Kabupaten Bantul, menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi tenaga yang merupakan partisipasi yang paling banyak dilakukan, partisipasi ide/gagasan, dan partisipasi materiil yang merupakan partisipasi paling sedikit dilakukan dikarenakan masyarakat masih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari hari daripada berpartisipasi materiil dalam aktifitas kegiatan wisata yang berupa harta atau uang. Jika di bandingkan dengan hasil penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat memiliki salah satu kesamaan yaitu pada bentuk partisipasi ide/gagasan.

Agiatama dan Ma'ruf (2018) dalam penelitiannya yang berjudul partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata (studi kasus Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto) diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata di desa Jembul Kecamatan

Jatirejo Kabupaten Mojokerto terdiri dari partisipasi pemikiran, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga dan partisipasi sosial. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi tenaga merupakan partisipasi masyarakat yang paling banyak dilakukan, sedangkan partisipasi yang paling sedikit dilakukan adalah partisipasi sosial. Jika dilakukan komparasi dengan penelitian ini, maka terlihat bahwa ada kesamaan partisipasi yaitu partisipasi pemikiran.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian dan studi dokumen, maka partisipasi masyarakat menurut perspektif Idarmanto (2017) disebut sebagai unsur-unsur untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan wisata desa Edelweis, yaitu:

1. Daya Tarik Wisata (*attraction*)

Pada tiap destinasi pariwisata mempunyai daya tarik yang berbeda-beda yang didasarkan pada kemampuan atau potensi yang dimiliki. sehingga dapat diartikan bahwa daya tarik wisata adalah salah satu unsur utama yang menjadikan daerah tersebut menjadi destinasi pariwisata. Dalam hal ini Taman Edelweis di Desa Wonokitri dan Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger di Desa Ngadisari sebagai daya tarik wisata buatan manusia (*man-made tourist attractions*). Daya tarik wisata sebaiknya memiliki keunikan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Daya tarik wisata sebagai unsur pariwisata yang mempunyai kekuatan tersendiri karena mampu memunculkan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata.

2. Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (*Amenities*)

Yaitu semua fasilitas-fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan tersebut berada di lokasi destinasi wisata. Dalam hal ini telah tersedia penginapan di desa Wonokitri dan Ngadisari untuk menginap di

lokasi destinasi, warung makan untuk kebutuhan makan dan minum juga telah tersedia. Sarana transportasi yaitu ketersediaan penyewaan kendaraan berupa mobil “jeep” selama di lokasi destinasi wisata. Namun untuk kebutuhan financing wisatawan, misalnya anjungan tunai mandiri belum tersedia di dua desa ini.

3. Kemudahan untuk Mencapai Destinasi Wisata (*Accesibility*)

Merupakan sarana yang dapat mempermudah wisatawan untuk mencapai Taman Edelweis di Desa Wonokitri dan Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger di Desa Ngadisari. Akses untuk menuju lokasi Taman Edelweis tidak jauh yaitu  $\pm 1,3$  kilometer dari pintu masuk objek wisata Gunung Bromo di Penanjakan, Wonokitri dan akses jalan sudah beraspal cukup bagus. Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger cukup jauh yaitu  $\pm 3$  kilometer dari pintu masuk objek wisata Gunung Bromo di Cemoro Lawang dan jalan sudah beraspal namun pada beberapa bagian mengalami kerusakan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah pemberian papan petunjuk menuju lokasi.

4. Keramah tamahan (*Ancillary = Hospitality*)

Hal ini terkait dengan manajemen destinasi wisata yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi. Dalam hal ini wujud partisipasi masyarakat yaitu Kelompok Tani Hulun Hyang sebagai pengelola Taman Edelweis di Desa Wonokitri dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu sebagai pengelola Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger di Desa Ngadisari. Destinasi wisata Taman Edelweis dalam pengelolaannya juga telah menyediakan interpreter. Unsur keramah tamahan menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap keberlanjutan wisata desa Edelweis. Keramah

tamahan akan berdampak pada perasaan wisatawan saat berkunjung, yaitu kesan yang diterima wisatawan bisa citra positif atau negatif. Dengan keramah tamahan yang baik tentunya akan menimbulkan citra positif baik wisatawan, sehingga kedepannya akan berdampak sebagai pemicu wisatawan lain untuk datang berkunjung. Oleh karena itu keramah tamahan menjadi unsur yang penting dalam pengembangan wisata desa Edelweis karena berkaitan dengan kesan dan kepuasan wisatawan yang datang berkunjung.

Disamping itu, partisipasi masyarakat berupa pemanfaatan teknologi informasi oleh Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu. Teknologi informasi dimanfaatkan oleh kedua kelompok tani tersebut untuk sarana promosi berupa pemanfaatan media sosial. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berupa sosial media Instagram. Kelompok Tani Hulun Hyang Desa Wonokitri memanfaatkan media sosial Instagram dengan nama akun *@hulun\_hyang*. Sedangkan Kelompok Tani Kembang Tana Layu Desa Ngadisari memanfaatkan media sosial Instagram dengan nama akun *@kembangtanalayu*. Dengan teknologi informasi maka mempermudah dalam promosi, sehingga lebih efektif dan mudah dikenal masyarakat sehingga dapat memicu wisatawan untuk datang berkunjung. Sebagaimana diungkapkan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004) bahwa perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat berakibat pada lahirnya berbagai ilmu baru dan aneka ragam temuan serta terobosan. Dalam hubungannya dengan masalah pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting dan berperan besar bagi upaya pencapaiannya.

Pengembangan wisata desa Edelweis dengan melibatkan masyarakat dalam perspektif Hadiwijoyo (2018) dapat diwujudkan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Perencanaan (*planning stage*) yaitu pelibatan masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari diantaranya terkait dalam hal mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif fasilitas dan rencana pengembangan wisata desa Edelweis.
2. Implementasi (*implementation stage*) yaitu pelibatan masyarakat diantaranya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan wisata desa Edelweis.
3. Nilai manfaat (*shared benefit*) yaitu perwujudan partisipasi masyarakat dalam peran dan posisinya untuk memperoleh nilai manfaat, baik secara ekonomi ataupun sosial budaya yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Wonokitri dan Desa Ngadisari diwujudkan dalam bentuk partisipasi pemikiran, berupa kesediaan dalam memberikan informasi dan berdiskusi dengan Balai Besar TNBTS terkait Edelweis dan partisipasi keterampilan berupa kemampuan masyarakat dalam budidaya Edelweis. Partisipasi masyarakat lainnya yaitu partisipasi sebagai unsur-unsur dalam pengembangan wisata desa Edelweis, yaitu 1) unsur daya tarik wisata (*attraction*), partisipasi masyarakat dengan membuat atraksi wisata Taman Edelweis di Desa Wonokitri dan Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger di Desa Ngadisari 2) Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (*amenities*), penyediaan jasa penyewaan mobil “jeep” untuk transportasi, warung makan dan penginapan 3) Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata (*accessibility*), akses jalan yang mudah dijangkau serta partisipasi

masyarakat dalam memberikan papan petunjuk menuju lokasi, dan 4) Keramah tamahan (*ancillary/hospitality*), Taman Edelweis dikelola oleh Kelompok Tani Hulun Hyang sedangkan Kampung Edelweis dan Rumah Adat Tengger dikelola oleh Kelompok Kembang Tana Layu. Kelompok Tani Hulun Hyang memberikan pelayanan wisata (*interpreter*) berupa edukasi tentang Edelweis kepada wisatawan yang berkunjung. Disamping itu, Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu dalam pengembangan wisata desa Edelweis memanfaatkan teknologi informasi berupa media sosial Instagram.

Perwujudan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam tiga tahapan penting yaitu perencanaan, implementasi dan nilai manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis sangat penting, sehingga keberhasilan dapat dicapai secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari.

### **5.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis**

#### **5.2.3.1. Faktor Pendukung**

##### 1) Lingkungan (budaya)

Budaya masyarakat Tengger sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan budaya Tengger dan kearifan local. Upacara adat masyarakat Tengger diantaranya adalah Kasada, Sesanding dan Entas Entas. Tana layu Edelweis jawa itu menjadi salah satu muatan sesaji. Bunga ini juga menjadi bahan pokok pembuatan *petra*, semacam boneka yang berfungsi sebagai

*pelinggih atman* yaitu tempat mempersemayamkan roh orang meninggal atau arwah leluhur yang diundang dalam suatu upacara. Dalam berbagai upacara adat Tengger yang melibatkan unsur mengundang arwah leluhur, selalu ada *petra*. Hal ini diartikan kebutuhan Edeweis bagi masyarakat Tengger cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk budidaya. Selanjutnya kebutuhan masyarakat Tengger terhadap Edelweis yang diikuti dengan budidaya, maka dapat mendukung dalam pengembangan wisata desa Edelweis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safy'i dan Suwandono (2015) menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata dengan pemberdayaan masyarakat dan membentuk desa wisata sebagai tujuan wisata sehingga keberlanjutan ekonomi masyarakat dapat terjaga. Selain itu adalah kelestarian ekosistem mangrove nilai-nilai adat budaya dan religi yang ada didalam masyarakat tetap terjaga kelestariannya. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004) menyatakan bahwa masalah budaya yang turut mewarnai kebiasaan masyarakat yang ada dalam suatu daerah tertentu juga mempunyai andil yang cukup besar terhadap perencanaan daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan dalam penyusunan perencanaan daerah.

## 2) Perkembangan ilmu dan teknologi

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi RKAKL-DIPA dilakukan pada proses akhir perencanaan di tingkat Balai. Data perencanaan yang diperoleh melalui pendekatan *top down* dan *bottom up* dan *pendekatan partisipatif*, selanjutnya ditelaah di tingkat Balai. Hasil telaahan menghasilkan data final yang kemudian diinput pada aplikasi RKA-KL. Out put yang dihasilkan dari aplikasi tersebut kemudian disampaikan ke pusat untuk

penelaahan lanjut dan mendapatkan pengesahan. Disamping fungsinya untuk input data perencanaan, aplikasi RKA-KL digunakan untuk revisi data perencanaan. Revisi data perencanaan dilakukan jika dalam perkembangannya mengalami perubahan kebijakan anggaran atau perubahan dalam perencanaan pengelolaan TNBTS.

Dengan demikian perkembangan ilmu dan teknologi mendukung dalam perencanaan pengelolaan TNBTS, khususnya perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Riyadi dan Bratakusumah (2004) berpendapat bahwa perkembangan ilmu dan teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembangunan. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah senantiasa harus mengikuti perkembangan yang ada, baik perkembangan di masyarakat maupun perkembangan ilmu dan teknologi. Lebih lanjut diungkapkan oleh Siagian (1995) dalam Riyadi dan Bratakusumah bahwa "jika orientasi para pengambil keputusan strategi berorientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung semakin meluas dan meliputi makin banyak segi dan proses organisasional. Namun kiranya para pengambil keputusan strategi itu harus menyadari pula bahwa dengan perkembangan teknologi yang secanggih apapun, orientasi manusia tetap sangat penting dikarenakan dengan kehadiran dan pemanfaatan teknologi yang paling canggih pun unsur manusia tetap penting."

### 3) Sistem yang digunakan

Sistem yang digunakan dalam hal ini diartikan sebagai kebijakan-kebijakan, mekanisme/prosedur yang digunakan sebagai landasan/pedoman dalam perencanaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat delapan kebijakan, terdiri dari dua kebijakan internal dan enam kebijakan eksternal.

Kebijakan internal yaitu Keputusan Kepala Balai Besar TNBTS Nomor SK.08/T8/BIDTEK/BIDTEK.2/1/2018 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Role Model Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat di Desa Penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Nomor: SK. 26/T.8/BIDTEK/BIDTEK.2/4/2018 tentang Revisi Tim Kerja Pelaksanaan Role Model Pengembangan Wisata Desa Edelweis Berbasis Masyarakat di Desa Penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Sedangkan kebijakan eksternal meliputi: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, Kebijakan tentang Role Model melalui Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor 456/KSDAE/SET/REN.2/8/2017 setiap Unit Pelaksana Teknis diwajibkan melaksanakan satu paket kegiatan yang disebut dengan Role Model dan harus diselesaikan pada akhir tahun 2018 oleh masing masing Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.456/KSDAE/Set/Ren.2/8/2017 tentang arahan *role model* pengembangan wisata desa Edelweis berbasis masyarakat di desa penyangga Balai Besar Keputusan Kepala Balai Besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor: SK. 110/K.2/BIDTEK.1/KSA/11/2018 tentang Izin Penangkaran Tumbuhan Dilindungi Undang Undang Jenis Edelweis (*Anaphalis javanica*) Generasi Kedua (F2) dan Berikutnya Kepada Kelompok Tani Desa Edelweis Wonokitri, Keputusan Kepala Desa Wonokitri Nomor: 141/02/424/321.2.05/2018 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani

Desa Edelweis “Hulun Hyang” dan Keputusan Kepala Desa Ngadisari Nomor: 141/13/2018 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Desa Edelweis “Kembang Tana Layu” Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Kebijakan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Disamping itu, menjadi faktor pendukung bagi Balai Besar TNBTS agar dalam implementasi nantinya dapat mencapai tujuan secara efektif dan akuntabel. Jika dilakukan perbandingan dengan penelitian Colina (2016) yang menyebutkan bahwa faktor sistem yang digunakan menjadi faktor pendukung dalam proses perencanaan pengembangan wisata daerah di Kabupaten Katingan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan 2008-2013 diketahui bahwa arah kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Katingan adalah: 1) Meningkatkan publikasi pariwisata daerah, 2) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan, dan 3) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya yang dilaksanakan melalui pembangunan pada fungsi-fungsi tersebut.

Faktor sistem yang digunakan dalam pengembangan wisata desa Edelweis adalah produk-produk kebijakan internal dan eksternal Balai Besar TNBTS. Adanya produk kebijakan tersebut sebagai landasan dan mempermudah tim kerja untuk implementasi di lapangan. Disamping itu faktor sistem yang digunakan didasarkan pada salah satu sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Balai Besar TNBTS 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah Melestarikan keseimbangan ekosistem ekosistem khas TNBTS

(laut pasir, ranu, fungsi lindung kawasan), keanekaragaman hayati yang memiliki nilai konservasi tinggi dan mendukung pelestarian Suku Tengger.

Merujuk pada pendapat Sjafrizal (2016), maka strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh Balai Besar TNBTS secara spesifik sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi, dapat dijadikan sebagai acuan bagi perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan yang baik. Selanjutnya dapat mendorong proses pembangunan secara lebih baik.

#### 4. Pendanaan

Tanpa Pendanaan maka pembangunan tidak akan dapat berjalan. Demikian juga dalam pengembangan wisata desa Edeweis. Balai Besar TNBTS memberikan *support* pendanaan dengan harapan dapat mengakselerasi pengembangan wisata Edeweis di desa Wonokitri dan desa Ngadisari. Pendanaan dalam mendukung pengembangan wisata desa Edelweis dimanifestasikan kedalam rencana program kegiatan. Hasil studi dokumen di Balai Besar TNBTS diketahui bahwa jumlah pendanaan sebesar Rp 985.240.000,- yang dialokasikan ke dalam dua belas rencana program kegiatan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Colina (2016) yang menunjukkan bahwa faktor pendanaan merupakan faktor penghambat dalam pengembangan wisata daerah di Kabupaten Katingan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran pada unit-unit yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pengembangan wisata daerah di Kabupaten Katingan. Menurut pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2004) bahwa setiap hasil perencanaan pembangunan daerah seyogyanya sudah diperhitungkan atau diperkirakan secara seksama mengenai berapa dan dari mana dana yang mendukungnya. Meskipun semua itu bersifat tentatif tetapi hal

tersebut penting dan perlu diperhatikan. Sedangkan Abe (2005) mengungkapkan bahwa "Penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan. Anggaran juga bisa bermakna sebagai sarana kontrol".

Sedangkan menurut pendapat Tosun (2000) dalam Adikampa (2017) mengemukakan bahwa adanya keterbatasan struktural berupa akses ke modal ekonomi/finansial yang masih minim menjadi salah satu kendala dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) di negara berkembang. Dijelaskan lebih lanjut oleh Muljadi dan Warman (2016) pembangunan dan pengembangan pariwisata sulit dilakukan karena belum memadainya anggaran untuk kegiatan promosi pariwisata.

### **5.2.3.2 Faktor Penghambat**

#### **1) Lingkungan (sosial)**

Edelweis memiliki arti penting bagi masyarakat Tengger untuk keperluan ritual adat. Masyarakat pada level ekonomi kurang mampu masih secara sembunyi sembunyi melakukan pengambilan Edelweis dari dalam kawasan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat Tengger dari kalangan mampu lebih banyak menjalankan usaha penyewaan jeep atau kuda sehingga langsung mendapatkan manfaatnya. Sedangkan dari golongan kurang mampu mengambil Edelweis di alam kemudian dijual. Petugas Balai Besar TNBTS sering memberikan peringatan dan teguran bahkan penindakan berupa hukuman pidana ringan namun mereka tidak jera. Kondisi demikian dapat diartikan bahwa motivasi dan kesadaran masyarakat Tengger untuk budidaya

Edelweis dalam rangka perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis relatif kurang.

Kondisi ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2016) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata di daerah Kabupaten Pekalongan masih belum memuaskan, tingkatan partisipasi masih dalam tingkatan partisipasi semu. Sedangkan hasil penelitian Safy'i dan Suwandono (2015) menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak adalah kondisi sumber daya manusia yang belum siap, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian sesuai dengan pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2004) bahwa kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program perencanaan pembangunan daerah, lebih lanjut dijelaskan bahwa partisipatif dari masyarakat secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah. Muljadi dan Warman (2016) juga berpendapat bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata terutama dinegara berkembang menemui kendala diantaranya adalah peran masyarakat dirasakan masih kurang, dengan alasan masyarakat masih menganggap bahwa dalam pembangunan kepariwisataan maka akan banyak berdampak negatif, diantaranya adalah pergaulan bebas dan perbuatan maksiat. Sedangkan Tosun dalam Adikampa (2017) mengemukakan pendapatnya bahwa adanya keterbatasan kultural berupa terbatasnya kapasitas masyarakat dan sikap apatis masyarakat lokal terhadap pariwisata mejnadi hambatan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) di Negara berkembang.

Balai Besar TNBTS dalam merumuskan rencana pengembangan wisata desa Edelweis dengan mengusung konsep pemberdayaan masyarakat sudah tepat. Jika merujuk pada pendapat Sulistiyani (2004), maka dalam pemberdayaan masyarakat di desa Wonokitri dan desa Ngadisari dapat dilakukan melalui tahapan: 1) tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku, yaitu proses untuk menuju perilaku sadar dan peduli sehingga kapasitas diri perlu ditingkatkan, 2) tahap transformasi, yaitu proses peningkatan kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan sehingga dapat berperan dalam pembangunan, dan 3) tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan, sehingga mampu berinisiatif dan inovatif untuk mengarah pada kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan salah satu upaya untuk menggugah kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan masyarakat secara kontinyu.

## 2) Sumber daya manusia perencana

Balai Besar TNBTS memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 173 orang terdiri dari 102 orang Pegawai Negeri Sipil dan 71 Tenaga Kontrak. Sumber daya manusia dengan kategori Pegawai Negeri Sipil terdiri dari jabatan struktural jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dan tidak tersedia jabatan fungsional perencana. Tidak tersedianya jabatan fungsional perencana yang benar-benar memahami konsep dan teori tentang perencanaan, tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, khususnya perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis. Disamping itu, rendahnya SDM masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari sehingga masih banyak masyarakat belum memahami maksud dan tujuan proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis.

Hasil penelitian Utami (2017) tentang pengelolaan kawasan pariwisata (studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata oleh Balai Besar TNBTS belum maksimal karena disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas ataupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap implementasi dari rencana yang telah dirumuskan. Sedangkan hasil penelitian Colina (2016) tentang perencanaan dalam pengembangan wisata daerah di Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa sumber daya manusia perencana juga menjadi faktor penghambat pada proses perencanaannya.

Memperhatikan pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2004), maka peran sumber daya manusia perencana di Balai Besar TNBTS menjadi penting sekali sebagai motor penggerak perencanaan. Peranan seorang perencana pembangunan berbeda dengan perencana-perencana lain yang hanya melaksanakan tugas-tugas perencanaan pada satu bidang tertentu saja dalam suatu organisasi, peran dan fungsi seorang perencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan luas yang jauh ke depan dan harus memiliki kemampuan yang bersifat multidisipliner dan intersektoral.

### 3) Tidak adanya dukungan perencanaan pemerintah daerah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara moral sangat mendukung pengembangan wisata desa Edelweis . Namun jika dilihat dari sisi pendanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah tidak ada. Hal ini terlihat dari hasil studi dokumen tentang data Pagu Indikatif Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang termuat didalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, menunjukkan bahwa program

pengembangan destinasi pariwisata dengan indikator peningkatan sarana dan prasarana ODTW yang sesuai dengan standar adalah 100 ODTW pada kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2018). Pada tahun 2019 alokasi target kinerja 10 ODTW, namun dalam implementasinya pada tahun 2019 menurut informan tidak ada program pengembangan destinasi wisata di desa Wonokitri. Sedangkan pada tahun 2020 – 2023 tidak ada alokasi program pengembangan destinasi pariwisata. Alokasi pendanaan pada program pengembangan destinasi pariwisata pada RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 sebesar Rp 8.180.349.000,-.

Sedangkan hasil dari studi dokumen tentang Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mendapat alokasi pendanaan Rp 10.294.184.000,- pada tahun 2019. Sesuai dengan informasi dari informan juga tidak terdapat program pengembangan destinasi wisata di desa Ngadisari. Sedangkan pada tahun 2020 – 2023 tidak ada alokasi program pengembangan destinasi pariwisata.

Oleh karena itu berdasarkan penelaahan data tersebut dapat diartikan bahwa desa Wonokitri dan desa Ngadisari sebagai desa Edelweis belum masuk dalam prioritas pengembangan destinasi wisata daerah. Merujuk pada pendapat Damanik dan Webber (2006), maka dengan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata daerah. Proses pengambilan keputusan menjadi cepat untuk mengambil keputusan sendiri untuk memilih dan melaksanakan proyek kepariwisataan. Namun disisi lain, merupakan tantangan sejauh mana Pemerintah

Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo mampu melaksanakan pengelolaan sumberdaya pariwisata terutama di desa penyangga kawasan TNBTS untuk kemakmuran masyarakatnya. Sedangkan memperhatikan pendapat Muljadi dan Warman (2016) diartikan bahwa belum memadainya sarana dan prasarana wisata desa Edelweis di desa Ngadisari dan desa Wonoktiri disebabkan pembangunan di daerah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo masih banyak memprioritaskan sektor lain daripada sektor pariwisata menjadi kendala dalam pengembangan wisata daerah.

#### 4) Adanya ego sektoral

Ego sektoral merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, tugas Balai Besar TNBTS adalah menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang ada di dalam kawasan. Sedangkan fungsi yang berkaitan dengan desa penyangga kawasan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis yang digagas Balai Besar TNBTS diusung dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pengembangan wisata desa Edelweis merupakan upaya Balai Besar TNBTS melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan utama adalah konservasi Edelweis secara eksitu. Sehingga regulasi yang digunakan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Berlandaskan dengan kajian ilmiah menunjukkan bahwa Edelweis berpotensi untuk

dikembangkan sebagai destinasi wisata baru diluar kawasan. Oleh karena itu program yang diangkat Balai Besar TNBTS bukan pengembangan desa wisata Edelweis, akan tetapi adalah pengembangan wisata desa Edelweis. Karena secara regulasi tidak ada aturan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang desa wisata yang bisa dijadikan pedoman bagi Balai Besar TNBTS.

Disisi lain, terkait desa wisata merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berpedoman pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 51 tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Probolinggo. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan regulasi yang digunakan sehingga dampaknya adalah munculnya ego sektoral. Disamping itu ego sektoral dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, dalam hal ini adalah perbedaan pengelolaan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dengan pengelolaan prioritas Balai Besar TNBTS.

Hasil penelitian Ariani dan Suryawan (2018) menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan kawasan di Pantai Lebih memerlukan beberapa hal, seperti arah area fungsi, arah ruang, rencana fasilitas dan utilitas, rencana transportasi, indikasi program prioritas wilayah, dan rencana pengembangan kegiatan. Oleh karena itu, peserta dari setiap pemangku kepentingan diperlukan untuk perencanaan pembangunan kawasan pariwisata agar berhasil. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam pengembangan pariwisata perlu melibatkan berbagai pihak dan perlu menghindari adanya ego sektoral.

Sebagaimana diungkapkan Suwarno dan Sejati (2017) bahwa perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral (mentalitas silo) yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Regulasi terkait sektor menguat dan menajam di masing-masing sektor bahkan di tingkat Undang Undang sebagai payung hukum, banyak terjadi benturan-benturan kepentingan.

Muljadi dan Warman (2016) juga mengungkapkan bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata tidak semudah yang dibayangkan dikarenakan koordinasi antar *stakeholders* masih lemah dikarenakan ada anggapan dari masing masing sektor bahwa sektor mereka paling penting atau dengan istilah lain masih adanya ego sektoral. Pendapat lain yaitu Soetomo (2007) dalam Singgih dan Nirwana (2016) mengungkapkan bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim dan banyak kegagalan pembangunan, karena para pemegang kebijakan masih berpikir parsial, ego istitusi dan ego sektoral. Masyarakat dianggap tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap perencanaan pengembangan wisata desa Edelwies pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis di Balai Besar TNBTS, merupakan perpaduan antara perencanaan *top-down* dan perencanaan *bottom-up*:
  - a. Perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis sebagai perencanaan *top down* sudah dilaksanakan cukup baik karena memberikan kesempatan menyampaikan ide/gagasan bagi level bawah dalam kerangka Balai Besar TNBTS. Namun secara umum, perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan sinergi antara Balai Besar TNBTS dengan Pemdes Wonokitri, Pemdes Ngadisari, Kecamatan Tosari, Kecamatan Sukapura, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo masih kurang. Sedangkan perencanaan *bottom-up* pada pelaksanaannya juga belum maksimal karena partisipasi masyarakat sangat terbatas dan tidak ada sinergi perencanaan melalui musrenbangdes.
  - b. Balai Besar TNBTS merumuskan dua belas rencana program kegiatan dalam mendukung pengembangan wisata desa Edeweis di Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari, yaitu: Identifikasi Desa Edelweis TNBTS, Pembentukan Kelompok Desa Edelweis, Penyusunan RKT Kelompok

Desa Edelweis, Pendampingan Kelompok Desa Edelweis, Pembibitan Edelweis di dua desa (12.320 bibit), Penanaman Edelweis 11.200 bibit, Pemeliharaan Edelweis 11.200 bibit, Pelatihan Budidaya Edelweis, *Workshop* Pembuatan Paket Wisata Edelweis, Promosi *Land Of Edelweis* TNBTS di Bandar Udara, Festival *Land of Edelweis* TNBTS dan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Desa Edelweis.

- c. *Stakeholders* pada perencanaan pengembangan wisata Edelweis berasal dari internal dan eksternal. *Stakeholders* internal adalah Balai Besar TNBTS beserta unit organisasi dibawahnya dan berperan sebagai *policy creator*, koordinator dan fasilitator. Selanjutnya *stakeholders* eksternal, yang berperan sebagai akselerator yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, LIPI, tokoh masyarakat Tengger, Pemerintah Desa Wonokitri dan Pemerintah Desa Ngadisari, Pemerintah Kecamatan Tosari dan Pemerintah Kecamatan Sukapura, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta akademisi/mahasiswa. Sedangkan *stakeholders* yang berperan sebagai implementor yaitu Kelompok Tani Hulun Hyang Desa Wonokitri dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu Desa Ngadisari.
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis meliputi partisipasi pemikiran berupa kesediaan masyarakat dalam memberikan informasi dan kemauan diskusi dengan Balai Besar TNBTS yang berkaitan tentang Edelweis, partisipasi keterampilan berupa kemampuan masyarakat dalam budidaya Edelweis, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan unsur-unsur dalam mewujudkan keberhasilan pengembangan wisata yaitu unsur *attraction*, *amenities*,

*accessibility* dan *ancillary/hospitality*. Disamping itu, partisipasi masyarakat berupa pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi.

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis, yaitu:
  - a. Faktor pendukung meliputi: (1) faktor lingkungan (budaya) yaitu kebutuhan Edelweis bagi masyarakat Tengger untuk sesaji adat sebagai pendorong upaya konservasi Edelweis, (2) faktor perkembangan ilmu dan teknologi yaitu penggunaan aplikasi RKA-KL mempermudah Balai Besar TNBTS dalam merumuskan perencanaan, (3) faktor sistem yang digunakan berupa kebijakan sebagai pedoman dalam pengembangan wisata desa Edelweis dan (4) faktor pendanaan berupa dukungan anggaran Balai Besar TNBTS dalam pengembangan wisata desa Edelweis. Disamping itu, pendanaan Kelompok Tani Hulun Hyang berasal dari *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia dan Wanawiyata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - b. Faktor penghambat meliputi: faktor lingkungan (sosial) yaitu (1) motivasi dan kesadaran masyarakat Desa Wonokitri dan Desa Ngadisari untuk budidaya Edelweis relatif kurang, (2) faktor sumber daya manusia perencana yaitu tidak adanya jabatan fungsional perencana di Balai Besar TNBTS dan rendahnya SDM masyarakat sehingga masih banyak masyarakat belum memahami maksud dan tujuan proses perencanaan pengembangan wisata desa Edelweis dan (3) faktor lainnya berupa tidak adanya dukungan perencanaan pemerintah daerah yaitu tidak ada alokasi program pengembangan destinasi pariwisata pada tahun 2020 hingga 2023 pada dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-

2023, dan RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 dan (4) adanya ego sektoral sebagai akibat perbedaan perspektif tentang regulasi yang digunakan dan perbedaan pengelolaan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dengan pengelolaan prioritas Balai Besar TNBTS.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan hasil penelitian, selanjutnya saran-saran yang diusulkan peneliti sebagai berikut:

- 1) Balai Besar TNBTS melakukan pendampingan dan memberikan motivasi secara kontinyu kepada Kelompok Tani Hulun Hyang dan Kelompok Tani Kembang Tana Layu, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan ruang seluas luasnya kepada masyarakat sasaran untuk menyampaikan ide/gagasan dan proses perencanaan program kegiatan disinergikan dengan musrenbangdes, musrenbangcam dan musrenbangkab.
- 2) Balai Besar TNBTS mengusulkan pengadaan jabatan fungsional perencana atau mengusulkan alih jabatan dari jabatan fungsional umum/tertentu ke dalam jabatan fungsional perencana ke Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disamping itu diperlukan komunikasi secara berkala agar kebutuhan jabatan fungsional perencana di Balai Besar TNBTS benar-benar dapat terpenuhi.
- 3) Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo menempatkan desa Edelweis Wonokitri dan desa Edelweis Ngadisari sebagai program prioritas destinasi wisata daerah dan memberikan dukungan anggaran dalam dokumen RKPD. Disamping itu, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo memberikan

instruksi kepada Pemdes Wonokitri dan Pemdes Ngadisari untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dana desa untuk pengembangan wisata desa Edelweis.

- 4) Balai Besar TNBTS bersama Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo menghilangkan ego sektoral dan meningkatkan *collaborative government*, diantaranya: 1) melakukan sinkronisasi perencanaan di Balai Besar TNBTS dengan perencanaan di Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo melalui musrenbang baik musrenbang di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten, dan 2) mengkaji kebijakan terkait pengelolaan desa penyangga kawasan TNBTS sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan bersama tentang pedoman pengembangan wisata di desa penyangga kawasan konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan
- Adikampa, I.M. 2017. *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar. Cakra Press
- Anggara, S. dan Sumantri, L. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung : Pustaka Setia
- Antariksa, B. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang : Intrans Publishing
- Ariani, N.K.D dan Suryawan, IB. 2018. *Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Lebih, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar*. Jurnal Destinasi Wisata Volume 6 Nomor 2. Universitas Udayana. Bali
- Arifin, Z. 2018. *Jejak-jejak Bunga Keabadian Edelweis di Gunung Bromo*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3682063/jejak-jejak-bunga-keabadian-edelweis-di-gunung-bromo>. diakses tanggal 15 Maret 2019.
- Bahua. M.I. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo : Ideas Publishing
- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 2015. *Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tahun 2015-2019*. Malang
- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 2018. *Laporan Kinerja Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*. Malang
- Bogason, Peter. 2001. *Public Policy and Local Governance. Institutions in Postmodern Society*, Edwar, Elgar. Cheltenham, UK
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Butler, R.A. 2016. The top 10 most biodiverse countries: *What are the world' s most biodiverse countries?* Mongabay, 21 May 2016. <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/>, diakses 9 Maret 2019.
- Colina, Y. 2016. *Perencanaan Dalam Pengembangan Wisata Daerah Di Kabupaten Katingan*. Jurnal Reformasi Vol 6 Nomor 1. Universitas Tribuwana Tungga Dewi. Malang
- Conyers, D. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Creswell, J W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative dan Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. United States of America: Sage Publications,Inc

- Damanik, J dan Weber H.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*, Yogyakarta : CV Andi Offset
- Faludi, A. 1973. *Planning Theory*. Pergamon International Library : Robert Maxwell, M.C. Publisher
- Fauzi A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Gramedia
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston, Pitman.
- Hadi, S. (2005). *Dimensi lingkungan perencanaan pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hadiwijoyo, S.S. 2018. *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Suluh Media
- Huraerah, A. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Isdarmanto. 2017. *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta : Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Kesembilan Jakarta: Bumi Aksara,
- Kamil, M.H.I, et al. 2015. *Perencanaan Ekowisata Di Desa Sakti Pulau Nusa Penida Provinsi Bali*. Jurnal Manajemen Resort & Leisure Vol. 12, No. 1. Universitas Pendidikan Indonesia
- Kartasasmita, G. 1995. *Administrasi Pembangunan*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017*. Jakarta
- Kementerian Pariwisata. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018*. Jakarta
- Kumar, A. 2001. *Encyclopedia Of Decentralised Planning And Local Self Governance*. New Delhi India: Anmol Publication
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Maulidah, N. 2015. *Analisis Masalah dan Mafradah terhadap jual beli bunga edelweis (Anaphalis javanica) di wisata Gunung Bromo (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)*. Journal Al-Risalah. 2(13):40-65.

- Miles, M.B., Huberman, M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* : Sage Publication, Inc. London
- Moleong, L. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, M. 2017. *Perencanaan Pembangunan*. Makasar : CV Dua Bersaudara
- Muljadi dan Warman. 2016. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Nasir, M. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nugroho, I dan Negara, P.D. 2015. *Pengembangan Desa Melalui Ekowisata*. Solo : PT Era Adicitra Intermedia
- Nurjanah. 2018. *Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis* . Jurnal Dakwah Risalah Volume 29, Nomor 2. Universitas Riau
- Nursini. 2010. *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah-Teori dan Aplikasinya*
- Pendit, N.S. 2003. *Ilmu Pariwisata - Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 2019. *RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023*. Probolinggo
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. - . *RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023*. Pasuruan
- Priatmoko, S. 2019. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Wisata Menggunakan Analisis MSP+DM*. Jurnal Khasanah Ilmu (Jurnal Pariwisata dan Budaya) Vol.10 No.1. Universitas Bina Sarana Informatika
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Safy'i dan Suwandono. 2015. *Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT) Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak*. Jurnal Ruang Volume 1 Nomor 2 hal 51-60. Universitas Diponegoro. Semarang
- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3S
- Singgih, M.N dan Nirwana. 2016. *Perencanaan Dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Dengan Model Partisipatory Rural Appraisal*

(Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). *Jurnal Pesona (Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia)* Vol. 18. STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung

- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Spillane, J.J. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata-Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gaya Media
- Suryono, A. 2010. *Dimensi-Dimesi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press
- Suwarno, Y dan Sejati, T.A. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon Pns Whole Of Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Terry, G.R. 2014. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tjokroamidjojo, B. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung
- Usman, H dan Akbar, P.S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Utomo, A.B.S dan Heddy, S. 2018. *Etnobotani Edelweis (Anaphalis spp) di desa Ngadas, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*. *Jurnal Produksi Tanaman* Vol 6 No 8 Jurusan Agronomi. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang
- Wahyudi, I. 2006. *Metodologi Perencanaan Partisipatif*. Jakarta: Penerbit Kerjasama Malang Corruption Watch dan YAPPIKA
- WCED (*World Commision on Environment and Development*). 1987. *Our Common Future*
- Wiratno. 2018. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun "Organisasi Pembelajar"*. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jakarta
- Wuisman. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Malang : Percetakan Dwi Murni Offset

Yoeti, O. A, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita:

**Peraturan dan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2011-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU**

Jalan Raden Intan Nomor 6 Teip. 0341-491828, Fax 0341-490885 Malang  
E-mail : [bromotenggersemerutn@gmail.com](mailto:bromotenggersemerutn@gmail.com) Website : [www.bromotenggersemeru.org](http://www.bromotenggersemeru.org)

**SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI ( SIMAKSI )**

Nomor : SI . 64/T.8/BIDTEK/BIDTEK1/DIK/08/2019

- Dasar :
1. Peraturan Dirjen PHKA No. P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru
  2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya No. 8672/UN.10.F03.01/PN/2019 tanggal 31 Juli 2019 Hal Ijin Penelitian

Dengan ini memberi izin masuk kawasan konservasi :

Kepada : TRI WIYANTO ✓  
Pengikut : 1 (satu) Orang  
Untuk : Melakukan penelitian untuk penyusunan tesis dengan judul "Perencanaan Pengembangan Desa Ekowisata Edelweis Berbasis Masyarakat (Studi Pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)  
Lokasi : RPTN Tengger Laut Pasir dan RPTN Gunung Penanjakan  
Waktu : 21 Agustus - 31 Oktober 2019

Dengan ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor pada Seksi /Resort Pengelolaan Taman Nasional.
2. Didampingi petugas dari Balai Besar TN. BTS yang dikunjungi dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKSI ini.
3. Dalam proses pendidikan/penelitian tidak diperkenankan merusak ekosistem / bentang alam dan tidak diperkenankan memberikan perakuan (makan, dll) kepada satwa liar yang menjadi objek penelitian dan atau perlakuan terhadap tumbuhan liar (pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan pendidikan/penelitian).
4. Memaparkan/ekspose hasil penelitiannya kepada Kepala Balai Besar TN. BTS/pengelola kawasan.
5. **Menyerahkan copy laporan tertulis dan soft copy** hasil kegiatan pendidikan/penelitian kepada Balai Besar TN. BTS selambat-lambatnya dalam waktu jangka 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan.
6. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini.
7. Komersialisasi hasil kegiatan pendidikan/penelitian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyeter hasil komersialisasi kepada Negara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah.
8. Pengambilan sample/specimen tumbuhan dan atau satwa liar dari kawasan harus mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK : 447/Kpts-II/2003.
9. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menandatangani.
11. SIMAKSI ini dikenakan pungutan PNBPN Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Malang  
Pada tanggal : 20 Agustus 2019

Pih. Kepala Balai Besar



NIP. 19620228 199103 1 001

Donorima/Pemegang SIMAKSI,



TRI WIYANTO

Tembusan : Setelah dibubuhi materai dan ditandatangani, dicopy oleh pemegang izin dan disampaikan Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE
3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan HK Ditjen KSDAE
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Kepala Bidang PTN Wilayah I
7. Kepala Seksi PTN Wilayah I
8. Kepala RPTN Tengger Laut Pasir
9. Kepala RPTN Gunung Penanjakan



**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY**

NO. 072 / 346 /424.104/SUR/RES/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementrian Dalam Negeri ( Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168 ).
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
- Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, tertanggal 31 Juli 2019, Nomor : 8672/UN10.F03.01/PN/2019, Perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama Tri Wiyanto

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, memberikan Rekomendasi Kepada :**

Nama : **Tri Wiyanto**  
 NIM : 186030111111005  
 Alamat : RT.002/RW.001 Desa Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus  
 Pekerjaan/Jabatan : PNS  
 Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : **"Perencanaan Pengembangan Desa Ekowisata Edelweis Berbasis Masyarakat (Studi Pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)"**

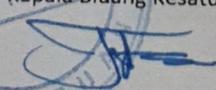
Tujuan : Penelitian  
 Bidang Penelitian : Administrasi Publik  
 penanggung Jawab : **Tri Wiyanto**  
 Anggota/Peserta :

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -

Waktu Penelitian : 2 (dua) Bulan TMT Surat dikeluarkan  
 Lokasi Penelitian : Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Pasuruan, 5 Agustus 2019  
 An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Pasuruan  
 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



**FAUZAN, S.Pd. MM**  
 Pembina  
 NIP. 196706151986021001

**TEMBUSAN :**

- Yth.
1. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
  2. Sdr. Camat Tosari Kabupaten Pasuruan
  3. Kepala Desa Wonokitri Kecamatan Tosari
  4. Arsip.
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455  
PROBOLINGGO

## SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072 / 030 / 426.204/ 2019

- Membaca** : Surat dari : **FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA** Tertanggal 31 Juli 2019 Nomor : 8672/UN10.F03.01/PN/2019 Perihal : *Permohonan Ijin Melakukan Penelitian* .
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **TRI WIYANTO**  
NIDN/NIM. : 186030111111005  
Pekerjaan / Instansi : PNS  
Alamat : Mlati Kidul RT/RW 002/001, Kel/Desa. Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus.

Thema/Acara Survey/Resarch : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA EKOWISATA EDELWEIS BERBASIS MASYARAKAT ( STUDI PADA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TENGGER SEMERU ) .**

Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo.  
Lamanya Survey / Research : Ijin berlaku 3 ( Tiga ) bulan sejak surat di keluarkan.

Pengikut peserta Survey / Research : -

Dengan *ketentuan sebagai berikut*

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 06 Agustus 2019

### TEMBUSAN :

1. Ibu. Bupati Probolinggo ( sebagai laporan )
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolingg
4. Sdr. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Probolinggo.
5. Sdr. Forkopimka Kec. Sukapura
6. Sdr. Kepala Desa Ngadisari
7. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya.
8. Yang bersangkutan.

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PROBOLINGGO



UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690515 199003 1 009